



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024



Bagian Pemerintahan
Setda Kabupaten Kudus



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan petunjuknya, sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 ini dapat terselesaikan.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban konstitusional bagi Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk mewujudkan *Good Governance* yang bersih, transparan dan bertanggung jawab serta mampu memenuhi tantangan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib menyampaikan LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

LPPD merupakan laporan hasil kinerja Kepala Daerah yang disajikan secara terukur, dalam bentuk capaian Indikator Kinerja *Outcome* dan *Output* sebagai hasil penyelenggaraan pemerintahan sesuai kewenangan daerah. LPPD juga melaporkan capaian kinerja makro pembangunan daerah dan capaian penyelenggaraan Urusan Pemerintahan meliputi Urusan Wajib berkaitan pelayanan dasar, Urusan Wajib tidak berkaitan pelayanan dasar dan Urusan Pilihan, sebagaimana ditentukan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan. Selanjutnya LPPD menjadi bahan evaluasi dan pembinaan oleh Pemerintah dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada masa mendatang.

Pada kesempatan ini disampaikan pula permohonan maaf atas kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun lalu. Pemerintah Kabupaten Kudus akan berkomitmen dan terus berbenah diri untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Kudus, Maret 2025
BURATI KUDUS

Dr. Ars. SAM'ANI INTAKORIS, S.T., M.T.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah;	1
b. Data Geografis Wilayah;	3
c. Informasi Umum Data Kependudukan;.....	4
d. Jumlah Kabupaten/Kota (Untuk Provinsi);	
e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah;	8
f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah	12
g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Memuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah)	15
h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja	17
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	24
a. permasalahan strategis pemerintah daerah	24
b. visi dan misi kepala daerah.....	52
c. program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah	52
d. kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan	60
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	52
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	88
2.1 Capaian Kinerja Makro	88
2.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	88
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil	89
2.2.2. Indidkator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan emerintahan	96
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	97
a. target kinerja dalam perjanjian kinerja.....	98
b. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja	99
c. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya	100
d. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunanjangka menengah	101
e. analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja)yang telah dicapai	102

BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	191
3.1	Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota	191
3.2	Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota	191
3.3	Permasalahan dan Kendala	191
3.4	Saran dan Tindak Lanjut	191
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	192
4.1	Urusan Pendidikan	183
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasa	192
4.1.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	192
4.1.3	Realisasi	192
4.1.4	Alokasi Anggaran	194
4.1.5	Dukungan Personil	197
4.1.6	Permasalahan dan Solusi	197
4.2	Urusan Kesehatan	198
4.3	Urusan Pekerjaan Umum	215
4.4	Urusan Perumahan Rakyat.....	219
4.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	223
4.6	Urusan Sosial	231
4.7	Program dan Kegiatan	239
BAB V	PENUTUP	259

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Kudus Tahun 2024, Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati wajib menyampaikan LPPD kepada Mendagri melalui Gubernur, LKPJ kepada DPRD dalam Rapat Paripurna, dan R-LPPD kepada masyarakat. Laporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005–2025, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026, serta Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024.

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah;

Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578));
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
 10. 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran

Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah No 249);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 20).

b. Data Geografis Wilayah;

Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten terkecil di Provinsi Jawa Tengah bagian Utara dengan total seluas 42.516 Ha atau sekitar 1,31% luas Provinsi Jawa Tengah. Wilayah administratif berbatasan dengan wilayah kabupaten di sekitar sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1:

Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati

Sebelah Timur : Kabupaten Pati

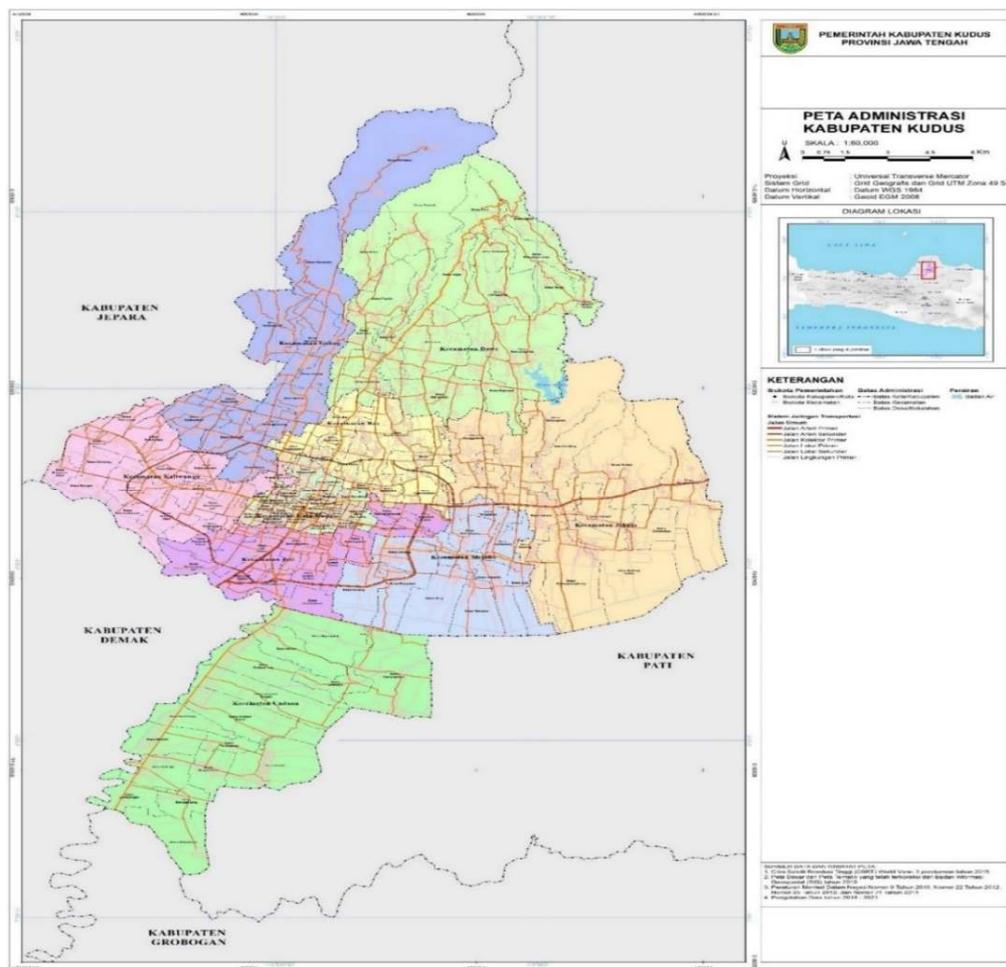
Sebelah Selatan : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan

Sebelah Barat : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak

Secara geografis, Kabupaten Kudus terletak pada 7°1'13" dan 7°22'57" Lintang Selatan dan 110°45'30" dan 110°58'37" Bujur Timur. Letak Kabupaten Kudus sangat strategis karena berada di persimpangan jalur Semarang dan Surabaya serta Purwodadi dan Jepara. Jarak terjauh yang harus ditempuh di Kabupaten Kudus dari barat ke timur adalah 16 Km dan dari utara ke selatan adalah 22 Km.

Kabupaten Kudus ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam struktur perkotaan Provinsi Jawa Tengah. Dalam sistem perwilayahan, Kabupaten Kudus termasuk dalam Wanarakuti yang berpusat di Perkotaan Kudus dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal Provinsi dan Nasional. Wilayah Kabupaten Kudus keseluruhannya merupakan daratan tanpa adanya wilayah pesisir, hanya sedikit di wilayah utara merupakan wilayah perbukitan Gunung Muria.

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Kudus



Sumber : RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032

c. Informasi Umum Data Kependudukan;

Gambaran umum demografis meliputi gambaran tentang jumlah penduduk, rasio ketergantungan, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, lapangan usaha dan tingkat pendidikan.

Tabel 1.1
Banyaknya Penduduk menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024

Tahun	Laki – laki		Perempuan		Total
	Orang	%	Orang	%	
2020	432.754	49.97	433.215	50.03	865.969
2021	433.374	49,97	433.831	50,03	867.205
2022	433.802	49,97	434.277	50,03	868.079
2023	436.585	49,99	436.846	50,01	873.431
2024	438.626	49,97	439.195	50,03	877.821

Diolah dari : DKB semester 2 tahun 2024 (Dinas Dukcapil)

Komposisi penduduk laki-laki di Kabupaten Kudus pada tahun 2023 sebanyak 436.585 orang atau 49,99% dan perempuan sebanyak 436.846 atau sekitar 50,01%. Sedangkan pada tahun 2024 jumlah penduduk sebanyak 877.821 orang dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 438.626 orang atau sekitar 49,97% dan perempuan sebanyak 439.195 orang atau 50,03%. Kondisi ini menunjukkan perkembangan jumlah penduduk perempuan meningkat dibanding laki-laki.

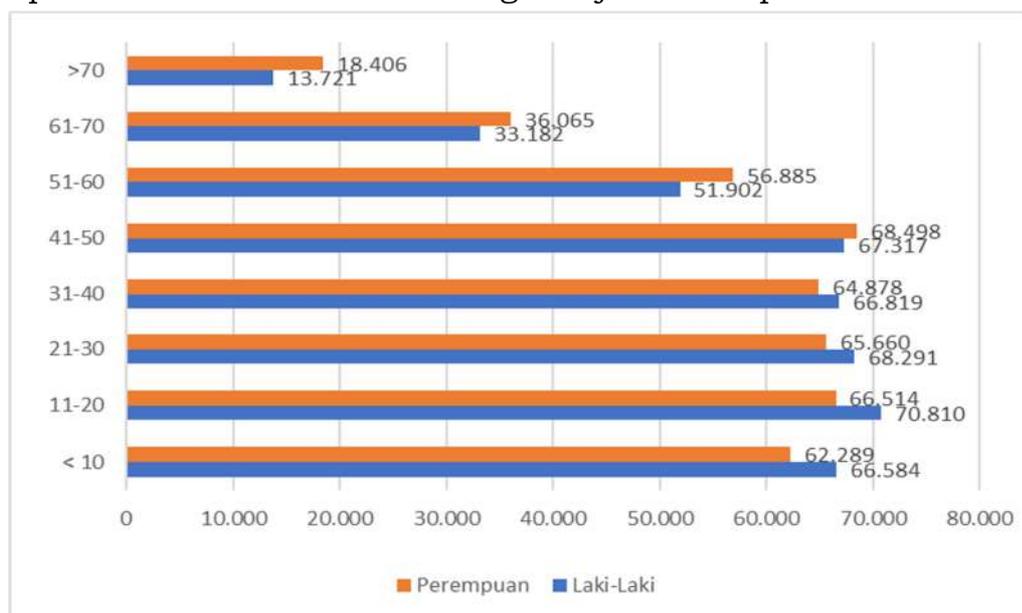
Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin
Kabupaten Kudus Tahun 2024

Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
≤ 10	66.584	62.289	128.873
11-20	70.810	66.514	137.324
21-30	68.291	65.660	133.951
31-40	66.819	64.878	131.697
41-50	67.317	68.498	135.815
51-60	51.902	56.885	108.787
61-70	33.182	36.065	69.247
> 70	13.721	18.406	32.127
Jumlah	438.626	439.195	877.821

Diolah dari : DKB Semester 2 Tahun 2024 (Dinas Dukcapil)

Sedangkan komposisi penduduk menurut kelompok usia di Kabupaten Kudus pada Tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada usia yang lebih muda lebih besar daripada kelompok usia lebih tua, hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk masih positif, dan menjadi bonus demografi bagi ketersediaan

tenaga kerja. Dalam bentuk piramida, kondisi tersebut masih normal, sedangkan bentuk piramida terbalik mengindikasikan terjadinya pola *Aging Population* pada suatu daerah yang dapat berdampak pada *Dependency Ratio* (Angka Ketergantungan). Di Kabupaten Kudus pola piramida masih normal sehingga Angka Ketergantungan masih cukup baik dan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Kudus.



Grafik 1.1.
Jumlah Penduduk Per-usia Perjenis Kelamin Kabupaten Kudus Tahun 2024

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada kelompok usia 11-20 tahun masih lebih besar dari kelompok usia yang lain dengan Jumlah penduduk sebesar 137.324 jiwa terdiri perempuan 66.514 dan laki-laki 70.810 sedangkan kelompok usia tertinggi kedua ada pada rentang usia 41-50 tahun sebesar 135.815 jiwa terdiri dari perempuan 68.498 dan laki-laki 67.317.

Tabel 1.3
Komposisi Penduduk menurut *Dependensi Rasio* di Kabupaten Kudus Tahun 2024

Tahun	0-14	15-64	>65	Jumlah	Rasio Ketergantungan
2020	201.581	613.933	50.455	865.969	41,05
2021	201.884	613.489	51.832	867.205	41,36
2022	189.271	618.301	60.507	868.079	40,40
2023	201.713	614.458	57.260	873.431	42,15
2024	186.406	621.783	69.632	877.821	41,18

Diolah dari : DKB semester 2 tahun 2024 (Dinas Dukcapil)

Pembagian penduduk menurut kelompok umur merupakan potret struktur penduduk setempat yang menggambarkan potensi penduduk produktif dan rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Rasio ketergantungan merupakan rasio antara kelompok penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap penduduk kelompok penduduk usia produktif (usia 15-65 tahun). Rasio Ketergantungan Kabupaten Kudus pada tahun 2024 sebesar 41,18.

Keberhasilan pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir dan budaya masyarakat terhadap minat dan apresiasi pendidikan. Animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi yang makin luas terlihat pada jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tertera dalam rincian tabel 1.4.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024

Tingkat pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
Tidak/Belum Sekolah	215.520	225.946	235.344	242.423	246.338
Belum Tamat SD/ Sederajat	64.338	62.373	59.661	57.637	55.276
Tamat SD/sederajat	236.051	229.125	219.953	214.236	208.611
SLTP/sederajat	146.140	144.005	140.876	139.680	139.283
SLTA/sederajat	157.367	157.921	161.995	167.016	173.288
Akademi / Sarjana	46.553	47.835	50.250	52.439	55.025
Jumlah Penduduk	865.969	867.205	868.079	873.431	877.821

Sumber : DKB semester 2 Tahun 2024 (Dinas Dukcapil)

Berdasarkan Tabel 1.4. di atas, terlihat bahwa jenjang pendidikan yang paling banyak di Kabupaten Kudus pada tahun 2024 adalah pada jenjang Tidak/Belum Sekolah yaitu 246.338 penduduk. Jumlah penduduk yang SLTA/Sederajat lebih banyak daripada penduduk yang SLTP/ Sederajat, Diploma maupun Strata. Banyaknya jumlah lulusan SLTA/Sederajat tersebut menggambarkan berhasilnya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Kudus. Pada tahun 2024 jumlah penduduk yang berpendidikan Akademi/ Sarjana mengalami peningkatan 2.586 orang atau naik 4,49 % dibandingkan tahun 2023.

d. Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan;

Kabupaten Kudus terdiri dari 9 kecamatan yang terbagi 123 desa dan 9 kelurahan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1.5
Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	
1	Kec. Kaliwungu	1	Desa Bakalan Krapyak
		2	Desa Prambatan Kidul
		3	Desa Prambatan Lor
		4	Desa Garung Kidul
		5	Desa Setrokalangan
		6	Desa Banget
		7	Desa Blimbing Kidul
		8	Desa Sidorekso
		9	Desa Gamong
		10	Desa Kedungdowo
		11	Desa Garung Lor
		12	Desa Karangampel
		13	Desa Mijen
		14	Desa Kaliwungu
		15	Desa Papringan
2	Kec. Kota	16	Kelurahan Purwosari
		17	Desa Janggalan
		18	Desa Demangan
		19	Kelurahan Sunggingan
		20	Kelurahan Panjunan
		21	Kelurahan Wergu Kulon
		22	Kelurahan Wergu Wetan
		23	Kelurahan Mlati Kidul
		24	Kelurahan Mlatinorowito
		25	Desa Mlati Lor
		26	Desa Nganguk
		27	Desa Kramat
		28	Desa Demaan
		29	Desa Langgardalem
		30	Desa Kauman
		31	Desa Damaran
		32	Kelurahan Kerjasan
		33	Kelurahan Kajeksan
		34	Desa Krandon
		35	Desa Singocandi
		36	Desa Glantengan
		37	Desa Kaliputu

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	
		38	Desa Barongan
		39	Desa Burikan
		40	Desa Rendeng
3	Kec. Jati	41	Desa Jetiskapuan
		42	Desa Tanjungkarang
		43	Desa Jati Wetan
		44	Desa Pasuruhan Kidul
		45	Desa Pasuruhan Lor
		46	Desa Ploso
		47	Desa Jati Kulon
		48	Desa Getaspejaten
		49	Desa Loram Kulon
		50	Desa Loram Wetan
		51	Desa Jepangakis
		52	Desa Megawon
		53	Desa Ngembal Kulon
		54	Desa Tumpangkrasak
4	Kec. Undaan	55	Desa Wonosoco
		56	Desa Lambangan
		57	Desa Kalirejo
		58	Desa Medini
		59	Desa Sambung
		60	Desa Glagahwaru
		61	Desa Kutuk
		62	Desa Undaan Kidul
		63	Desa Undaan Tengah
		64	Desa Karangrowo
		65	Desa Larikrejo
		66	Desa Undaan Lor
		67	Desa Wates
		68	Desa Ngemplak
		69	Desa Terangmas
		70	Desa Berugenjang
5	Kec. Mejobo	71	Desa Gulang
		72	Desa Jepang
		73	Desa Payaman
		74	Desa Kirig
		75	Desa Temulus
		76	Desa Kesambi

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	
		77	Desa Jojo
		78	Desa Hadiwarno
		79	Desa Mejobo
		80	Desa Golantepus
		81	Desa Tenggeles
6	Kec. Jekulo	82	Desa Sadang
		83	Ds. Bulungcangkring
		84	Desa Bulung Kulon
		85	Desa Sidomulyo
		86	Desa Gondoharum
		87	Desa Terban
		88	Desa Pladen
		89	Desa Klaling
		90	Desa Jekulo
		91	Desa Hadipolo
		92	Desa Honggosoco
		93	Desa Tanjungrejo
7	Kec. Bae	94	Desa Dersalam
		95	Desa Ngembalrejo
		96	Desa Karangbener
		97	Desa Gondangmanis
		98	Desa Pedawang
		99	Desa Bacin
		100	Desa Panjang
		101	Desa Peganjaran
		102	Desa Purworejo
		103	Desa Bae
8	Kec. Gebog	104	Desa Gribig
		105	Desa Klumpit
		106	Desa Getasrabi
		107	Desa Padurenan
		108	Desa Karangmalang
		109	Desa Besito
		110	Desa Jurang
		111	Desa Gondosari
		112	Desa Kedungsari
		113	Desa Menawan
		114	Desa Rahtawu
9	Kec. Dawe	115	Desa Samirejo
		116	Desa Cendono
		117	Desa Margorejo
		118	Desa Rejosari

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	
		119	Desa Kandangmas
		120	Desa Glagah Kulon
		121	Desa Tergo
		122	Desa Cranggang
		123	Desa Lau
		124	Desa Piji
		125	Desa Puyoh
		126	Desa Soco
		127	Desa Ternadi
		128	Desa Kajar
		129	Desa Kuwukan
		130	Desa Dukuhwaringi
		131	Desa Japan
		132	Desa Colo

Sumber : Perda Nomor 1 Tahun 2015, diolah.

- e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah;

Tabel 1.6
Nama Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Sekretariat Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus
2	Sekretariat DPRD	
3	Inspektorat Daerah	
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
6	Dinas Kesehatan	
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
11	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
12	Dinas Perdagangan	
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	
14	Dinas Perhubungan	
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
16	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	

No	Nama Perangkat Daerah	Dasar Hukum
17	Dinas Pertanian dan Pangan	
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
19	Satuan Polisi Pamong Praja	
20	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	
23	Kecamatan Kota	
24	Kecamatan Jati	
25	Kecamatan Undaan	
26	Kecamatan Mejobo	
27	Kecamatan Jekulo	
28	Kecamatan Kaliwungu	
29	Kecamatan Dawe	
30	Kecamatan Gebog	
31	Kecamatan Bae	
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022

- f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di setiap Perangkat Daerah

Tabel 1.7
Rincian Aparatur Sipil Negara

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Jumlah
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7	18	29	54
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Urusan Pemerintahan Umum	11	4	7	22
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Urusan Trantibum Linmas	13	2	6	21
4	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Fungsi Penunjang Keuangan	18	12	32	62

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Jumlah
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
5	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Fungsi Penunjang Perencanaan	5	22	6	33
		Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan	1	0	1	2
6	Sekretariat Daerah	Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan	16	42	68	126
7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	2	9	4	15
		Urusan Perpustakaan	2	4	4	10
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Urusan Kebudayaan	3	5	12	20
		Urusan Pariwisata	3	2	11	16
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	9	6	22
10	Dinas Kesehatan	Urusan Kesehatan	9	733	54	796
11	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Urusan Komunikasi dan Informatika	6	12	5	23
		Urusan Statistik	0	0	2	2
		Urusan Persandian	0	0	3	3
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	9	45	64
		Urusan Pertanahan	1	0	15	16
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Urusan Pemerintahan bidang PMD	12	6	11	29
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Urusan Penanaman Modal	4	8	13	25
15	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Urusan Pendidikan	9	3686	163	3858
		Urusan Kepemudaan dan Olahraga	1	0	18	19
16	Dinas Perdagangan	Urusan Perdagangan	6	9	92	107
17	Dinas Perhubungan	Urusan Perhubungan	11	7	58	76
18	Dinas Pertanian dan Pangan	Urusan Pertanian	8	40	26	74
		Urusan Pangan	1	2	2	5
		Urusan Perikanan	1	1	5	7
		Urusan Kehutanan	0	0	0	0

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Jumlah
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	Urusan Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	4	6	11	21
		Urusan Lingkungan Hidup	3	9	101	113
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	Urusan Sosial	3	5	8	16
		Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	1	6	8
		Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	1	1	6	8
21	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Urusan Tenaga Kerja	7	18	4	29
		Urusan Perindustrian	1	1	4	6
		Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	4	4	9
		Urusan Transmigrasi	0	0	0	0
22	Inspektorat	Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan	8	27	6	41
23	RSUD dr. Loekmono Hadi	Urusan Kesehatan	12	384	102	498
24	Satuan Polisi Pamong Praja	Urusan Trantibum Linmas	9	25	14	48
25	Sekretariat DPRD	Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan	6	2	6	14
26	Kecamatan Bae	Urusan Pemerintahan Umum	7	0	8	15
27	Kecamatan Dawe	Urusan Pemerintahan Umum	7	0	13	20
28	Kecamatan Gebog	Urusan Pemerintahan Umum	7	0	9	16
29	Kecamatan Jati	Urusan Pemerintahan Umum	8	0	7	15
30	Kecamatan Jekulo	Urusan Pemerintahan Umum	9	0	8	17
31	Kecamatan Kaliwungu	Urusan Pemerintahan Umum	6	0	8	14
32	Kecamatan Kota Kudus	Urusan Pemerintahan Umum	47	0	40	87

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Jumlah
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
33	Kecamatan Mejobo	Urusan Pemerintahan Umum	8	0	11	19
34	Kecamatan Undaan	Urusan Pemerintahan Umum	8	0	8	16
35	Staf Ahli Bupati	Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan	3	0	3	6
JUMLAH			333	5125	1085	6543

Sumber : BKPSDM Kabupaten Kudus Tahun 2024

g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sedangkan anggaran dan realisasi dapat dilihat sebagaimana tabel 1.8. berikut ini.

Tabel 1.8
Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	2.232.004.243.993	2.269.812.377.865	101,69
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	507.396.689.623	546.739.719.398	107,75
Pajak Daerah	187.898.112.000	199.346.476.225	106,09
Retribusi Daerah	287.334.726.000	318.546.358.315	110,86
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.840.768.000	10.840.770.453	100,00
Lain-lain PAD yang Sah	21.323.083.623	18.006.114.405	84,44
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	507.396.689.623	546.739.719.398	107,75
PENDAPATAN TRANSFER	1.724.607.554.370	1.723.072.658.467	99,91
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.533.655.622.535	1.548.396.951.853	100,96
Pendapatan Transfer Antar Daerah	190.951.931.835	174.675.706.614	91,48
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-
Pendapatan Hibah	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	2.232.004.243.993	2.269.812.377.865	101,69
BELANJA DAERAH	2.513.052.944.089	2.360.475.264.730	93,93
BELANJA OPERASI	1.863.911.478.118	1.738.294.737.500	93,26
Belanja Pegawai	967.533.019.953	908.142.734.805	93,86
Belanja Barang dan Jasa	766.591.249.501	704.869.261.661	91,95
Belanja Hibah	127.467.958.664	123.351.553.534	96,77
Belanja Bantuan Sosial	2.319.250.000	1.931.187.500	83,27
JUMLAH BELANJA OPERASI	1.863.911.478.118	1.738.294.737.500	93,26
BELANJA MODAL	335.853.434.506	315.397.080.530	93,91
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.998.820.197	110.768.013.211	94,67
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.123.198.231	91.970.755.705	90,06
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	112.234.201.306	108.250.750.568	96,45
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.865.126.772	3.884.395.566	100,50
Belanja Modal Aset Lainnya	632.088.000	523.165.480	82,77

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
JUMLAH BELANJA MODAL	335.853.434.506	315.397.080.530	93,91
BELANJA TIDAK TERDUGA	7.992.644.465	1.731.817.300	21,67
Belanja Tidak Terduga	7.992.644.465	1.731.817.300	21,67
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	7.992.644.465	1.731.817.300	21,67
BELANJA TRANSFER	305.295.387.000	305.051.629.400	99,92
Belanja Bagi Hasil	21.643.110.000	21.636.443.400	99,97
Belanja Bantuan Keuangan	283.652.277.000	283.415.186.000	99,92
JUMLAH BELANJA TRANSFER	305.295.387.000	305.051.629.400	99,92
JUMLAH BELANJA	2.513.052.944.089	2.360.475.264.730	93,93
SURPLUS/DEFISIT	(281.048.700.096)	(90.662.886.865)	32,26
PEMBIAYAAN DAERAH	281.048.700.096	281.048.700.096	100,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	281.048.700.096	281.048.700.096	100,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	281.048.700.096	281.048.700.096	100,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	281.048.700.096	281.048.700.096	100,00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK per 15 Januari 2025)

Tabel 1.9
Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah TA 2024

NO	URUSAN	ANGGARAN DAN REALISASI		
		Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	%
A	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.493.938.932.548	1.401.387.257.704	93,35
	1. Pendidikan	622.800.991.599	583.937.865.326	93,76
	2. Kesehatan	614.051.334.902	570.858.536.798	92,97
	3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	136.020.148.200	130.613.567.941	96,03
	4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	24.778.716.020	23.455.027.273	94,66
	5. Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	27.694.191.810	26.132.026.022	94,36
	6. Sosial	68.593.550.017	66.390.234.344	96,79
B	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	215.349.973.803	205.047.657.599	95,22
	7. Tenaga Kerja	14.701.863.662	13.766.267.558	93,64
	8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	603.756.830	360.676.757	59,74
	9. Pangan	711.360.000	683.889.600	96,14
	10. Pertanahan	400.000.000	259.878.400	64,97
	11. Lingkungan Hidup	15.129.291.020	14.555.369.834	96,21
	12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.890.246.000	8.360.195.185	94,04
	13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.884.944.528	12.357.132.067	95,90
	14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.139.201.000	5.737.295.592	80,36
	15. Perhubungan	79.968.701.165	78.382.659.141	98,02
	16. Komunikasi & Informatika	25.274.976.678	24.221.983.668	95,83
	17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	799.998.950	763.627.075	95,45
	18. Penanaman Modal	7.098.878.944	6.631.003.533	93,41
	19. Kepemudaan dan Olahraga	17.446.798.380	16.168.419.954	92,67
	20. Statistik	90.600.000	73.782.062	81,44

NO	URUSAN		ANGGARAN DAN REALISASI		
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	%
21.	Persandian		434.803.000	408.184.022	93,88
22.	Kebudayaan		16.378.215.766	15.651.752.156	95,56
23.	Perpustakaan		7.037.879.930	6.313.411.197	89,71
24.	Kearsipan		358.457.950	352.129.798	98,23
C	Urusan Pilihan		74.265.482.930	65.955.395.163	88,81
25.	Kelautan dan Perikanan		1.011.327.000	930.966.795	92,05
26.	Pariwisata		3.624.617.552	3.520.648.150	97,13
27.	Pertanian		23.030.030.000	21.431.312.773	93,06
28.	Kehutanan		20.000.000	18.313.000	91,57
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral				
30.	Perdagangan		32.813.692.178	29.076.267.380	88,61
31.	Perindustrian		13.765.816.200	10.977.887.065	79,75
32.	Transmigrasi				
D	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		241.433.897.006	218.474.015.471	90,49
33	Sekretariat Daerah		143.979.040.006	136.909.366.544	95,09
34	Sekretariat DPRD		97.454.857.000	81.564.648.927	83,69
E	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		372.952.363.360	360.033.068.436	96,54
35.	Perencanaan		12.569.260.830	11.523.671.993	91,68
36.	Keuangan		343.855.013.590	333.669.904.692	97,04
37.	Kepegawaian		13.277.645.740	12.071.754.924	90,92
38.	Pendidikan dan Pelatihan		2.521.800.000	2.089.581.071	82,86
39.	Penelitian dan Pengembangan		728.643.200	678.155.756	93,07
F	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan		12.111.402.000	10.718.481.546	88,50
40.	Inspektorat Daerah		12.111.402.000	10.718.481.546	88,50
G	Unsur Kewilayahan		63.585.544.529	59.972.249.662	94,32
41.	Kecamatan		63.585.544.529	59.972.249.662	94,32
H	Unsur Pemerintahan Umum		39.415.347.913	38.940.422.149	98,80
42.	Kesatuan Bangsa dan Politik		39.415.347.913	38.940.422.149	98,80
	JUMLAH BELANJA		2.513.052.944.089	2.360.475.264.730	93,93

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK per 15 Januari 20254)

- h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan, Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja.

Tabel 1.10
Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

No	Unsur Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	Unsur Pemerintahan Bidang Pendidikan		622.800.991.599	583.937.865.326
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	457.594.861.682	427.610.078.321
b		Program Pengelolaan Pendidikan	164.596.130.917	155.724.038.005

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
c		Program Pengembangan Kurikulum	310.000.000	306.300.000
d		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	299.999.000	297.449.000
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		614.051.334.902	570.858.536.798
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	392.288.880.241	363.727.750.894
b		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	218.808.647.261	204.765.550.660
c		Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	679.597.000	560.174.449
d		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	694.285.900	454.297.150
e		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.579.924.500	1.350.763.645
3	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja		14.701.863.662	13.766.267.558
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	9.795.614.662	9.049.157.265
b		Program Perencanaan Tenaga Kerja	20.000.000	19.536.270
c		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.522.250.000	4.339.973.748
d		Program Penempatan Tenaga Kerja	259.999.000	253.878.275
e		Program Hubungan Industrial	104.000.000	103.722.000
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		603.756.830	360.676.757
a		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	204.930.900	71.983.107
b		Program Perlindungan Perempuan	33.894.660	21.025.250
c		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	9.999.000	6.896.000
d		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	292.953.270	205.437.900
e		Program Perlindungan Khusus Anak	61.979.000	55.334.500
5	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan		711.360.000	683.889.600
a		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	35.691.000	33.774.000
b		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	480.249.000	472.789.900
c		Program Penanganan Kerawanan Pangan	120.420.000	104.249.500

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
d		Program Pengawasan Keamanan Pangan	75.000.000	73.076.200
6	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan		400.000.000	259.878.400
a		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	137.500.000	17.478.400
b		Program Penatagunaan Tanah	262.500.000	242.400.000
7	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup		15.129.291.020	14.555.369.834
a		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	195.000.000	182.917.800
b		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	575.882.000	557.341.238
c		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.394.569.630	2.239.224.909
d		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	4.999.830	4.656.000
e		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	20.000.000	15.696.200
f		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	327.199.000	261.031.931
g		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	145.000.000	124.255.755
h		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20.000.000	15.715.119
i		Program Pengelolaan Persampahan	11.446.640.560	11.154.530.882
8	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		8.890.246.000	8.360.195.185
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.142.408.800	4.783.037.232
b		Program Pendaftaran Penduduk	2.175.900.700	2.073.726.889
c		Program Pencatatan Sipil	826.702.000	813.456.926
d		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	745.234.500	689.974.138
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		12.884.944.528	12.357.132.067
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.055.107.608	5.811.359.588

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
b		Program Penataan Desa	3.288.201.000	3.205.640.627
c		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	115.000.000	101.802.382
d		Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.583.462.900	2.500.224.831
e		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	843.173.020	738.104.639
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		7.139.201.000	5.737.295.592
a		Program Pengendalian Penduduk	368.600.000	147.937.620
b		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.315.401.000	1.420.490.554
c		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.455.200.000	4.168.867.418
11	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		79.968.701.165	78.382.659.141
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.254.721.695	15.423.539.462
b		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	63.713.979.470	62.959.119.679
12	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika		25.274.976.678	24.221.983.668
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.750.025.398	12.200.172.903
b		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	9.738.525.680	9.533.474.958
c		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.786.425.600	2.488.335.807
13	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		799.998.950	763.627.075
a		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	50.000.000	48.702.000
b		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	100.000.000	98.301.300
c		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	299.999.360	277.337.660
d		Program Pengembangan UMKM	349.999.590	339.286.115
14	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal		7.098.878.944	6.631.003.533
a		Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/Kota	5.746.830.940	5.513.375.565
b		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	175.425.000	162.141.815
c		Program Promosi Penanaman Modal	181.820.550	128.217.800
d		Program Pelayanan Penanaman Modal	275.007.454	266.112.977

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
e		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	641.286.000	483.275.376
f		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	78.509.000	77.880.000
15	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga		17.446.798.380	16.168.419.954
a		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	789.999.980	745.220.745
b		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	16.256.798.400	15.023.199.209
c		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	400.000.000	400.000.000
16	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		90.600.000	73.782.062
a		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	90.600.000	73.782.062
17	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian		434.803.000	408.184.022
a		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	434.803.000	408.184.022
18	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan		16.378.215.766	15.651.752.156
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.283.089.650	10.614.470.141
b		Program Pengembangan Kebudayaan	2.578.211.060	2.558.756.440
c		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	331.335.185	325.337.270
d		Program Pengelolaan Permuseuman	2.185.579.871	2.153.188.305
19	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan		7.037.879.930	6.313.411.197
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.480.544.130	4.895.452.099
b		Program Pembinaan Perpustakaan	1.557.335.800	1.417.959.098
20	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan		358.457.950	352.129.798
a		Program Pengelolaan Arsip	347.721.950	341.445.798
b		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	10.736.000	10.684.000
21	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan		1.011.327.000	930.966.795
a		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	72.508.000	65.378.000
b		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	878.021.000	809.471.875
c		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	60.798.000	56.116.920
22	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata		3.624.617.552	3.520.648.150

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
a		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.325.817.552	2.249.997.900
b		Program Pemasaran Pariwisata	816.000.000	802.419.000
c		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	482.800.000	468.231.250
23	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		23.030.030.000	21.431.312.773
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.404.122.000	15.093.077.048
b		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.115.630.000	2.059.055.500
c		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.205.000.000	2.174.455.700
d		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	225.049.000	209.925.000
e		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	150.000.000	142.145.850
f		Program Penyuluhan Pertanian	1.930.229.000	1.752.653.675
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan		20.000.000	18.313.000
a		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	20.000.000	18.313.000
25	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan		32.813.692.178	29.022.984.380
a		Program Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota	18.956.583.308	15.985.644.721
b		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	10.000.000	6.132.650
c		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	12.724.651.480	12.016.700.802
d		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	139.768.040	135.124.900
e		Program Pengembangan Ekspor	221.123.000	204.278.586
f		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	69.336.000	34.540.359
g		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	692.230.350	640.562.362
26	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian		13.765.816.200	10.977.887.065
a		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	13.758.316.200	10.971.341.665
b		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	5.000.000	4.236.400
c		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	2.500.000	2.309.000
27	Sekretariat Daerah		143.979.040.006	136.909.366.544

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	51.280.393.096	47.665.120.498
b		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	90.623.068.890	87.345.324.391
c		Program Perekonomian dan Pembangunan	2.075.578.020	1.898.921.655
28	Sekretariat DPRD		97.454.857.000	81.564.648.927
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	61.498.184.600	56.544.606.308
b		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	35.956.672.400	25.020.042.619
3	Perencanaan		12.569.260.830	11.523.671.993
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.940.353.760	7.475.533.454
b		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.555.011.070	3.151.395.937
c		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.073.896.000	896.742.602
30	Keuangan		343.855.013.590	333.669.904.692
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.220.905.050	20.926.164.247
b		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	315.377.151.190	308.551.152.236
c		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.908.258.700	2.059.104.618
b		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.348.698.650	2.133.483.591
31	Kepegawaian		13.277.645.740	12.071.754.924
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.990.263.570	8.684.916.442
b		Program Kepegawaian Daerah	4.287.382.170	3.386.838.482
32	Pendidikan dan Pelatihan		2.521.800.000	2.089.581.071
a		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.521.800.000	2.089.581.071
33	Penelitian Dan Pengembangan		728.643.200	678.155.756
a		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	728.643.200	678.155.756
34	Inspektorat Daerah		12.111.402.000	10.718.481.546
a		Inspektorat Daerah	12.111.402.000	10.718.481.546
b		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.491.628.000	9.736.613.088
c		Program Penyelenggaraan Pengawasan	754.905.150	377.865.719
d		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	864.868.850	604.002.739

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
35	Kecamatan		63.585.544.529	59.972.249.662
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	48.642.483.794	46.090.392.406
b		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	669.049.370	563.659.724
c		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	9.807.970.739	9.218.347.566
d		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.621.366.166	1.504.206.176
e		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.962.697.930	1.777.612.200
f		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	881.976.530	818.031.590
36	Kesatuan Bangsa dan Politik		39.415.347.913	38.940.422.149
a		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.526.945.700	4.229.713.002
b		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.526.016.180	1.481.836.740
c		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	32.433.115.033	32.349.007.730
d		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	222.650.000	197.147.500
e		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	429.713.000	411.825.450
f		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	276.908.000	270.891.727
	Jumlah		2.513.052.944.089	2.360.475.264.730

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan strategis pemerintahan daerah

Permasalahan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kudus, mendasarkan pada hasil analisis sebagaimana 4 aspek penyelenggaraan pembangunan yang meliputi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Kesejahteraan Sosial dan Aspek Daya Saing, maka permasalahan pembangunan disajikan sebagai berikut :

1. *Aspek Geografi dan Demografi*

Permasalahan yang relevan sesuai kondisi geografi dan demografi sebagaimana adalah berkaitan dengan permasalahan di urusan lingkungan hidup, sub urusan bencana, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Hasil analisis selaras dengan permasalahan sebagaimana tertuang dalam aspek pelayanan umum urusan berkaitan dengan bidang Lingkungan Hidup, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2. *Aspek Kesejahteraan Masyarakat*

Aspek kesejahteraan masyarakat ditinjau dari dua (2) fokus yaitu Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi yang ditandai dengan indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, dan tingkat kemiskinan, kedua fokus Kesejahteraan Sosial ditandai dengan indikator Angka Melek Huruf, Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan pengeluaran per kapita Penanda-penanda ini pencapaiannya didukung lebih dari 1 (satu) urusan pembangunan sehingga rumusan permasalahan pembangunannya sebagai berikut :

Tabel 1.11
Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kontribusi sektor tanpa IHT terhadap perekonomian belum optimal	hasil pertanian dan perikanan belum optimal	Prasarana infrastruktur pertanian belum memadai
		Penyediaan sarana pertanian berupa alsintan, benih, pupuk dan obat-obatan belum memadai
		Penyediaan sarana pertanian berupa alsintan, benih, pupuk dan obat-obatan belum memadai
		Adanya serangan hama/penyakit tanaman
		Sarana pengolahan hasil perikanan belum memadai
	Belum optimalnya volume perdagangan	Belum Optimalnya Sarana Distribusi Perdagangan
		Belum optimalnya cakupan pemantauan harga dan ketersediaan Rendahnya pertumbuhan ekspor

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Rendahnya kapasitas pelaku perdagangan
	Belum Optimalnya Kunjungan Wisatawan	Belum Optimalnya Pengembangan Destinasi Wisata
		Belum Optimalnya Pemasaran Pariwisata
		Belum Optimalnya Pengembangan Ekonomi Kreatif
	Belum Optimalnya Pertumbuhan IKM	Belum optimalnya perencanaan dan pembangunan industri
		Belum Tersedianya Informasi Industri yang Optimal
	Rendahnya Kualitas Koperasi	Rendahnya Kapasitas Pengelola Koperasi
Rendahnya omzet usaha mikro	Kapasitas produksi usaha mikro masih kurang	
Belum optimal Penurunan tingkat kemiskinan daerah	Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Belum optimalnya pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
		Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial (luar panti)
		Belum optimalnya pelayanan pemberdayaan sosial
	Belum optimalnya Kesetaraan Gender	Masih rendahnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan
	Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Masih terjadinya kekerasan kepada Anak
	Banyaknya permukiman tidak layak huni	Belum optimalnya fasilitasi pemenuhan rumah layak huni.
		Belum Optimalnya penanganan dan pencegahan kawasan kumuh
Masih adanya masyarakat yang belum terakses air minum dan sanitasi		
Belum optimalnya penyelenggaraan Pendidikan kepada masyarakat	Belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan kepada masyarakat	Masih adanya layanan satuan pendidikan yang belum sesuai Standar Nasional Pendidikan
		Masih rendahnya Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan
		Masih rendahnya Literasi Masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya daya saing pemuda dan olah raga	Belum optimalnya partisipasi pemuda dan prestasi olahraga
Belum Optimalnya upaya pengelolaan kesehatan	Belum Optimalnya upaya pengelolaan kesehatan	Masih ditemukannya kematian ibu dan bayi
		Masih ditemukannya balita gizi buruk dan balita stunting
		Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi
		Belum optimalnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan
		Belum optimalnya upaya pemberdayaan kesehatan masyarakat
		Belum optimalnya pemanfaatan pangan
		Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan
		Belum optimalnya pelaksanaan KIE pengendalian penduduk dan KB

3. Aspek Pelayanan Umum

Selaras dengan tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, manifestasi pelayanan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kudus tercermin dalam pelayanan di setiap urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kudus.

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.12
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan	Pemenuhan Layanan Mutu Pendidikan Belum dilaksanakan secara maksimal	Masih Ada sekitar 26,50% Sekolah yang belum terakreditasi A
		Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan belum sesuai standar penyelenggaraan yang dipersyaratkan
		Masih ada sekitar 4 % Tenaga Pendidikan non Kependidikan belum layak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Masih Relatif kurangnya capaian atas kualitas hasil belajar ditandai dengan masih relative rendahnya angka literasi numerasi masyarakat pada kisaran 1,68
	Pelayananan memperluas akses	Masih terdapat sarpras pendidikan dalam kondisi tidak baik sekitar 5 %
	Pendidikan telah dilakukan tetapi belum optimal	Masih terdapat 5 % satuan pendidikan yang sarprasnya belum memenuhi standar

b. Kesehatan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.13
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
Belum optimalnya upaya pengelolaan kesehatan masyarakat	Belum optimalnya pelayanan kesehatan pada ibu, bayi dan balita	Risiko tinggi kehamilan dan melahirkan akibat kondisi ibu hamil yang tidak sehat menyebabkan komplikasi	
		Masih ditemukannya kasus komplikasi neonatal dan bayi resiko tinggi dengan berat badan lahir rendah	
		Belum semua bayi baru lahir mendapat pelayanan neonatal sesuai standar	
			Masih ada bayi yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap
			Masih ditemukannya kasus <i>stunting</i>
	Belum optimalnya Penemuan dan pelayanan kasus penyakit menular dan tidak menular		Masih rendahnya Penemuan kasus TBC
			Masih tingginya prevalensi HIV
			Masih tingginya kasus ² DBD
			Belum optimalnya skrining kesehatan pada usia produktif, lansia, penderita diabetes melitus deteksi , hipertensi, dan ODGJ
	Belum optimalnya upaya promosi dan pemberdayaan kesehatan		Belum optimalnya pelaksanaan Germas
Belum optimalnya mutu layanan kesehatan		Belum ada Puskesmas terakreditasi paripurna	

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya akreditasi RS
		Belum ada klinik yang terakreditasi
	Belum optimalnya pelayanan kesehatan perorangan	Kurangnya sarana prasarana pelayanan kesehatan
		Kurangnya kuantitas tenaga kesehatan pelayanan
		Kurangnya kualitas tenaga kesehatan pelayanan

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.14
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum	Belum optimalnya kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan drainase	Masih adanya jalan dan jembatan kondisi rusak
		Masih adanya jaringan irigasi yang rusak
		Belum terbangunnya system drainase pada daerah genangan air
	Belum optimalnya akses air minum masyarakat	Masih kurangnya infrastruktur air minum dan sanitasi
Belum optimalnya Penyelenggaraan penataan ruang	Belum optimalnya kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan drainase	Masih adanya jalan dan jembatan kondisi rusak
		Belum selesainya penyusunan regulasi rencana tata ruang

d. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.15
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pemenuhan permukiman layak huni	Masih adanya rumah tidak layak huni	Masih ada rumah rusak korban bencana dan rumah tidak layak huni miskin
		Sulitnya masyarakat dalam pemenuhan rumah layak huni
	Belum optimalnya kualitas lingkungan permukiman	Kurang memadainya prasarana sarana dan utilitas perumahan
		Masih adanya permukiman kumuh
		Kesadaran masyarakat akan PHBS masih rendah
		Masih adanya rumah yang belum memiliki akses sanitasi
		Masih adanya PSU perumahan yang belum diserahkan ke Pemerintah Kabupaten
Masih adanya rumah yang belum memiliki akses air minum		

e. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.16
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih banyaknya pelanggaran ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)	Belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Adanya tumpang tindih kewenangan penanganan galian C
		Belum optimalnya monitoring ijin usaha
		Belum optimalnya koordinasi dengan dinas terkait (BPPKAD, Dinsos, Disdag)
	Belum optimalnya penanganan pemadam kebakaran	Keterbatasan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran yang telah melebihi masa pakai
		Belum optimalnya SDM pemadam kebakaran yg terlatih
		Terbatasnya jml pos damkar

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya penggunaan (Alat Pemadam Api Ringan (APAR))
Masih kurangnya Ketahanan Daerah dalam menghadapi Bencana	Belum optimalnya Penanggulangan Bencana	Belum Optimalnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
		Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
		Belum Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pd masyarakat
		Belum Optimalnya Pelayanan Pasca bencana pada masyarakat

f. Sosial

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Sosial di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.17
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Sosial

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
belum optimalnya penanganan PPKS	Belum Optimalnya pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	kurangnya koordinasi antara pengguna dan pengampu data PPKS dan PSKS (DTKS) kewilayahan
		Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu miskin absolut dan kelompok rentan
	Belum Optimalnya pelayanan pemberdayaan sosial	Belum optimalnya penyediaan bantuan sosial
	Belum Optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial (luar panti)	Belum optimalnya Validasi pendataan disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis
	Belum optimalnya penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, saat dan pasca tanggap darurat	Belum optimalnya perlindungan sosial pasca bencana alam dan sosial

B. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang tenaga kerja di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.18
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja	Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja belum optimal	Minimnya pengetahuan perusahaan dalam menyusun RTK Mikro
	Mutu tenaga kerja yang Relatif Rendah	Minimnya Ketrampilan tenaga Kerja
	Kurangnya Akses Tenaga Kerja Pada Pasar Kerja	Informasi Peluang Kerja dan Mekanisme Penempatan Tenaga kerja Belum Sepenuhnya dipahami Oleh Masyarakat
	Kurangnya Perlindungan Tenaga Kerja dalam Hubungan Industrial	Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak Masih Rendah
		Masih lemahnya Sarana Hubungan Industrial

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.19
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Kesetaraan Gender	belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan politik
		Belum optimalnya upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan
Belum optimalnya pemenuhan hak anak	belum optimalnya layanan perlindungan anak	Masih terbatasnya pemahaman bahaya kekerasan kepada anak
		Masih terbatasnya fasilitas publik layak anak

c. Pangan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pangan di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.20
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum terpenuhinya Ketersediaan pangan yang berkualitas	Belum optimalnya penyelenggaraan ketahanan pangan	Belum tersedianya data neraca bahan makanan dan data cadangan pangan
	Belum optimalnya ketersediaan pangan	Kurangnya pemanfaatan lahan pekarangan
		Infrastruktur lumbung pangan belum memadai
		Peningkatan Kapasitas kelompok Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) belum memadai
	Belum optimalnya penanganan kerawanan pangan	Masih adanya desa rawan pangan
		Kurangnya sosialisasi tentang konsumsi makanan B2SA (Berimbang, Bergizi, Sehat dan Aman)
	Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat	Belum optimalnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan segar.
		Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pangan segar yang aman
		Kurangnya pengujian pangan segar yang beredar di masyarakat

d. Pertanian

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pertanian di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.21
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum selesainya proses penataan dan sertifikasi tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum	Belum selesainya proses penataan dan sertifikasi tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum	Belum tercapai kesepakatan dalam proses penataan tanah dan belum lengkapnya dokumen sertifikasi tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum

e. Lingkungan Hidup

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.22
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup	Belum optimalnya penanganan pencemaran air dan udara	Adanya pencemaran lingkungan karena dampak kegiatan industri dan domestik
		Adanya pencemaran lingkungan karena dampak kegiatan industri dan domestik dan transportasi
	Belum optimalnya pengelolaan persampahan	Belum optimalnya pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah/reduce, daur ulang/recycled dari sumber sampah Overkapasitas TPA
		Belum optimalnya penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah)

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.23
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Belum semua penduduk di Kabupaten Kudus memiliki dokumen administrasi kependudukan yang lengkap	Kurangnya akses (jarak, informasi) masyarakat terhadap pengurusan dokumen administrasi kependudukan
		Belum optimalnya pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan
		Belum optimalnya pelaporan peristiwa kependudukan
	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	Belum optimalnya pemutakhiran dan sinkronisasi data kependudukan
Masih kurangnya Perangkat Daerah yang menggunakan hak akses data kependudukan		

g. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.24
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya tatakelola pemerintahan desa	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas aparatur pemerintahan desa	Kurangnya kualitas SDM penyelenggara pemerintahan desa
		Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa
		belum tertatanya aset desa
	belum optimalnya sarana prasarana desa	pembangunan infrastruktur belum sesuai kondisi geografis di masing masing desa
	kurang optimalnya pemanfaatan potensi desa	pembangunan di desa masih bersifat parsial
	Kurangnya peran kelembagaan masyarakat terhadap pembangunan desa	kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kelembagaan desa

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.25
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya pengendalian kuantitas penduduk dan pemahaman kesehatan reproduksi	Belum Optimalnya Pelaksanaan KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Belum adanya dokumen Kependudukan
		Belum optimalnya pengendalian usia perkawinan dibawah umur
		Belum optimalnya Fasilitas PUS yang ingin ber-KB
		Masih rendahnya penggunaan Metode Kotrasepsi Jangka Panjang
	Belum optimalnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Belum optimalnya Ketahanan keluarga

i. Perhubungan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Perhubungan di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.26
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Kenyamanan dan Keselamatan Transportasi	Belum optimalnya fasilitas sarana prasarana transportasi	Prasarana keselamatan lalu lintas yang belum memenuhi standar keselamatan
		Belum optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas
		Belum optimalnya penataan parkir
		Belum optimalnya kualitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala

j. Komunikasi dan Informatika

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.27
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja pemerintahan	Koordinasi antar perangkat daerah dan stakeholder belum optimal
		Belum sinkronnya arsitektur SPBE daerah dengan arsitektur SPBE Nasional
		Belum optimalnya pengelolaan TIK pendukung SPBE
		Belum terintegrasinya aplikasi informatika dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik
Keterbukaan Informasi Publik belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Belum efektifnya penerapan standar kerja baku pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi masyarakat
		Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya komunikasi publik
		Belum optimalnya penyebarluasan informasi dan komunikasi publik.

k. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.28
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kontribusi sektor koperasi dan UKM belum optimal	Kualitas koperasi belum optimal	Rendahnya Kapasistas Pengelola Koperasi
	Rendahnya omzet usaha mikro	Kapasitas produksi usaha mikro masih kurang
		Rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha mikro

1. Penanaman Modal

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Penanaman Modal di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.29
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kurangnya daya tarik investasi	Belum optimalnya pelayanan perizinan berusaha	Belum optimalnya Penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai dengan standar pelayanan
		Belum optimalnya pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan
	Belum optimalnya Realisasi Penanaman Modal	Belum optimalnya pelaksanaan kemudahan investasi
		Ketersediaan informasi peluang potensi investasi yang belum optimal
		Belum optimalnya promosi investasi
		Belum optimalnya pengawasan dan pendampingan pelaksanaan penanaman modal

m. Kepemudaan dan Olahraga

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.30
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya daya saing pemuda dan olahraga	Masih rendahnya partisipasi pemuda	Masih rendahnya pembinaan pemuda
	Masih rendahnya prestasi olahraga	Masih rendahnya pembinaan dalam bidang olahraga

n. Statistik

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Statistik di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.31
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Statistik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan berbasis teknologi informasi	Belum optimalnya penyelenggaraan atu data Indonesia	Belum optimalnya kualitas ketersediaan Data Statistik Sektoral

o. Persandian

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Persandian di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.32
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Persandian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan berbasis teknologi informasi	Tingginya risiko keamanan informasi pemerintah daerah	Kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah belum optimal
		Belum adanya sistem kerja/ kerangka kerja keamanan informasi terstandar

p. Kebudayaan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Kebudayaan di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.33
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pelestarian kebudayaan daerah	Belum Optimalnya pelestarian obyek pemajuan	Belum Optimalnya Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah
		Belum Optimalnya Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah
		Belum Optimalnya Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah
		Belum Optimalnya Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah
	Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya	Belum Optimalnya Pengelolaan Cagar Budaya Daerah
		Belum optimalnya Pelindungan Cagar Budaya
		Belum Optimalnya Pengembangan Cagar Budaya

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum Optimalnya Pengelolaan Permuseuman	Belum Optimalnya Pengelolaan Koleksi
		Belum optimalnya pemanfaatan dan Kerjasama museum
		Belum Optimalnya Pengamanan Museum

q. Perpustakaan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Perpustakaan di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.34

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas pelayanan perpustakaan	Belum optimalnya mutu pengelolaan perpustakaan	Masih rendahnya jumlah perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan
		Rendahnya pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
	Belum optimalnya akses layanan perpustakaan	Belum optimalnya upaya pembudayaan gemar membaca
		Terbatasnya SDM pengelola perpustakaan yang berkualitas

r. Kearsipan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Kearsipan di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.35

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas pengelolaan Arsip	Belum optimalnya mutu pengelolaan arsip	Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku
	Belum optimalnya akses layanan arsip	Belum optimalnya pemanfaatan arsip

C. Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.36
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Produksi hasil perikanan belum optimal	Produksi perikanan belum optimal	Sarana perikanan budidaya dan tangkap belum memadai

b. Pariwisata

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pariwisata di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.37
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pertumbuhan sektor pariwisata	Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata	Belum optimalnya pemasaran pariwisata
		Belum optimalnya pembangunan industri pariwisata
		Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif

c. Pertanian

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pertanian di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.38
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Produksi pertanian belum optimal	Produksi pertanian belum optimal	Sarana prasarana dan infrastruktur pertanian belum memadai
		Adanya serangan hama/ penyakit tanaman
		Kapasitas SDM dan kelembagaan petani belum memadai

d. Kehutanan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Kehutanan di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.39
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kehutanan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup	Berkurangnya tutupan lahan hijau	Kurangnya Kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup
		alih fungsi lahan hijau
		Adanya eksploitasi alam yang merusak lingkungan

e. Perdagangan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Perdagangan di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.40
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan	Volume perdagangan bersih belum optimal	Belum optimalnya sarana distribusi perdagangan
		Rendahnya pertumbuhan ekspor
		Rendahnya kapasitas pelaku perdagangan

f. Perindustrian

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Perindustrian di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.41
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kontribusi sektor industri tanpa IHT	Pertumbuhan industri pengolahan tanpa IHT belum optimal	Pertumbuhan industri kecil menengah belum optimal

g. Transmigrasi

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Transmigrasi di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.42
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Transmigrasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Kurangnya Pemahaman warga Masyarakat tentang Program pembangunan transmigrasi	Kurangnya informasi program pembangunan Transmigrasi

D. Penunjang Urusan

a. Sekretariat Daerah

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Sekretariat Daerah di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.43
Permasalahan Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan kinerja pembangunan daerah	Belum optimalnya kualitas kebijakan pemerintah daerah	Masih terbatasnya kapasitas SDM perumus kebijakan daerah
	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah
		Belum optimalnya pengendalian internal pemerintah
	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Masih kurangnya pelayanan yang inklusif dan partisipatif
		Belum efektifnya pelaksanaan standar pelayanan

b. Sekretariat DPRD

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Sekretariat DPRD di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.44
Permasalahan Pembangunan Daerah Sekretariat DPRD

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kapasitas Lembaga DPRD dalam pelaksanaan tugas	Belum optimalnya kapasitas Anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas	Belum optimalnya fungsi legislasi yang menjadi mandat DPRD
		Belum optimalnya fungsi penganggaran yang menjadi mandat DPRD
		Belum optimalnya fungsi pengawasan penyeleng pemerintahan yang menjadi mandat DPRD

c. Perencanaan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Perencanaan di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.45
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan	Belum optimalnya konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah terhadap dokumen perencanaan Pemda
		Belum optimalnya ketersediaan data informasi yang valid. Baru 60% data tersedia.
		Belum optimalnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan
		Belum optimalnya sinkronisasi dalam penyusunan dokumen perencanaan
		Belum optimalnya integrasi antar urusan dalam penyusunan dokumen perencanaan
		Belum optimalnya kinerja sumberdaya yang dimiliki dalam penyusunan dokumen perencanaan
	Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	Belum seluruh indikator kinerja dalam dokumen perencanaan tingkat Perangkat Daerah selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pemerintah daerah

d. Keuangan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Keuangan di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.46
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Keuangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Pendapatan asli daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerah	Belum optimalnya penggalan potensi pendapatan daerah utamanya pada pengelola pendapatan
		Belum optimalnya kualitas data base pajak daerah/ retribusi daerah
		Belum optimalnya pelaksanaan kinerja sesuai SOP yang telah ditetapkan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja penggalan pendapatan daerah
		Belum efektifnya penarikan pajak pada semua obyek pajak
	Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Belum optimalnya penentuan prioritas penganggaran
		Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan
		Belum optimalnya transparansi pengelolaan keuangan
		Belum tersedianya data base pemanfaatan aset daerah
Belum optimalnya pendayagunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah		

e. Kepegawaian

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Kepegawaian di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.47
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kepegawaian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas Manajemen Aparatur pada Pemerintah Kabupaten Kudus	Belum optimalnya pelaksanaan sistem merit manajemen ASN	Belum adanya kebijakan perencanaan kebutuhan ASN di tingkat Pemda yang valid dan konsisten.
		Belum adanya kebijakan pengembangan Karir ASN di tingkat Pemda
		Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian di tingkat Pemda dengan K/L

f. Pendidikan dan Pelatihan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.48
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas Manajemen Aparatur pada Pemerintah Kabupaten Kudus	Belum optimalnya peningkatan kapasitas ASN.	Belum adanya perencanaan kebutuhan peningkatan kapasitas setiap ASN di tingkat Pemda

- g. Penelitian dan Pengembangan
Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.49
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya perumusan kebijakan berbasis kelitbangan	Baru 20% tema prioritas kelitbangan yang disusun.	Belum optimalnya sinkronisasi hasil kelitbangan dengan program daerah
		Belum optimalnya kontribusi stakeholders dalam penelitian dan pengembangan daerah

- h. Inspektorat
Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Inspektorat di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.50
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pengawasan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kapabilitas APIP	Belum optimalnya cakupan layanan pengawasan	Beban tugas APIP melebihi kapasitas
	Kompetensi SDM APIP belum memenuhi standar	Kurangnya peningkatan kapasitas SDM APIP
	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Manajemen kinerja belum terimplementasikan secara memadai
	Praktik pengawasan belum memenuhi standar	Lemahnya pengendalian internal
	Belum optimalnya pembinaan manajemen Pemda terhadap APIP	Kurang efektifnya koordinasi dan komunikasi antara manajemen Pemerintah Daerah dengan APIP
Kurang efektifnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kurang optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan unit kerja di lingkungan Pemda	Kurang optimalnya pengawasan internal
	Kurang optimalnya penanganan pengaduan masyarakat	Belum efektifnya koordinasi penanganan pengaduan masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Kurang efektifnya fungsi konsultansi dan pencegahan korupsi	Kurangnya internalisasi nilai-nilai anti korupsi
		Belum optimalnya budaya sadar risiko

i. Unsur Kewilayahan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam unsur Kewilayahan di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.51
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Kewilayahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kuranginya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Pengelolaan Administrasi Data Kinerja belum Optimal	Belum optimalnya pengelolaan perencanaan, evaluasi pelaporan dan keuangan Kecamatan
		Belum optimalnya pemenuhan administrasi umum perkantoran
		Belum optimalnya sarana prasarana penunjang perkantoran
Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Desa	Kualitas penyusunan dokumen perencanaan Desa belum sesuai standar
		Belum optimalnya kapasitas aparatur Pemerintahan Desa
		Kualitas penyusunan dokumen keuangan Desa belum sesuai standar
		Belum optimalnya keterwakilan unsur masyarakat dalam musrenbang
		Kurangnya sinergitas kerjasama antar Desa
Belum Optimalnya kualitas pembangunan di Wilayah	Belum Optimalnya pemberdayaan masyarakat desa	Belum Optimalnya dukungan layanan SPM bidang trantibum di wilayah Kecamatan
		Belum Optimalnya penyelesaian masalah-masalah actual di wilayah kecamatan
	Belum Optimalnya kondisivitas wilayah	Belum Optimalnya dukungan layanan SPM bidang trantibum di wilayah Kecamatan
		Belum Optimalnya penyelesaian masalah-masalah actual di wilayah kecamatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan
		Belum Optimalnya dukungan layanan SPM bidang Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan sosial di Kecamatan
		Belum optimalnya pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada Camat

j. Unsur Pemerintahan Umum

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.52
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih lemahnya harmoni sosial	Belum optimalnya kerukunan dan toleransi masyarakat	Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan
		Meningkatnya politisasi identitas, gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA
	Meningkatnya konflik sosial	Meningkatnya konflik antar individu maupun kelompok masyarakat
		Meningkatnya konflik berlatar belakang politik, sosial dan kebudayaan
	Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang politik	Belum optimalnya pemahaman pengurus partai politik dalam penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan partai politik
		Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan, budaya politik dan etika politik
	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Belum optimalnya fungsi tim pengawasan organisasi kemasyarakatan
		Masih tingginya organisasi Kemasyarakatan yang belum memahami tugas dan fungsinya

4. *Aspek Daya Saing*

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Penanda dari variabel-variabel tersebut adalah kemampuan konsumsi masyarakat, ketersediaan infrastruktur wilayah termasuk layanan permukiman layak, penyediaan air minum aman, kemudahan investasi dan kualitas SDM. Hasil analisis selaras dengan permasalahan sebagaimana tertuang dalam aspek pelayanan umum urusan berkaitan dengan bidang ekonomi, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, penanaman modal, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.

ISU STRATEGIS

1. *Belum Optimalnya Kualitas dan Kesejahteraan SDM*

Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan suatu masyarakat, karena untuk dapat hidup dengan layak dan memiliki pendapatan yang layak, masyarakat memerlukan kualitas pendidikan yang baik dan juga melatih keterampilan individu. Pendidikan merupakan aspek dasar dalam kehidupan manusia, seseorang bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga diajarkan untuk berakhlak baik dan berbudi pekerti luhur. Seseorang dengan bekal pendidikan yang berkualitas akan menjadi orang yang berguna, bermanfaat, berilmu, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup atau memperbaiki nasib ke arah yang lebih baik. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia dan menjadi prasyarat dalam melakukan aktivitas lainnya. Permasalahan kesehatan menjadi hal pokok yang harus mendapat perhatian, terlebih dengan terjadinya pandemi global yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu pandemi Covid-19 yang mempengaruhi segenap aspek kehidupan. Hingga saat ini, pandemi Covid-19 belum usai dan ancaman kesehatan di masa mendatang semakin nyata bila tidak dilakukan antisipasi lebih dini. Karena aspek kesehatan ini sangat mempengaruhi terhadap aspek-aspek lainnya. Salah satu aspek yang sangat terpengaruh adalah kesejahteraan masyarakat. Pandemi telah meningkatkan angka kemiskinan di setiap daerah. Meningkatnya angka kemiskinan menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat dan daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk menekan angka kemiskinan terus diupayakan oleh semua pihak agar

masyarakat dapat menjalani kehidupan secara layak. Adapun capaian indikator makro daerah pendukung isu strategis ini adalah: indeks pembangunan manusia (75,89 di Tahun 2022 dan menempati urutan ke 10 dari 35 kabupaten/kota), dan angka kemiskinan 7,41 pada tahun 2022.

2. Transformasi ekonomi yang berdaya saing

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan Pembangunan suatu daerah. Seberapa besar Produk Domestik Bruto Daerah menggambarkan seberapa besar daerah tersebut mampu mengoptimalkan potensinya dalam suatu aktivitas ekonomi yang mempunyai nilai tambah. Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai nilai total PDRB yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan nilai PDRB Kabupaten sekitar. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.53
Perbandingan PDRB Kab Kudus atas dasar harga Berlaku dengan Kabupaten sekitarnya Tahun 2018 -2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Blora	24,631,543.50	25,965,937.47	24,004,210.06	26,928,608.47	30,968,894.31
Kabupaten Rembang	17,690,102.92	18,944,046.78	18,943,648.80	20,071,106.77	22,107,209.24
Kabupaten Pati	39,901,328.44	43,039,953.68	43,288,565.81	45,565,935.33	50,110,967.10
Kabupaten Kudus	104,056,376.22	110,580,428.47	109,538,558.60	108,726,467.84	114,664,501.49
Kabupaten Jepara	27,996,907.49	30,230,196.61	30,175,170.54	32,045,698.36	35,001,075.36

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2023

Tingkat PDRB Per Kapita Kabupaten Kudus sampai dengan tahun 2022 masih menempati posisi paling tinggi dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya, dengan tingkat PDRB perkapita 114,664 Trilyun rupiah. Kabupaten dengan tingkat PDRB per kapita yang paling mendekati tingkat PDRB per kapita Kabupaten Kudus ditempati oleh Kabupaten Pati dengan nilai 50,11 Trilyun rupiah, dimana nilai PDRB perkapita Kabupaten Kudus masih berada lebih dari 2 kali lipat dari PDRB Kabupaten Pati. Sedangkan posisi PDRB perkapita paling rendah disekitar Kabupaten Kudus ditempati oleh Kabupaten Rembang dengan nilai kurang dari seperempat dari nilai PDRB per kapita Kabupaten Kudus. Hal tersebut menunjukkan bahwa rentang kesejahteraan penduduk pada antara Kabupaten Kudus dilihat dari tingkat PDRB

perkapita masih jauh lebih tinggi dibanding dengan Kabupaten sekitarnya.

Selain dilihat dari segi jumlah PDRB, perkembangan ekonomi juga dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus. Trend pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus dapat dilihat dari grafik berikut.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus dan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2017-2022



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2023

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah memang terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Dimana tingkat pertumbuhan Kabupaten Kudus pada tahun 2022 sebesar 2,23 persen terpaut sekitar 3,08 persen dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang tumbuh sebesar 5,31 persen pada tahun 2022. Namun demikian, jika dilihat dari kontribusi PDRB sesuai wilayah Kabupaten, maka dapat dikatakan bahwa kontribusi PDRB Kabupaten Kudus terhadap PDRB Jawa Tengah pada tahun 2022 menduduki nomor 3 terbesar dengan nilai kontribusi sebesar 7,34 persen. Hal ini memberikan arti bahwa, Kabupaten Kudus menjadi salah satu penyangga utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah yang perlu di perhitungkan.

3. Birokrasi yang dinamis dan berintegritas

Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kudus yang lebih biasa diistilahkan dengan tatakelola pemerintahan di Kabupaten Kudus belum sepenuhnya berjalan sedemikian optimal. Hal ini dapat dilihat dari data 3 tahun terakhir terhadap evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, pencapaian Pemerintah Kabupaten Kudus berada pada

kategori B. Meskipun ada peningkatan nilai dan kategori, namun perkembangannya sangat lambat sebagaimana tertuang dalam Bab II dalam dokumen ini. Tatakelola Pemerintahan Kabupaten Kudus perlu ditingkatkan mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Keberhasilan pembangunan daerah pada tingkat teknis sangat bergantung pada kinerja birokrasinya. Maka perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik yang dicerminkan dengan birokrasi yang dinamis dan berintegritas perlu ditingkatkan. Selain itu dukungan teknologi informasi dalam pelayanan publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menciptakan birokrasi yang dinamis dan berintegritas.

4. *Belum optimalnya pembangunan secara berkelanjutan di wilayah*

Pembangunan secara berkelanjutan di wilayah perlu melibatkan seluruh potensi yang ada secara optimal dan mengupayakan keserasian serta keseimbangan pembangunan antar kecamatan, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Kualitas pelayanan yang ada di kecamatan masih belum optimal, hal ini mengakibatkan kurangnya kualitas pembangunan yang ada di desa. Di Kabupaten Kudus risiko bencana yang dihadapi masih cukup tinggi di beberapa daerah memiliki langganan bencana banjir dan tanah longsor. Hal ini disebabkan oleh pelayanan informasi rawan bencana pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana belum optimal, belum optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta pelayanan pasca bencana belum optimal. Responsivitas penanganan gangguan trantibum juga masih rendah, sehingga penanganan gangguan trantibum yang berbasis kewilayahan perlu ditingkatkan. Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup diperlukan pencegahan atas pencemaran lingkungan karena dampak kegiatan Industri dan domestik, peningkatan kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup, pencegahan alih fungsi lahan hijau, serta pencegahan eksploitasi alam yang merusak lingkungan. Pembangunan secara berkelanjutan di wilayah harus didukung dengan penguatan toleransi dan harmoni sosial dalam masyarakat, agar seluruh pembangunan dapat tercapai. Untuk menjaga kekondusifan wilayah terkait pelaksanaan Pilpres, Pileg

dan Pilkada Serentak pada tahun 2024, memberikan perhatian khusus pada berbagai lingkup aspek. Kompleksitas tantangan menuntut kematangan persiapan, termasuk membangun kerja sama peran yang optimal pada seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu. Perhatian khusus saat ini ditujukan pada polarisasi di masyarakat terkait dukungan politik dan peningkatan penggunaan media sosial sehingga diperlukan mitigasi khusus oleh penyelenggara pemilu untuk mengurangi dampak dan kerawanan atas dinamika politik, sehingga kekondusifan wilayah tetap terjaga.

b. Visi, Misi Bupati

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan di masa transisi yang akan digunakan oleh Pj Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024-2026. Penyusunan RPD berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022. Sedangkan secara substansi, RPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perbedaan signifikan antara RPD dengan RPJMD, yakni tidak digunakannya visi dan misi kepala daerah sebagai acuan dalam penyusunan RPD, karena Pj Kepala Daerah tidak menyusun visi dan misi. RPD dengan demikian mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah;

Berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Kabupaten Kudus telah menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026. Program-program daerah terinci sebagai berikut:

1. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- 1) Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Pengelolaan Pendidikan.
 - c) Program Pengembangan Kurikulum.
 - d) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- 2) Kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmonohadi
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - d) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
 - e) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
 - c) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
 - d) Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional.
 - e) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - f) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
 - g) Program Penataan Bangunan Gedung.
 - h) Program Penyelenggaraan Jalan.
 - i) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Pengembangan Perumahan
 - c) Program Kawasan Permukiman.
 - d) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
- 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan.
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - c) Program Penanggulangan Bencana.

- d) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.
- 6) Sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Pemberdayaan Sosial.
 - c) Program Rehabilitasi Sosial.
 - d) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - e) Program Penanganan Bencana.
 - f) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
2. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- 1) Tenaga kerja, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - c) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - d) Program Penempatan Tenaga Kerja.
 - e) Program Hubungan Industrial.
 - 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - a) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
 - b) Program Perlindungan Perempuan.
 - c) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
 - d) Program Perlindungan Khusus Anak.
 - 3) Pangan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan
 - a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.
 - b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
 - c) Program Penanganan Kerawanan Pangan.
 - d) Program Pengawasan Keamanan Pangan.
 - 4) Pertanahan, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a) Program Penatagunaan Tanah.

- b) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
- 5) Lingkungan Hidup, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
 - a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
 - b) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
 - c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
 - d) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
 - e) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
 - f) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
 - g) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
 - h) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
 - i) Program Pengelolaan Persampahan.
 - 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
 - c) Program pelayanan pencatatan sipil.
 - d) Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
 - 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan dan Kelurahan
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Penataan Desa.
 - c) Program Peningkatan Kerja Sama Desa.
 - d) Program Administrasi Pemerintahan Desa.
 - e) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.
 - 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan

- Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a) Program Pengendalian Penduduk.
 - b) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).
 - c) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- 9) Perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
- 10) Komunikasi dan Informatika, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Sekretariat DPRD
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Informasi dan Komunikasi Publik.
 - c) Program Aplikasi Informatika.
- 11) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Kecamatan
- a) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.
 - b) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.
 - c) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
 - d) Program Pengembangan UMKM.
- 12) Penanaman Modal, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
 - c) Program Promosi Penanaman Modal.
 - d) Program Pelayanan Penanaman Modal.
 - e) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - f) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi.
- 13) Kepemudaan dan Olah Raga, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
 - b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
 - c) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

- 14) Statistik, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- 15) Persandian, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
- 16) Kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Pengembangan Kebudayaan.
 - c) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
 - d) Program Pengelolaan Permuseuman.
- 17) Perpustakaan, dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
Program Program Pembinaan Perpustakaan.
- 18) Kearsipan, dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Pengelolaan Arsip.
 - c) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

3. Urusan Pilihan

- 1) Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan
 - a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
 - b) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
 - c) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- 2) Pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - a) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
 - b) Program Pemasaran Pariwisata.
 - c) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.
- 3) Pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan
 - a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.

- b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
 - c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
 - e) Program Penyuluhan Pertanian.
- 4) Kehutanan, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 5) Perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
 - c) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
 - d) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.
 - e) Program Pengembangan Ekspor.
 - f) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen.
 - g) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
- 6) Perindustrian, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
 - b) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota.
 - c) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.
- 7) Transmigrasi, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
- 1) Perencanaan, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
 - c) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

- d) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 - 2) Keuangan, dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - c) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - d) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
 - 3) Kepegawaian, dilaksanakan oleh BKPSDM.
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Kepegawaian Daerah.
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan, dilaksanakan oleh BKPSDM. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 5) Penelitian dan Pengembangan, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
 - 6) Sekretariat Daerah, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - c. Program Perekonomian dan Pembangunan.
5. Unsur Pengawasan
- 1) Inspektorat, dilaksanakan oleh Inspektorat.
 - a) Program Penyelenggaraan Pengawasan.
 - b) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.
6. Unsur Kewilayahan
- 1) Kecamatan, dilaksanakan oleh Kecamatan dan Kelurahan.
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
 - c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
 - d) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

- e) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
- f) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

7. Unsur Pemerintahan Umum

- 1) Kesatuan Bangsa dan Politik, dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol.
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.
 - c) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
 - d) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
 - e) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
 - f) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan;

➤ Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- 1) Pendidikan
 - a) Program Pengelolaan Pendidikan, dilaksanakan:
 - 1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - 3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
 - b) Program Pengembangan Kurikulum,
 - 1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
 - 2. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
 - c) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 1. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan

- 2) Kesehatan
- a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat :
 - 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/ Kota
 - 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/ Kota
 - 3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
 - 4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan :
 - 1. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/ Kota
 - c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman :
 - 1. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Di Produksi oleh Industri Rumah Tangga
 - 2. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
 - 3. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Setra Makanan Jajanan
 - 4. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
 - d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan:
 - 1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/ Kota
 - 2. Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/ Kota

3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/ Kota
 - e) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA):
 1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum:
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/ Kota
 - d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - e) Program Penataan Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - f) Program Penyelenggaraan Jalan
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - g) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - h) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
 - d) Program pengembangan perumahan
 1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 2. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 3. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - c) Program Kawasan Permukiman
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - d) Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
- 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
 - a) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
 - b) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
 - c) Program Penanggulangan Bencana
 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- 6) Sosial
 - a) Program Pemberdayaan Sosial
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Program Rehabilitasi Sosial
 - 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial
 - 2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza Di Luar Panti Sosial
 - c) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - d) Program Penanganan Bencana
 - 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - 2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - e) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - 1) Tenaga kerja
 - a) Program Perencanaan Tenaga Kerja
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
 - b) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
 - 2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - c) Program Penempatan Tenaga Kerja
 - 1. Pelayanan Antar kerja di Daerah Kab/ Kota
 - 2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - 3. Pelindungan PMI (PRA dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
 - d) Program Hubungan Industrial
 - 1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota

- 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/ Kota
 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b) Program Perlindungan Perempuan
 1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota
 2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota
 - c) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - d) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - e) Program Perlindungan Khusus Anak
 1. Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota
- 3) Pangan
 - a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kab/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi
- c) Program Penanganan Kerawanan Pangan
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
- d) Program Pengawasan Keamanan Pangan
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Pertanian
 - a) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Program Penatagunaan Tanah
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Lingkungan Hidup
 - a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/ Kota
 2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - b) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/ Kota
 - d) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - e) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- f) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/ Kota
 - g) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/ Kota
 - h) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - i) Program Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Sampah
- 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a) Program Pendaftaran Penduduk
Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - b) Program Pencatatan Sipil
Pelayanan Pencatatan Sipil
 - c) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a) Program Penataan Desa
Penyelenggaraan Penataan Desa
 - b) Program Peningkatan Kerjasama Desa
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
 - c) Program Administrasi Pemerintahan Desa
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - d) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a) Program Pengendalian Penduduk
 - 1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah

- Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/ Kota
- b) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota
 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - c) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 9) Perhubungan.
- a) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota
 7. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota
- 10) Komunikasi dan Informatika
- a) Program Informasi dan Komunikasi Publik

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Program Aplikasi Informatika
 1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

11) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- a) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota
- c) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
- d) Program Pengembangan UMKM
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

12) Penanaman Modal

- a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/ Kota
- b) Program Promosi Penanaman Modal
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/ Kota
- c) Program Pelayanan Penanaman Modal
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- d) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/ Kota
- e) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kab/Kota

13) Kepemudaan dan Olah Raga

- a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kab/Kota
 2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/ Kota
 - b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota
 2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota
 3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
 4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
 5. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
 - c) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
- 14) Statistik
- a) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota
- 15) Persandian
- a) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- 16) Kebudayaan
- a) Program Pengembangan Kebudayaan
 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
 1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kab/ Kota
 2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kab/ Kota
 - c) Program Pengelolaan Permuseuman
 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
- 17) Perpustakaan
- a) Program Pembinaan Perpustakaan
 1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 18) Kearsipan
- a) Program Pengelolaan Arsip
 1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota
 2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota
 3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
 - b) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
 1. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
 2. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
 3. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
 4. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
- Urusan Pilihan
- 1) Kelautan dan Perikanan
 - a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - c) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - 2) Pariwisata
 - d) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota
 3. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

- e) Program Pemasaran Pariwisata
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - f) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
- 3) Pertanian
- a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - 1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - 2. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Pengembangan Prasarana Pertanian
 - b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Pembangunan Prasarana Pertanian
 - c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kab/Kota
 - 2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kab/Kota
 - 3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kab/Kota
 - e) Program Penyuluhan Pertanian
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
- 4) Kehutanan
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kab/Kota
- 5) Perdagangan
- a) Rogram Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
 - 1. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
 - 2. Penerbitan Tanda Daftar Gudang
 - b) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 2. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
- c) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
1. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kab/Kota
- d) Program Pengembangan Ekspor
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- e) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
- f) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- 6) Perindustrian
- a) Program Perencanaan dan Pembagunan Industri
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - b) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan
 - c) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
- fungsi penunjang urusan pemerintahan
- 1) Sekretariat Daerah
 - a) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 1. Administrasi Tata Pemerintahan
 2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
4. Fasilitasi Kerjasama Daerah
- b) Program Perekonomian dan Pembangunan
 1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
- 2) Sekretariat DPRD
 - a) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 4. Peningkatan Kapasitas DPRD
 5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 7. Fasilitasi Tugas DPRD
- 3) Perencanaan
 - a) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 3. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- 4) Keuangan
 - a) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- b) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah
- c) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 5) Kepegawaian
 - a) Program Kepegawaian Daerah
 - 1. Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN
 - 2. Mutasi dan Promosi ASN
 - 3. Pengembangan Kompetensi ASN
 - 4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- 6) Pendidikan dan Pelatihan
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 1. Pengembangan Kompetensi Teknis
 - 2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
- 7) Penelitian dan Pengembangan
 - a) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - 3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- 8) Pengawasan
 - a) Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - b) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
Pendampingan dan Asistensi
- 9) Kewilayahan (Kecamatan)
 - a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - 2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - b) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- c) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - d) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 10) Pemerintahan Umum (kesbangpol)
- a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - b) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik
 - c) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - d) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - e) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

11) Pemerintahan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Peningkatan Pelayanan BLUD
10. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
11. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
12. Penataan Organisasi
13. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
14. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
15. Layanan Administrasi DPRD

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Standar Pelayanan Minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan hak atas pelayanan dasar sesuai dengan jenis dan mutu layanan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Regulasi tersebut juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam menggali potensi daerah guna peningkatan kualitas pelayanan publik salah satunya adalah pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Bentuk pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh Pemerintah selanjutnya diberikan batasan-batasan minimal khusus melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Regulasi tersebut juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib, yang terdiri atas urusan yang berkaitan

dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan yang substansinya merupakan pelayanan dasar minimal yang harus diberikan oleh Pemerintah kepada warga masyarakat. Urusan dimaksud meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial.

Pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan SPM sangatlah penting untuk diterapkan oleh Pemerintah Daerah sehingga memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak-hak dasar yang diperlukan oleh seluruh masyarakat. Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar sesuai SPM serta menyediakan alokasi anggaran yang mencukupi untuk penerapannya.

Guna percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kudus memacu pelaksanaannya dengan menyusun Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kudus, disamping membentuk Tim Penerapan melalui Keputusan Bupati Kudus Nomor 130/40/2022 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kudus. Dengan dibentuknya Tim dimaksudkan untuk memudahkan Perangkat Daerah dalam berkoordinasi dan konsolidasi internal guna penyelenggaraan pelayanan dasar yang lebih baik dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan pemenuhan SPM di Kabupaten Kudus dapat dilaksanakan secara optimal dan terkoordinir berdasarkan data, statistik dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Dasar penerapan standar pelayanan minimal

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dan landasan dalam penyelenggaraan penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintahan Kabupaten Kudus, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kudus;
9. Keputusan Bupati Kudus Nomor 130/40/2022 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kudus.

c. Kebijakan umum

Standar Pelayanan Minimal memiliki tujuan yang sangat ideal dalam rangka memenuhi hak-hak warga negara atas pelayanan dasar pada urusan wajib pemerintah daerah. Namun demikian penyediaan pelayanan dasar dengan memperhatikan standar pelayanan mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kudus sudah tertuang dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026. Hal ini membuktikan Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki komitmen yang serius agar setiap warga dapat memperoleh jaminan kualitas dari hasil-hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam penerapan dan pencapaian pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Kudus mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pelayanan dasar sebagai berikut :

- pemenuhan layanan dasar masyarakat pada bidang Pendidikan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 164.448.628.927,- dengan serapan realisasi mencapai 96.47%.

- pemenuhan layanan dasar masyarakat pada bidang kesehatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.849.660.400,- dengan serapan realisasi mencapai 91,46%.
- pemenuhan layanan dasar masyarakat pada bidang Pekerjaan Umum dialokasikan anggaran sebesar Rp.7,122,479,000,- dengan serapan realisasi mencapai 97.64%.
- pemenuhan layanan dasar masyarakat pada bidang Perumahan Rakyat dialokasikan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- dengan serapan realisasi mencapai 83,07%.
- pemenuhan layanan dasar masyarakat pada bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dialokasikan anggaran sebesar Rp.12,192,514,435,- dengan serapan realisasi mencapai 94,14%.
- pemenuhan layanan dasar masyarakat pada bidang Pendidikan dialokasikan anggaran sebesar Rp.564.174.800,- dengan serapan realisasi mencapai 83.76 %.

d. Arah Kebijakan Penerapan SPM

Pemerintah Kabupaten Kudus telah menuangkan rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar kedalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan beberapa penyesuaian pada nomenklatur program dan kegiatan.

Langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan untuk menegaskan komitmen untuk segera melaksanakan penerapan dan pencapaian SPM antara lain sebagai berikut :

- Mendorong Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tupoksi terkait dengan urusan wajib dan pilihan untuk segera melakukan penyusunan rencana penerapan dan pencapaian SPM dengan target tahunan yang disesuaikan dengan ketentuan tenggang tahun pencapaiannya ;
- Melakukan pengintegrasian Rencana Penerapan dan Pencapaian SPM pada masing-masing bidang ke dalam dokumen perencanaan dan kegiatan dengan melibatkan TAPD
- Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada urusan wajib yang menjadi prioritas disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kudus.

Sedangkan rencana arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Kudus sesuai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 diprioritaskan sebagaimana tabel berikut:

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)	SDM yang unggul dan berbudaya	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan 2. Peningkatan Partisipasi Pendidikan Formal dan Non Formal 3. Peningkatan Literasi Masyarakat 4. Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan 2. Perpustakaan 3. Kepemudaan dan Olah Raga
		Peningkatan Aktualisasi Pemajuan Kebudayaan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi Museum dan Cagar Budaya Daerah 2. Pelestarian nilai dan warisan budaya 	Kebudayaan
		Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan kualitas kesehatan ibu 2 Peningkatan kualitas kesehatan bayi 3 Peningkatan penanganan gizi buruk dan Stunting 4 Peningkatan pelayanan kesehatan pada penderita penyakit menular dan tidak menular 5 Peningkatan pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi TTU, TPM, TPS, dan Institusi 6 Peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat 7 Peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan 	Kesehatan
		Peningkatan Ketahanan Pangan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemanfaatan pangan 2. Meningkatkan Pengawasan Keamanan pangan 	Pangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
		Peningkatan pengendalian kuantitas penduduk dan pemahaman kesehatan reproduksi	Peningkatan Pelaksanaan KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya PPKS yang berdaya	Peningkatan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 2. Peningkatan pelayanan pemberdayaan sosial 3. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial (luar panti) 	Sosial
		Peningkatan perlindungan sosial	Peningkatan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, saat dan pasca tanggap darurat	Sosial
		Peningkatan Kesetaraan Gender	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Peningkatan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Peningkatan Pemahaman bahaya kekerasan kepada Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Peningkatan permukiman layak huni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi fasilitasi pemenuhan rumah layak huni. 2. Optimalisasi penanganan dan pencegahan kawasan kumuh 3. Peningkatan akses air minum dan sanitasi 	Perumahan dan Kawasan Permukiman Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Menurunnya Pengangguran	Peningkatan penempatan tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses angkatan kerja pada pasar kerja 2. Peningkatan mutu tenaga kerja 	Tenaga Kerja

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
			3. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam hubungan industrial	
Transformasi ekonomi yang berdaya saing	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor tanpa IHT	1. Peningkatan produksi pertanian dan perikanan	1. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian 2. Menurunkan serangan hama/penyakit pertanian 3. Meningkatkan Kapasitas SDM dan kelembagaan petani 4. Meningkatkan sarana dan prasarana Produksi Perikanan	Pertanian Kelautan dan Perikanan
		2. Peningkatan Kunjungan Wisatawan	1. Meningkatkan Pemasaran Pariwisata Daerah 2. Membangun Industri Pariwisata 3. Mengembangkan Ekonomi Kreatif	Pariwisata
		3. Peningkatan Volume Perdagangan	1. Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekspor produk lokal Kudus 3. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan	Perdagangan
		4. Peningkatan Pertumbuhan Industri Pengolahan tanpa IHT	Meningkatkan Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Perindustrian
		5. Peningkatan Omzet Usaha Mikro	Meningkatkan Kapasitas Produksi Usaha Mikro	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		6. Peningkatan Kualitas Koperasi	Meningkatkan Kapasitas Pengelola Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Terciptanya iklim investasi	1. Peningkatan daya tarik investasi	1. Meningkatkan pelayanan perijinan berusaha	Penanaman Modal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
	yang kondusif		2. Meningkatkan dukungan kemudahan investasi 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi penanaman modal 4. Meningkatkan pelaporan realisasi penanaman modal	
		2. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pendukung perekonomian	1. Meningkatkan kualitas fasilitas dan prasarana transportasi 2. Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur pekerjaan umum 3. Meningkatkan kualitas jaringan irigasi 4. Meningkatkan kualitas jaringan drainase	Perhubungan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		3. Peningkatan Penyelenggaraan Tata Ruang	Mengoptimalkan Perencanaan tata Ruang	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Terwujudnya Tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan	Meningkatkan kapabilitas pemerintah	Meningkatkan kualitas perencanaan daerah	Perencanaan dan Semua Perangkat Daerah
			Meningkatkan kinerja daerah	Sekretariat Daerah dan Semua PD
			Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja Daerah	Pengawasan, Sekretariat Daerah dan Semua Perangkat Daerah
			Penguatan sistem merit manajemen ASN	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta semua Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
		Meningkatkan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan sumber pendapatan daerah	Keuangan dan Perangkat Daerah berpendapatan
			Membangun transparansi anggaran antar para pengambil kebijakan daerah	Setda, Keuangan, Sekretariat DPRD dan semua Perangkat Daerah
			Meningkatkan efektifitas penganggaran	Keuangan dan semua Perangkat Daerah
			Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Keuangan dan semua Perangkat Daerah
		Transformasi Pelayanan Publik	Implementasi Inovasi dalam Pelayanan Publik dan Pembangunan Daerah	Setda, Penelitian dan Pengembangan, Semua Perangkat Daerah
			Peningkatan Sistem Pelayanan terintegrasi	Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Semua Perangkat Daerah
Pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat	Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan	1. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas Aparatur Pemerintahan Desa	1. Peningkatan pengawasan, pengelolaan administrasi dan integritas aparatur pemerintahan Desa 2. Optimalisasi pembangunan sarana prasarana desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2. Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal	1. Optimalisasi pembangunan kawasan perdesaan 2. Revitalisasi BUMDES dan optimalisasi peran kelembagaan yang ada di desa	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
		3. Optimalisasi peran kecamatan dalam pembangunan kewilayahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi penerapan standar pelayanan kecamatan 2. Penguatan dukungan capaian SPM di kecamatan 3. Peningkatan fasilitasi perencanaan dan penganggaran desa 4. Optimalisasi pelayanan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan 5. Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 	Kewilayahan
	Meningkatnya kekondusifan wilayah	1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berbasis kewilayahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan perda secara konsisten dan persuasif 2. Peningkatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran 	Ketentraman dan Ketertiban Umm serta Perlindungan Masyarakat
		2. Penguatan kerukunan dan toleransi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan organisasi masyarakat dan organisasi politik dalam pembangunan dan pendidikan politik 2. Peningkatan peran forum-forum antar umat beragama secara formal maupun kultural 	Kesatuan Bangsa dan Politik
		3. Peningkatan ketahanan terhadap bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pelayanan informasi rawan bencana 2. Peningkatan Pelayanan pencegahan & kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Peningkatan pelayanan tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi 	Ketentraman dan Ketertiban Umm serta Perlindungan Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Peningkatan kualitas perencanaan lingkungan hidup berbasis data/bukti 2. Peningkatan pengendalian kualitas lingkungan hidup 3. Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 5. Peningkatan Penegakan Hukum terhadap Usaha yang Berpotensi menimbulkan Kerusakan Lingkungan	Lingkungan Hidup
		2. Peningkatan Pengelolaan Persampahan	Peningkatan pengelolaan sampah berbasis Reduce-Reuse-Recycle (3 R)	
		3. Meningkatkan Infrastruktur Persampahan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Pemrosesan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian indikator makro sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	76,71	77,21	0,652
2	Angka Kemiskinan	7,24	7,23	-0,138
3	Angka Pengangguran	3,25	3,19	-1,846
4	Pertumbuhan Ekonomi	2,19	2,78	26,94
5	Pendapatan Per Kapita	138.700.000	145.600.000	4,974
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,350	0,324	-7,429

Sumber data : BPS Kabupaten Kudus

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari capaian indikator kinerja kunci hasil dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	95,78 %	Disdikpora	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,82 %	Disdikpora	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,78 %	Disdikpora	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yg berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	65,53 %	Disdikpora	
2	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1,65	Dinas Kesehatan	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	100 %	Dinas Kesehatan	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	Dinas Kesehatan	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	Dinas Kesehatan	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,08 %	Dinas Kesehatan	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	95,67 %	Dinas Kesehatan	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,37 %	Dinas Kesehatan	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	99,06 %	Dinas Kesehatan	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	92,76 %	Dinas Kesehatan	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,74 %	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,86 %	Dinas Kesehatan	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 %	Dinas Kesehatan	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 %	Dinas Kesehatan	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 %	Dinas Kesehatan	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	100,00 %	Dinas PUPR	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten	tidak ada wilayah pantai %	Dinas PUPR	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100,00 %	Dinas PUPR	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab	98,59 %	Dinas PUPR	
		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100,00 %	Dinas PUPR	
		Rasio kepatuhan IMB kab/kota	100,00 %	Dinas PMPTSP	
		Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	91,94 %	Dinas PUPR	
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	Dinas PUPR	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	0 %	Dinas PKPLH	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100,00 %	Dinas PKPLH	
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	64,59 %	Dinas PKPLH	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,17 %	Dinas PKPLH	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100,00 %	Dinas PKPLH	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00 %	Satpol PP	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100,00 %	Satpol PP	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	59.174 Org	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	59.174 Org	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	59.174 Org	BPBD	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	96,72 %	Satpol PP	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	10,84 Me nit	Satpol PP	
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100,00 %	Dinsos P3AP2KB	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100,00 %	Dinsos P3AP2KB	
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	95,24 %	Disnaker Perinkop UKM	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	70,15 %	Disnaker Perinkop UKM	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	14.950.906.293,227	Disnaker Perinkop UKM	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	93,15 %	Disnaker Perinkop UKM	
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	75,85 %	Disnaker Perinkop UKM	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	64,63 %	Dinsos P3AP2KB	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	100,00 %	Dinsos P3AP2KB	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	2,74	Dinsos P3AP2KB	
9	Pangan	Persentase cadangan pangan	12,30 %	Dispertan Pangan	
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100 %	Dinas PUPR	
		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum	0 %	Dinas PUPR	
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100,00 %	Dinas PUPR	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0,00 %	Dinas PUPR	
		Tersedianya tanah untuk masyarakat.	0,00 %	Dinas PUPR	
		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 %	Dinas PUPR	
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten	65,97 %	Dinas PKPLH	
		Terlaksananya pengelolaan sampah Regional/Terpadu di wilayah Kabupaten	77,28 %	Dinas PKPLH	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	17,09 %	Dinas PKPLH	
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik	99,98 %	Dinas Dukcapil	
		Persentase anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	80,77 %	Dinas Dukcapil	
		Kepemilikan akta kelahiran	99,97 %	Dinas Dukcapil	
		Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	73,33 %	Dinas Dukcapil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	tdk ada % desa tertinggal	Dinas PMD	
		Persentase peningkatan status desa mandiri	83,33 %	Dinas PMD	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,88	Dinsos P3AP2KB	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	71,19 %	Dinsos P3AP2KB	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	6,12 %	Dinsos P3AP2KB	
15	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten	0,68	Dishub	
		Kinerja lalu lintas kabupaten	0,57	Dishub	
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	Dinas Kominfo	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	80,95 %	Dinas Kominfo	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kab	100 %	Dinas Kominfo	
17	Koperasi dan UKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	72,46 %	Disnaker Perinkop UKM	
		Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	100 %	Disnaker Perinkop UKM	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	-16,15 %	Dinas BMPTSP	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,64 %	Disdikpora	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	75,76 %	Disdikpora	
		Peningkatan prestasi olahraga	29 Medali	Disdikpora	
20	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	Dinas Kominfo	
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %	Dinas Kominfo	
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	54,36	Dinas Kominfo	
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100 %	Disbudpar	
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	80 %	Dinas Arpus	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	75,62 %	Dinas Arpus	
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan	74,83 %	Dinas Arpus	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap	66,66 %	Dinas Arpus	
25	Kelautan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	2.764,44 Ton	Dispertan Pangan	
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-0,54 %	Disbudpar	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	37,36 %	Disbudpar	
		Tingkat Hunian akomodasi	32,70 %	Disbudpar	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,56 %	Disbudpar	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	4,84 %	Disbudpar	
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,53 ton	Dispertan Pangan	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	73,33 %	Dispertan Pangan	
28	Kehutanan		Tidak Perlu Diisi		
29	ESDM	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/Kabupaten	0,00 %		
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	85,49 %	Dinas Perdagangan	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	95,13 %	Dinas Perdagangan	
		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	95,35 %	Dinas Perdagangan	
31	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	0,43 %	Disnaker Perinkop UKM	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	95,21 %	Disnaker Perinkop UKM	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00 %	Disnaker Perinkop UKM	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00 %	Disnaker Perinkop UKM	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	0,00 %	Disnaker Perinkop UKM	Tdk ada kawasan industri
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100	Disnaker Perinkop UKM	
32	Transmigrasi				

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	Persentase Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	10,26 %	BPPKAD	
		Persentase PAD	24,09 %	BPPKAD	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level 3	Inspektorat	3,167
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level 3	Inspektorat	3,00
		Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	16,23 %	BPPKAD	
		Opini Laporan Keuangan	WTP	Inspektorat	
2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0,00 %	Bagian PBJ	
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	80,49 %	Bagian PBJ	
		Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	23,25 %	Bagian PBJ	
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemda	1,90	Bagian PBJ	
3	Fungsi Penunjang Urusan	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	55,94 %	BKPSDM	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Pemerintahan (Kepegawaian)	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19,06 %	BKPSDM	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100,00 %	BKPSDM	
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	7,39 %	BPPKAD	
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	24,68 %	BPPKAD	
		Assets management	4,00	BPPKAD	
			KIB A s/d ya KIB E		
			Permendag ya ri No. 47 Tahun 2021		
			Rekon 1 th ya sekali		
		Rekapitu ya lasi Barang ke Neraca			
Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	7,98 %	BPPKAD			
5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi Dan Partisipasi Publik)	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	107,20 ,%	Dinas Kominfo	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	91,67 %	Dinas Kominfo	

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Kepala Daerah.

Skala penilaian capaian kinerja setiap indikator menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang selanjutnya dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut :

Tabel 2.4
Skala Penilaian Capaian Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber data : Permendagri 86 Tahun 2017

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 2.5
Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,32-76,78 indeks
2.	Indeks Pendidikan	11,53 indeks
3.	Angka Stunting	14 persen
4.	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,6832 indeks
5.	Angka Kemiskinan	6,96 persen
6.	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(yang mandiri	8 persen
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,19 persen
8.	Pendapatan perkapita	139,78 Juta Rp.
9.	Pertumbuhan PDRB Tanpa Industri Hasil Tembakau	5,70-6,19 persen
10.	Realisasi Investasi	1108 Milyar Rp.
11.	Indeks Desa Membangun	0,7700 indeks
12.	Indeks Pembangunan Kecamatan	89,09 Indeks
13.	Persentase Desa Mandiri	22 persen
14.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	101 indeks
15.	Angka Konflik Sosial	0 Angka
16.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,997 Indeks
17.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	70 Indeks
18.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	68 Indeks
19.	Nilai SAKIP	71,3 Nilai
20.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,25 Indeks

Sumber data : diolah oleh Bagian Organisasi

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan target dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 2.6
Capaian Indikator Kinerja Utama dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2024		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,32-76,78 indeks	77,21 indeks	100,56
2.	Indeks Pendidikan	11,53 indeks	11,32 indeks	98,18
3.	Angka Stunting	14 persen	3,77 persen	173,07
4.	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,6832 indeks	0,7569 indeks	110,79
5.	Angka Kemiskinan	6,96 persen	7,23 persen	96,12
6.	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mandiri)	8 persen	3,42 persen	42,75
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,19 persen	3,19 persen	100
8.	Pendapatan perkapita	139,78 Juta Rp.	133,88 Juta Rp.	95,78
9.	Pertumbuhan PDRB Tanpa Industri Hasil Tembakau	5,70-6,19 persen	4,82 persen	84,56
10.	Realisasi Investasi	1108 Milyar Rp.	1423,9 Milyar Rp.	128,51
11.	Indeks Desa Membangun	0,7700 indeks	0,8135 indeks	105,65
12.	Indeks Pembangunan Kecamatan	89,09 Indeks	92,07 Indeks	103,34
13.	Persentase Desa Mandiri	22 persen	51,21 persen	232,77
14.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	101 indeks	79,75 indeks	121,04
15.	Angka Konflik Sosial	0 Angka	0 Angka	100
16.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,997 Indeks	65,97 indeks	117,81
17.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	70 Indeks	83,16 indeks	118,80
18.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	68 Indeks	85,53	125,76
19.	Nilai SAKIP	71,3 Nilai	73,20 Nilai	102,66
20.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,25 Indeks	4,61 Indeks	108,47

Sumber data : diolah oleh Bagian Organisasi

c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan tahun sebelumnya

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Utama dibandingkan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kierja Tahun					
		2023			2024		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,48 indeks	76,71 indeks	100,30	76,32-76,78 indeks	77,21 indeks	100,56
2.	Indeks Pendidikan	11,25 indeks	11,25 indeks	100	11,53 indeks	11,32 indeks	98,18
3.	Angka Stunting	18,6 persen	15,7 persen	118,47	14 persen	3,77 persen	173,07
4.	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,6830 indeks	0,70 indeks	102,50	0,6832 indeks	0,7569 indeks	110,79
5.	Angka Kemiskinan	7,18 persen	7,24 persen	100,84	6,96 persen	7,23 persen	96,12
6.	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(yang mandiri	5 persen	4,05 persen	81	8 persen	3,42 persen	42,75
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,95-3,4 persen	3,25 persen	95,59	3,19 persen	3,19 persen	100
8.	Pendapatan perkapita	136,59 Juta Rp.	138,7 Juta Rp.	101,54	139,78 Juta Rp.	133,88 Juta Rp.	95,78
9.	Pertumbuhan PDRB Tanpa Industri Hasil Tembakau	5,67-5,94 persen	5,87 persen	98,82	5,70-6,19 persen	4,82 persen	84,56
10.	Realisasi Investasi	1103 Milyar Rp.	1108 Milyar Rp	100,45	1108 Milyar Rp.	1423,9 Milyar Rp.	128,51
11.	Indeks Desa Membangun	0,7680 indeks	0,7999 indeks	100,26	0,7700 indeks	0,8135 indeks	105,65
12.	Indeks Pembangunan Kecamatan	88,28 Indeks	88,28 Indeks	100	89,09 Indeks	92,07 Indeks	103,34
13.	Persentase Desa Mandiri	21 persen	40,65 persen	193,71	22 persen	51,21 persen	232,77
14.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	102,4 indeks	102,4 indeks	100	101 indeks	79,75 indeks	121,04
15.	Angka Konflik Sosial	0 Angka	0 Angka	100	0 Angka	0 Angka	100
16.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,360 Indeks	60,80 Indeks	109,83	55,997 Indeks	60,80 indeks	117,81
17.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	69,7 Indeks	71,36 Indeks	102,38	70 Indeks	83,16 indeks	118,80
18.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	67 indeks	79,16 indeks	118,15	68 Indeks	85,53	125,76

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kierja Tahun					
		2023			2024		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
19.	Nilai SAKIP	71,30 Nilai	72,05 Nilai	101,05	71,3 Nilai	73,20 Nilai	102,66
20.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,22 Indeks	4,20 Indeks	99,53	4,25 Indeks	4,61 Indeks	108,47

Sumber data : diolah oleh Bagian Organisasi

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 memakai Indikator Kinerja Utama sesuai RPD Tahun 2024-2026 sesuai dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor : 000.8.6.3/8/2024 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026

d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan target dalam Rencana Pembaguan Daerah

Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Utama Dibandingkan Target dalam Rencana Pembaguan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2024			Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
		Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,32-76,78 indeks	77,21 indeks	100,56	76,97-77,48 indeks	100
2.	Indeks Pendidikan	11,53 indeks	11,32 indeks	98,18	11,68 indeks	96,92
3.	Angka Stunting	14 persen	3,77 persen	173,07	13 persen	171
4.	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,6832 indeks	0,7569 indeks	110,79	0,6836 indeks	110,72
5.	Angka Kemiskinan	6,96 persen	7,23 persen	96,12	6,56 persen	89,79
6.	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mandiri)	8 persen	3,42 persen	42,75	12 persen	28,50
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,19 persen	3,19 persen	100	3,08 persen	96,43
8.	Pendapatan perkapita	139,78 Juta Rp.	133,88 Juta Rp.	95,78	146,16 Juta Rp.	91,60
9.	Pertumbuhan PDRB Tanpa Industri Hasil Tembakau	5,70-6,19 persen	4,82 persen	84,56	6,13-6,44 persen	78,63
10.	Realisasi Investasi	1108 Milyar Rp.	1423,9 Milyar Rp.	128,51	1109 Milyar Rp.	127,25
11.	Indeks Desa Membangun	0,7700 indeks	0,8135 indeks	105,65	0,7800 indeks	104,29
12.	Indeks Pembangunan Kecamatan	89,09 Indeks	92,07 Indeks	103,34	90,59 Indeks	101,63
13.	Persentase Desa Mandiri	22 persen	51,21 persen	232,77	24 persen	213,38

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2024			Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
		Target	Realisasi	% Capaian		
14.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	101 indeks	79,75 indeks	121,04	99 indeks	119,44
15.	Angka Konflik Sosial	0 Angka	0 Angka	100	0 Angka	100
16.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,997 Indeks	60,80 indeks	117,81	57,270 Indeks	115,19
17.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	70 Indeks	83,16 indeks	118,80	73 Indeks	113,92
18.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	68 Indeks	85,53	125,76	70 Indeks	122,19
19.	Nilai SAKIP	71,3 Nilai	73,20 Nilai	102,66	72,20 Nilai	101,39
20.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,25 Indeks	4,61 Indeks	108,47	4,45 Indeks	103,60

Sumber data : diolah oleh Bagian Organisasi

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan kinerja yang dicapai

1. SDM yang unggul dan berbudaya

Realisasi sasaran SDM yang unggul dan berbudaya dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.9
Formula Penghitungan SDM Unggul dan Berbudaya

No	Sasaran	Indikator	Formula Perhitungan
1.	SDM yang unggul dan berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Rata-rata geometrik dari Indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran
		Indeks Pendidikan	(Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS) + Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dibagi 2
		Angka Stunting	Jumlah balita dengan kategori stunting (pendek dan sangat pendek) dari hasil pengukuran tinggi badan per umur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah balita yang diukur pada wilayah dan kurun waktu yang sama dikali 100%
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	Rata-rata dari nilai tujuh variabel indeks kelompok indikator (sub indeks) atau Jumlah total nilai tujuh variabel indeks kelompok indikator (sub indeks) dibagi 7
		Angka Kemiskinan	Perbandingan antara rata-rata dari perhitungan garis kemiskinan dengan rata-rata pengeluaran per kapita dan jumlah penduduk

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 0.0.08.6.3/8/2024 tanggal 11 Januari 2024

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Sasaran SDM yang unggul dan berbudaya
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun				Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target akhir RPD 2026(%)
		2023	2024				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	100,30	76,32-76,78 indeks	77,21 indeks	100,56	76,97-77,48 indeks	100
2.	Indeks Pendidikan	100	11,53 indeks	11,32 indeks	98,18	11,68 indeks	96.92
3.	Angka Stunting	118,47	14 persen	3,77 persen	173,07	13 persen	171
4.	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	102,50	0,6832 indeks	0,7569 indeks	110,79	0,6836 indeks	110,72
5.	Angka Kemiskinan	100,84	6,96 persen	7,23 persen	96,12	6,56 persen	89,79
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	104,42			115,74		113,69

Sumber data : RPD Kabupaten Kudus 2024-2026, BPS, Dinas Pendidikan, DKK dan Bappeda Tahun 2024 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran SDM yang unggul dan berbudaya tahun 2024

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 115,74% Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 11,32 dari capaian rata-rata sasaran tahun 2023 sebesar 104,42%

2. Capaian kinerja IKU

- a. Angka capaian kinerja IKU Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 sebesar 100,56%

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kudus tahun 2024 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. IPM merupakan ukuran kinerja pembangunan yang dihitung berdasarkan tiga dimensi, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Di tahun 2024, semua komponen pendukung tersebut mengalami peningkatan. Sehingga IPM Kabupaten Kudus pun meningkat dari 76,71 pada tahun lalu menjadi 77,21,” Faktor Pendorong untuk beberapa indikator IPM Kabupaten Kudus tahun 2024 adalah :

- Harapan hidup bayi yang lahir di Kabupaten Kudus mencapai 77,07 tahun
- Harapan lama pendidikan anak berusia 7 tahun ke atas mencapai 13,28 tahun

- Rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas mencapai 9,35 tahun
- Rata-rata pengeluaran riil per kapita warga Kudus mencapai Rp12.533.000 per tahun.

b. Angka capaian kinerja IKU Indeks Pendidikan tahun 2024 sebesar 98,18%.

Formulasi Perhitungan Indeks Pendidikan adalah :

$$\frac{(\text{Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS)} + \text{Rata-rata Lama Sekolah (RLS)})}{2}$$

$$\frac{13,28 + 9,35}{2} = 11,315 \quad \text{dibulatkan} \quad = 11,32$$

Indeks pendidikan di Kabupaten Kudus pada tahun 2024 menunjukkan bahwa anak-anak yang berusia 7 tahun ke atas memiliki harapan untuk bersekolah selama 13,28 tahun. Angka ini meningkat 0,02 tahun dibandingkan tahun 2023. Berikut ini adalah beberapa data terkait pendidikan di Kabupaten Kudus pada tahun 2024:

- Harapan hidup bayi yang lahir di Kabupaten Kudus pada tahun 2024 adalah 77,07 tahun
- Rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2024 adalah 9,35 tahun

PENGHARGAAN YANG DI PEROLEH DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS 2024

NO	NAMA PESERTA	CABOR	MEDALI/ JUARA	DOKUMENTASI	KET.
1.	Madinah Emas Permata	Pencak Silat	Perak		
2.	Rafael Karan Fernando	Taekwondo	Perunggu		
3.	Arya Dipa Dwi Dharma	Atletik	Perunggu		
4.	Raya Rambu Rabbani	Karate	Perunggu		
5.	Rahma Elena Rinjani	Pencak Silat	Perak		
6.	Melinda Priskila Ariska	Renang	Emas		
7.	Bola voli Putra	Bola Voli	Emas		

NO	NAMA PESERTA	CABOR	MEDALI/ JUARA	DOKUMENTASI	KET.
8.	Muhammad Daffa' Luthfiano	Anggar	Perunggu		
9.	Puput Diah Ayuningrum	Bola Basket	Perunggu		
10	Naznin Aqila Najya	Bola Basket	Perunggu		
11	Davista Zahra Ferliana	Bola Basket	Perunggu		
12	Jessica Medina Santosa	Bola Basket	Perunggu		
13	Desi Listiyowati	Bola Basket	Perunggu		
14	astika yoseanna dwita	Bola Basket	Perunggu		

NO	NAMA PESERTA	CABOR	MEDALI/ JUARA	DOKUMENTASI	KET.
15	Tsazkiya Hasna Rahmawati	Bola Basket	Perunggu		
16	Margaretha Putri Ananda	Bola Basket	Perunggu		
17	An Nisa Nur Azmi	Bola Basket	Perunggu		
18	Jocelyne Yenofa	Bola Basket	Perunggu		
19	Danea Brenda Susanto	Bola Basket	Perunggu		
20	Novita Ajeng Pratiwi	Bola Basket	Perunggu		
21	Fauzan Naufal	Bola Voli	Emas		

NO	NAMA PESERTA	CABOR	MEDALI/ JUARA	DOKUMENTASI	KET.
22	Daffa Ahmad Najib	Bola Voli	Emas		
23	Exceladrian Wibowo	Bola Voli	Emas		
24	Haidar Haqi Haryanto	Bola Voli	Emas		
25	Muhammad Rizal Asyfia Maulana	Bola Voli	Emas		
26	Dimas Alfiyansah	Bola Voli	Emas		
27	Nandana Mahardika Veda Hanta	Bola Voli	Emas		
28	Rasya Kurnia Ramadhan	Bola Voli	Emas		
29	Raka Rizkya Ramadhan	Bola Voli	Emas		

NO	NAMA PESERTA	CABOR	MEDALI/ JUARA	DOKUMENTASI	KET.
30	Moch Alvian Deni Ansyah	Bola Voli	Emas		
31	Galang Rizki Nusa Ade Putra	Bola Voli	Emas		
32	Muhammad Rizqi Baihaqi Mulyawan	Bola Voli	Emas		
33	Dini Elma Nafia Rois	Bola Voli Pasir	Perunggu		
34	Nayla Maulida Farwanti	Bola Voli Pasir	Perunggu		
35	Muhammad Nashrulloh Al- Habsyi	Bulutangkis	Perak		
36	Yudha Rendra Wijaya	Bulutangkis	Perak		
37	Muhammad Nashrulloh Al- Habsyi	Bulutangkis	Emas		
38	Yudha Rendra Wijaya	Bulutangkis	Perak		
39	Azka Suro Manggiyo Raharjo	Gulat	Emas		
40	Galih Setiyo Budi	Gulat	Perunggu		

NO	NAMA PESERTA	CABOR	MEDALI/ JUARA	DOKUMENTASI	KET.
41	Akbar Shidiq Al-Rosyad	Gulat	Perunggu		
42	Putra Gandhi	Gulat	Perunggu		
43	Nayaka Calista	Judo	Perunggu		
44	Nabila Putri Prastyo	Judo	Perunggu		
45	Reyhana Fatimatul Zahra	Judo	Perunggu		
46	Gisela Adhinda Valencia Putri	Kempo	Perunggu		
47	Jihad Khalid Dzikrullah	Pencak Silat	Perak		
48	Keysya Firda Refanavisa	Taekwondo	Perunggu		
49	Riristina Novita Maharani	Tenis Lapangan	Perak		
50	Alden Falahi Catra	Tenis Meja	Perak		
51	Muhammad Daffa Al Ghifari	Tenis Meja	Perak		

NO	NAMA PESERTA	CABOR	MEDALI/ JUARA	DOKUMENTASI	KET.
52	Adisty Norma Fanelis	Tenis Meja	Emas		
53	Nabila Fikriyah	Tenis Meja	Emas		
54	Rio Dwi Marsa Maulidy	Tenis Meja	Perak		
55	Karinza Matahari	Tenis Meja	Perak		
56	Anggia Sasta Tsabita	Tinju	Perak		
57	Anggun Nur Khotijah	Tinju	Perunggu		
58	Laily Zuhaida	Wushu	Perunggu		
59	Tasripah	GTK INOVATIF KATEGORI KEPALA SATUA N PAUD			

NO	NAMA PESERTA	CABOR	MEDALI/ JUARA	DOKUMENTASI	KET.
60	Sekolah Adiwiyata				
61	Kabupaten Kudus	Lomba Seni Macapat Islami Putri	Juara 2		
62	Kabupaten Kudus	Lomba Cabang Cerita Islmi Putra	Juara 1		

c. Angka capaian kinerja IKU Angka Sunting tahun 2024 sebesar 173,07%.

Ketercapaian indikator prevalensi stunting mengalami kenaikan dari tahun 2023 menjadi 3,77 pada tahun 2024 dengan status tercapai lebih dari 100%. Data yang digunakan hasil survei nasional melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK). Tujuan survei ini adalah mendapatkan gambaran akurat mengenai status gizi balita, meliputi stunting, wasting, underweight, dan obesitas. Selain itu, SSGI bertujuan mengukur capaian target antara percepatan penurunan prevalensi stunting. Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan yang dipengaruhi faktor multidimensi dimana penanganannya perlu dilakukan dengan melibatkan lintas program, lintas sektor dan peran serta masyarakat.

Faktor yang mendorong tercapainya angka prevalensi stunting antara lain :

- 1) Adanya kolaborasi yang melibatkan dokter spesialis di 7 Rumah Sakit (RSI Sunan Kudus, RS Kumala Siwi, RS Sarkies 'Aisyiyah, RSUD Dr. Loekmono Hadi Kudus, RS Mardi Rahayu, RS 'Aisyiyah, serta RSU Nurussyifa);
- 2) Adanya bantuan dan CSR dari Pihak Swasta dan OPD lainnya berupa pemberian PKMK (Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus) dan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Tinggi Protein;

- 3) Pemberian PKMK (Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus)) bagi balita stunting.

Selain itu juga ada 2 inovasi yang dilakukan untuk percepatan penurunan kasus stunting, yaitu :

- 1). Si Cantik (Aksi Cegah Anak Stunting dengan Intervensi Kolaboratif) yang meliputi Pelayanan “Kelas CANTIK” di semua Puskesmas setiap minggunya, pendampingan penanganan masalah gizi dan tumbuh kembang, dan kampanye perubahan perilaku;
- 2). Kedai Balita Si Cantik, yaitu berupa penyediaan makanan bergizi bagi balita.

- d. Angka capaian kinerja IKU Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Tahun 2024 sebesar 110,79 %.

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) merupakan indikator komposit yang menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan di suatu wilayah.

IPKM memuat 30 indikator yang dikelompokkan ke dalam 7 sub-indeks. Sub-indeks yang termuat dalam IPKM yaitu kesehatan balita, kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan, perilaku kesehatan, penyakit tidak menular, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan. IPKM dapat menjadi acuan pemerintah daerah (Pemda) dalam membuat program intervensi yang lebih tepat.

Nilai indikator Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) di Kabupaten Kudus mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir. Data IPKM tahun 2018 lalu menunjukkan nilai indikator sebesar 0,6827 dan naik menjadi 0,7569 di tahun 2024 dengan status tercapai lebih dari 100%.

Hal ini berarti sebagian besar program kesehatan yang dijalankan untuk tingkat Puskesmas sudah berjalan dengan baik. Tingginya IPKM disuatu wilayah menunjukkan kualitas kesehatan yang baik di wilayah tersebut. Nilai ketujuh sub indikator pelayanan kesehatan terdiri dari kesehatan balita, kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan, perilaku kesehatan, penyakit tidak menular, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan nilainya bervariasi, ada yang di atas angka ideal 0,60 yang berarti program pembangunan kesehatan masyarakat memiliki perubahan yang relatif signifikan, tetapi ada juga yang nilainya masih di bawah angka ideal (Kesehatan Reproduksi, Pelayanan Kesehatan dan Perilaku Kesehatan).

- e. Angka capaian kinerja IKU Angka Kemiskinan Tahun 2024 sebesar 96,12%.

Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Kudus mencapai 7,23 persen, mengalami penurunan sebesar 0,01 persen jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2023 sebesar 7,24 persen. Penduduk miskin di Kabupaten Kudus pada Maret 2024 berjumlah 65,69 ribu orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2023, maka jumlah penduduk miskin Kabupaten Kudus mengalami kenaikan 0,53 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 0,37 ribu orang.

Untuk mengukur kemiskinan, Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus, Pemerintah Daerah telah berusaha untuk meningkatkan pelatihan dan sekaligus tambah DPRB.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kudus Tahun 2024 antara lain :

- Pemerintah Kabupaten Kudus menerapkan kebijakan penurunan kemiskinan dengan beberapa program pengentasan. Kebijakan tersebut berfokus pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengurangan wilayah kantong kemiskinan
- Program tersebut diantaranya : santunan kematian untuk orang yang tidak mampu sebesar Rp. 1 juta per orang, hibah untuk yatim piatu sebesar Rp. 250.000,- per anak per tahun, beasiswa untuk siswa yang tidak mampu, pemberian BLT DBHCT untuk buruh rokok bagian produksi
- Angka pengangguran di Kudus tahun 2023 naik 0,04 persen poin menjadi 3,25 persen disbanding 2022
- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jateng No. 561/57 Tahun 2023 Tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, UMK Kabupaten Kudus 2024 diketahui mengalami kenaikan mencapai 3,16% disbanding 2023 menjadi Rp. 2.516.883,-

- Total PDRB pengeluaran mengalami peningkatan di 2023 menjadi Rp.72.984,40 milyar disbanding tahun sebelumnya yaitu Rp.71.416,93 milyar
- Nilai Tukai Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah pada Maret 2024 sebesar 116,02 mengalami peningkatan disbandingkan maret 2023 yang sebesar 107,52
- Inflasi Kudus cukup terkendali pada Maret 2024 yaitu sebesar 0,43 persen.

Program yang telah dijalankan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan antara lain :

1. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Program Pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin
3. Program Pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 115,74 % atau **Sangat Tinggi**.

2. Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berdaya

Realisasi Sasaran meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berdaya dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

Tabel 2.11

Formula Penghitungan Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berdaya

No.	Sasaran	Indikator	Formula Perhitungan
1.	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berdaya	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang Mandiri	Jumlah PPKS Mandiri dibagi Jumlah PPKS ditahun yang sama dikali 100 %

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 0.0.08.6.3/8/2024 tanggal 11 Januari 2024

Tabel 2.12

Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berdaya Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun				Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
		2023	2024				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mandiri)	81	8 persen	3,42 persen	42,75	12 persen	28,50

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun				Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
		2023	2024				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	81			42,75		28,50

Sumber data : RPD Kabupaten Kudus 2024-2026, BPS, Dinas Sosial P3A P2 KB Kabupaten Kudus Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran meningkatnya meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berdaya tahun 2024
Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 42,75% Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 38,25% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2023 sebesar 81%
2. Angka capaian kinerja IKU meningkatnya meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berdaya tahun 2024 sebesar 42,75%.

Perhitungan sebagai berikut : Jumlah KPM tergraduasi/Jumlah KPM x 100

Tahun 2023 Jumlah KPM PKH tergraduasi : $962/23.772 \times 100 = 4,05$ Target 5

Tahun 2023 Jumlah KPM PKH tergraduasi : $805/23.550 \times 100 = 3,42$ Target 8

Beberapa jenis pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan di Kabupaten Kudus, antara lain :

- Layanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),

Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orangtua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orangtua/keluarga.

Kriteria :

- a) berasal dari keluarga fakir miskin;
- b) anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
- c) anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya.

Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria :

- a) menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat-tempat umum; atau
- b) mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.

Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria :

- a) anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
- b) sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
- c) pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan
- d) dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya)

- Layanan pendampingan bagi anak berhadapan hukum (ABH), **Anak yang Berhadapan dengan Hukum** adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria :

- a) disangka;
- b) didakwa; atau
- c) dijatuhi pidana

- Layanan pendampingan bagi lanjut usia (Lansia), **Lanjut Usia Telantar** adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kriteria :

- a) tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan;
- b) terlantar secara psikis, dan sosial.

- Layanan pendampingan penyandang disabilitas, **Penyandang Disabilitas** adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Kriteria :

- a) mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
- b) mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;

- c) tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
- d) penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
- e) penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik;
- f) penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.

- Layanan pemberian bantuan korban bencana

Korban Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Kriteria :

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- a) korban terluka atau meninggal;
- b) kerugian harta benda;
- c) dampak psikologis; dan
- d) terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 42,75 % atau **Sangat Rendah.**

3. Menurunnya Pengangguran

Realisasi Sasaran menurunnya pengangguran dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sbb :

Tabel 2.13

Formula Penghitungan menurunnya pengangguran

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Jumlah Pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100 %
		PDRB Perkapita	Produk Domestik Regional Broto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB dibagi Jumlah Penduduk

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 0.0.08.6.3/8/2024 tanggal 11 Januari 2025

Tabel 2.14

Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya pengangguran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun				Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
		2023	2024				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	95,59	3,19 persen	3,19 persen	100	3,08 persen	96,43
2.	Pendapatan perkapita	100	139,78 Juta Rp.	133,88 Juta Rp.	95,78	146,16 Juta Rp.	91,60

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun				Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
		2023	2024				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	97,80			97,89		94,02

Sumber data : RPD Kabupaten Kudus 2024-2026, BPS, Dinas Naker Perinkop dan UKM Kabupaten Kudus Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran menurunnya pengangguran tahun 2024

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 97,89%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,09% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2023 sebesar Rp. 97,80%

2. Capaian kinerja IKU

- a. Angka capaian kinerja IKU Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2024 sebesar 100%

Realisasi Tahun 2024 sebesar 3,19 adalah dari Perhitungan:

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$

$$= \frac{16.508}{518.222} \times 100\%$$

$$= 3,19$$

Faktor yang mempengaruhi angka pengangguran adalah:

- Tidak terserapnya lulusan Perguruan Tinggi karena kurangnya informasi pasar kerja dan kurangnya keterampilan dan kualifikasi Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industry.
- Dampak ekonomi global berpengaruh terhadap perusahaan yg berorientasi ekspor sehingga banyak perusahaan yang tidak melakukan penambahan tenaga kerja.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran adalah:

- Menyiapkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan kompetensi di BLK.
- Link and Match dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sesuai kualifikasi sehingga terjadi peningkatan terhadap penyediaan lapangan kerja baik di sektor formal, informal dan jasa
- Penyebarluasan informasi lowongan kerja
- Pembinaan lembaga pelatihan kerja swastapembinaan BKK (Bursa Kerja Khusus) sebagai unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah dan tinggi

- Memberikan fasilitasi penempatan tenaga kerja pada alumninya.
- Terjadi Peningkatan terhadap penyediaan lapangan kerja baik di sektor formal, informal dan jasa;
- Fasilitasi kemudahan perijinan usaha sehingga banyak tumbuh usaha-usaha baru yang akan menambah lapangan kerja baru.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian angka pengangguran adalah :

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja, melalui kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Kegiatan sebagai berikut :
 - Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi,
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja, melalui kegiatan sebagai berikut :
 - Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota;
 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten /Kota
- d. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, melalui kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.

Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten kudas mencapai 65.690 jiwa berkurang sebanyak 470 jiwa dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 66.160 jiwa.

Garis kemiskinan penduduk Kabupaten Kudus mengalami kenaikan dari 520,830 pada tahun 2023 menjadi 550.075 pada tahun 2024. Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori 10 Kabupaten/kota Garis Kemiskinan sedang, yaitu garis kemiskinan di atas garis kemiskinan provinsi dan dibawah garis kemiskinan nasional. Sedangkan capaian Angka pengangguran pada tahun 2024 sebesar 3,19%.

- b. Angka capaian kinerja IKU Pendapatan Perkapita tahun 2024 sebesar 95,78%

Realisasi sebesar 12.088,00 adalah dari Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak

termasuk konsumsi/ pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Angka-angka konsumsi/ pengeluaran rata-rata per kapita diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

Faktor yang mendukung keberhasilan kemampuan konsumsi masyarakat semakin mudahnya layanan belanja via online.

Program yang mendukung Kemampuan Konsumsi rumah tangga Per Kapita adalah :

1. Program peningkatan ketahanan pangan
2. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Program Pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin
4. Program Pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial

Faktor penyebab keberhasilan

Realisasi sasaran meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat pada tahun 2024 telah ditetapkan karena faktor terjaganya stabilitas harga-harga barang terutama kebutuhan pokok serta kondusifitas wilayah yang cenderung stabil. Meskipun terjadi penurunan produktivitas masyarakat ditinjau dari segi lapangan usaha, namun untuk pengeluaran konsumsi masyarakat masih dapat dipertahankan dengan menjaga ketersediaan barang bahan kebutuhan pokok dan terjaminnya stabilitas harga barang.

Program kegiatan yang mendukung keberhasilan antara lain adalah monitoring ketersediaan barang dan harga barang secara rutin oleh tim pengendalian inflasi daerah.

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Disamping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 97,89 % atau **Sangat Tinggi**

4. Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi tanpa Industri Hasil Tembakau.

Realisasi Sasaran meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.15
Formula Penghitungan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tanpa Industri Hasil Tembakau

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tanpa Industri Hasil Tembakau	Pertumbuhan PDRB Tanpa Industri Hasil Tembakau	$((\text{PDRB tanpa IHT Tahun } n - \text{PDRB tanpa IHT Tahun } n-1) \text{ dibagi PDRB Tanpa IHT Tahun } n-1) \times 100\%$

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 0.0.08.6.3/8/2024 tanggal 11 Januari 2024

Tabel 2.16
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi tanpa Industri Hasil Tembakau Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2024			Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
		Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pertumbuhan PDRB Tanpa Industri Hasil Tembakau	5,70-6,19 persen	4,82 persen	84,56	6,13-6,44 persen	78,63
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja			84,56		78,63

Sumber data : RPD Kabupaten Kudus 2014-2026, Bappeda Tahun 2024 Kabupaten Kudus (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2024

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 84,56%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 14,26% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2023 sebesar Rp. 98,82% Dari kontribusi PDRB Industri Hasil Tembakau (IHT) dan tanpa IHT , dapat diketahui bahwa Industri IHT menyumbang PDRB Kabupaten Kudus sebesar 69,93 persen dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,01 persen, sedangkan PDRB tanpa IHT menyumbang kontribusi sebesar 30,07 persen dengan tingkat pertumbuhan 4,67 persen. Industri IHT masih mendominasi kontribusi ekonomi Kabupaten Kudus sehingga perlu dipertahankan tingkat produksi untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dan nilai tambah sumberdayaekonomi lokal, maka optimalisasi sektor ekonomi selain IHT perlu diupayakan secara maksimal.

Kondisi makro daerah telah menunjukkan trend perkembangan yang positif dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi dimana telah menunjukkan hasil yang positif sebesar 2,19 persen. Meski demikian, pemulihan ekonomi tahun ini diperkirakan berjalan lambat dari target yang telah ditetapkan pada RKPD 2024. Hal ini disebabkan karena penguatan ekonomi pada sektor industri pengolahan khususnya pada industri hasil tembakau yang masih stagnan pada pertumbuhan yang lambat sekitar 1 persen. Hal ini berdampak pada perekonomian terutama sektor riil di Kabupaten Kudus, dimana proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus tahun 2024 yang semula diperkirakan sebesar 2,5-3,5 persen mengalami perubahan menjadi 2,2-3,16 persen. Jika dihitung angka pertumbuhan ekonomi selain industri pengolahan tembakau, tingkat pertumbuhan ekonomi non IHT pada tahun 2023 mengalami perlambatan pada angka 4,67 persen setelah sebelumnya tumbuh pesat pada tahun 2022 sebesar 6,85 persen. Dengan asumsi bahwa tingkat pertumbuhan non IHT akan mengalami penyesuaian trend pertumbuhan daerah maka tingkat pertumbuhan ekonomi non IHT diperkirakan antara 5 sampai 5,7 persen selaras lebih rendah dari target RPD 2024 – 2026 sebesar 5,7 – 6,19 persen. Hal ini disebabkan oleh kondisi riil sector ekonomi industri pengolahan khususnya pada industri hasil tembakau sebagai sektor yang paling dominan masih dalam tahap recovery pertumbuhan setelah dalam beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan pertumbuhan. Pemulihan ekonomi dan pertumbuhan investasi daerah menjadi tantangan bagi Kabupaten Kudus untuk menjaga kualitas kesejahteraan masyarakat terutama dari sisi produksi dan pemberdayaan potensi ekonomi lokal masyarakat. Selain itu, dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat maka diharapkan dapat memberikan dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan dasar terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan, yang direpresentasikan pada peningkatan indikator Indeks Pembangunan Manusia.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 84,56 % atau **Tinggi**.

5. Terciptanya iklim investasi yang kondusif

Realisasi Sasaran Terciptanya iklim investasi yang kondusif dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.17
Formula Penghitungan Terciptanya Iklim Investasi yang kondusif

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1	Terciptanya Iklim Investasi yang kondusif	Realisasi Investasi	Jumlah modal dibagi investasi oleh penanam modal atau pelaku usaha yang ada di wilayah tertentu pada internal waktu tertentu

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 0.0.08.6.3/8/2024 tanggal 11 Januari 2024

Tabel 2.18
Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya Iklim Investasi yang kondusif Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun				Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
		2023	2024				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Realisasi Investasi	117,18	1108 Milyar Rp.	1424 Milyar Rp.	128,52	1109 Milyar Rp.	128,40
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	117,18			128,52		128,40

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 dan DPMPTSP Tahun 2022 Kabupaten Kudus (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2024

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 128,42%. Angka tersebut meningkat sebesar 11,34% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2023 sebesar 117,18%.

Dan terhadap target akhir RPD Tahun 2024

$$\text{Realisasi Investasi} = \frac{1424 \text{ M}}{1109 \text{ M}} \times 100\% = 128,40\%$$

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Realisasi Investasi tahun 2024 sebesar 128,52%. Angka tersebut meningkat sebesar 11,22% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 117,18%

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di masa mendatang antara lain :

1. Menyelesaikan percepatan penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang saat ini masih dalam tahap kajian agar kegiatan pemberian insentif kepada pelaku usaha dapat dilaksanakan.
2. Harmonisasi kebijakan di bidang perizinan dan penanaman modal yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

3. Meningkatkan pelayanan perizinan dengan melakukan inovasi pelayanan, evaluasi pemegang hak akses setiap triwulanan serta mereview Kembali SP dan Pelaksanaan Realisasi fisik pada sub kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota berjalan sesuai dengan rencana, target, waktu dan penganggaran dengan Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa Getaspejaten, dan OPD teknis terkait proses Penyusunan Kajian Potensi dan Peluang Inventasi 2024
4. Mengoptimalkan kegiatan pendampingan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan LKPM dan kewajiban penanaman modal lainnya.
5. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan dinas terkait sebagai pemegang hak akses perizinan dan hak akses pengawasan OSS melalui pelatihan/bimtek maupun rapat koordinasi.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka merealisasikan kepeminatan investor terhadap potensi investasi yang ditawarkan.

Hal ini didukung oleh program dan kegiatan dalam anggaran APBD Tahun 2024 yaitu :

- a. Program Promosi Penanaman Modal
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal
- d. Program Pengendalian Penanaman Modal
- e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 128,40% atau **Sangat Tinggi**.

6. Pembangunan wilayah yang berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat

Realisasi Sasaran Pembangunan wilayah yang berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.19
Formula Penghitungan Pembangunan wilayah yang berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Pembangunan wilayah yang berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM)	$1/3(\text{IKS} \times \text{IKE} \times \text{IKL})$; IKS = Indeks Sosial, IKE = Indeks Ekonomi, IKL= Indeks Lingkungan

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 0.0.08.6.3/8/2024 tanggal 11 Januari 2024

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Pembangunan wilayah yang berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2024			Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
		Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Desa Membangun	0,7700 indeks	0,8135 indeks	105,65	0,7800 indeks	104,29
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	100,26		105,65		104,29

Sumber data : RPD Kabupaten Kudus 2024-2026, Dinas PMD Kabupaten Kudus Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Capaian kinerja sasaran tahun 2024

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 105,65%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,39% dari capaian kinerja rata-rata tahun 2023 sebesar 100,26%

2) Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU Indeks Desa Membangun sebesar 104,50%.

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah non pelayanan dasar Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat desa penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia maupun perekonomian desa sebagai bagian dari pembangunan daerah. Pemberdayaan desa dapat dianalisis dengan melihat berbagai indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan desa, salah satunya adalah Indeks Desa Membangun (IDM).

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan salah satu indikator makro dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menggambarkan kinerja pemberdayaan desa. IDM juga menggambarkan keberdayaan sosial, ekonomi dan lingkungan suatu desa. Status IDM merupakan ukuran pengklasifikasian desa dalam rangka menentukan

intervensi anggaran maupun kebijakan peribangunan desa. Pada Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menentukan target IDM sebesar 0,7700 dan telah melebihi capaiannya yaitu 0,8135

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah merupakan alat penting dalam menilai kemajuan suatu desa.

IDM terdiri dari tiga komponen utama:

- Indeks Ketahanan Sosial (IKS),
- Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan
- Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

7. Menguatnya keberdayaan masyarakat di Perdesaan dan Perkotaan

Realisasi Sasaran menguatnya keberdayaan masyarakat di Perdesaan dan Perkotaan dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

Tabel 2.21

Formula perhitungan Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan	Persentase Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri dibagi jumlah desa di Kabupaten Kudus dikali 100
		Indeks Pembangunan Kecamatan	$(\Sigma \% IKM \text{ Kec} + \Sigma \% \text{Adm Desa} + \Sigma \% \text{Kelembagaan Desa} + \Sigma \% \text{Pemb. Masyarakat Desa})/4$

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 0.0.08.6.3/8/2024 tanggal 11 Januari 2024

Tabel 2.22

Capaian Kinerja Sasaran Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun				Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
		2023	2024		2024		
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Desa Mandiri	193,71	22 persen	51,21 persen	232,77	24 persen	213,38
2.	Indeks Pembangunan Kecamatan	100	89,09 Indeks	92,07 Indeks	103,34	90,59 Indeks	101,63
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	146,86			168,06		157,51

Sumber data : RPD Kabupaten Kudus 2024-2026, Dinas PMD Kabupaten Kudus Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Capaian kinerja sasaran tahun 2024

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 168,06%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 21,2% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2023 sebesar 146,86%

- a. Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah non pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat desa penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia maupun perekonomian desa sebagai bagian dari pembangunan daerah. Pada Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang salah satunya adalah Persentase Desa Mandiri, target dari Persentase Desa Mandiri pada Tahun 2024 adalah 22 % dan telah melebihi target 19,21 % menjadi 51,21 %.

Dan formulasi penghitungannya sebagai berikut adalah :

Jumlah Desa Mandiri : Jml Desa di Kabupaten Kudus x 100
 $63 : 123 \times 100 = 51,21\%$

Sedangkan Persentase Desa Mandiri adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan sudah sangat baik. Di Kabupaten Kudus pada tahun 2024 jumlah desa dengan status mandiri ada 63 desa atau 51,21 %. Hal tersebut sudah melebihi target yang telah ditentukan yaitu 22% atau 28 Desa, sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir periode RPD maka capaiannya adalah 233,38%

- b. Angka capaian kinerja IKU Indeks Pembangunan Kecamatan sebesar 103,34%

Capaian Indeks Pembangunan Kecamatan tahun 2024 menunjukkan peningkatan dari target 2024 di RPD yaitu sebesar 89,09% dengan realisasi sebesar 92,07 %, dan meningkat sebesar 2,98 %, hal ini menunjukkan kinerja kecamatan semakin baik. Peningkatan tersebut dipengaruhi dari indikator nilai IKM kecamatan, prosentase desa yang beradministrasi baik, kinerja lembaga desa dan penanganan konflik di semua kecamatan yang secara rata-rata menunjukkan peningkatan

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 168,06% atau **Sangat Tinggi**.

8. Meningkatnya ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Realisasi Sasaran Meningkatnya ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

Tabel 2.23
Formula perhitungan Meningkatnya ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan kekondusifan wilayah	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/kota dilakukan dengan memerhatikan faktor Ancaman, Kerentanan, dan Kapasitas. $RISIKO\ BENCANA = (HAZARDS\ VULNERABILITY) / CAPACITY$

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 0.0.08.6.3/8/2024 tanggal 11 Januari 2024

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan kekondusifan wilayah Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun				Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
		2023	2024				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	100	101 indeks	79,75 indeks	121,04	99 indeks	119,44
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	100			121,04		119,44

Sumber data : diolah oleh Bagian Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2024

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 121,04%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 21,04% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2023 sebesar 100%. Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Kudus adalah ukuran tingkat kerentanan wilayah tersebut terhadap bencana. IRB Kabupaten Kudus dapat diketahui berdasarkan potensi bahaya yang dimiliki, seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, dan gempa bumi.

Faktor yang mempengaruhi IRB Kerentanan sosial, Kerentanan ekonomi, Kerentanan lingkungan, Kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Potensi bahaya di Kabupaten Kudus

- Banjir,
- Cuaca ekstrim,

- Kekeringan,
- Tanah longsor,
- Gempa bumi,
- Kebakaran hutan dan lahan.

Untuk mengantisipasi risiko bencana, Kabupaten Kudus telah menyusun Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB). RPKB ini menjadi pedoman kebijakan, strategi, dan tata kelola pemerintah daerah dalam menangani bencana.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 121,04% atau **Sangat Tinggi**

9. Meningkatnya kekondusifan wilayah

Realisasi Sasaran Meningkatnya kekondusifan wilayah dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

Tabel 2.24

Formula Perhitungan Sasaran Meningkatnya kekondusifan wilayah

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya kekondusifan wilayah	Angka Konflik Sosial	Konflik sosial yang diselesaikan dibagi dengan konflik sosial yang terindikasi

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 0.0.08.6.3/8/2024 tanggal 11 Januari 2025

Tabel 2.25

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kekondusifan wilayah Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun				Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
		2023	2024				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Angka Konflik Sosial	100	0 Angka	0 Angka	100	0 Angka	100
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	100			100		100

Sumber data : diolah oleh Bagian Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran Strategis sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2024

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 100%. Angka tersebut sama dengan capaian rata-rata sasaran tahun 2023 sebesar 100%.

Angka konflik sosial dihitung dari 3 (tiga) potensi konflik yang dipetakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus yaitu :

- Potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal;
- Potensi konflik SARA, dan
- Potensi konflik sosial

Pada Tahun 2023 terdata :

- 3 Potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal
- 5 Potensi konflik SARA dan
- 22 Potensi konflik sosial

Pada Tahun 2024 terdata :

- 3 Potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal
- 2 Potensi konflik SARA dan
- 35 Potensi konflik sosial

Baik pada tahun 2023 maupun tahun 2024 keseluruhan potensi dapat ditangani, sehingga tidak berkembang menjadi konflik, jadi untuk tahun 2024 untuk Angka Konflik Sosial dapat sesuai target.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 100% atau **Sangat Tinggi**.

10. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup

Realisasi Sasaran Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.26
Formula Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$(37,60\% \times IKA) + (40,50\% \times IKU) + (21,90\% \times IKTL)$ dengan IKA = Indeks Kualitas Air; IKU = Indeks Kualitas Udara; IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 0.0.08.6.3/8/2024 tanggal 11 Januari 2024

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun				Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
		2023	2024				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	89,72	55,997 Indeks	65,97 indeks	117,81	57,270 Indeks	115,19
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	89,72			117,81		115,19

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran Strategis sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2024

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 108,58%. Angka tersebut meningkat sebesar 28,09% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2023 sebesar 89,72%.

Dan terhadap target akhir RPD Tahun 2026

$$\frac{\text{Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)} \text{ Tahun 2023}}{\text{Target Akhir RPD Tahun 2026}} \times 100\% = \frac{65,97}{57,27} \times 100\% = 115,19\%$$

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2023 sebesar 117,81%. Angka tersebut meningkat sebesar 28,09% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 89,72%. Realisasi Tahun 2023 sebesar 65,97 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 60,80 mengalami peningkatan sebesar 5,17 dan angka tersebut sama dengan target akhir RPD tahun 2026 sebesar 115,17%.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Tahun 2023 dipengaruhi oleh :

1. Indeks Kualitas Air dengan nilai 54,29 dengan bobot pengaruh IKLH sebesar 37,60%
2. Indeks Kualitas Udara dengan nilai 91,47 dengan bobot pengaruh IKLH sebesar 40,50%
3. Indeks Tutupan Lahan dengan nilai 38,88 dengan bobot pengaruh IKLH sebesar 21,90%

Sehingga dari faktor diatas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

No.	Indeks	Nilai	Bobot	Realisasi
1.	Indeks Kualitas Air	54,29	37,60%	20,41%
2.	Indeks Kualitas Udara	91,47	40,50%	37,05%
3.	Indeks Tutupan Lahan	38,88	21,90%	8,51%

Dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &(\text{Bobot} \times \text{IKA}) + (\text{Bobot} \times \text{IKU}) + (\text{Bobot} \times \text{ITL}) = \text{Realisasi} \\ &(37,60\% \times 54,29) + (40,50\% \times 91,47) + (21,90\% \times 38,88) = \\ &65,97 \end{aligned}$$

Faktor yang tidak mempengaruhi IKLH tidak memenuhi target karena yang mana pada penentuan target 2024 mengacu pada target RPD 2024 - 2026 dimana IKLH 2024 perhitungannya berpedoman pada Permen LHK Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian LHK, sedangkan pada realisasi 2024 perhitungan IKLH berpedoman pada

PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yg mulai berlaku tgl 19 Desember 2021 yang sangat berbeda dalam perhitungan IKLH.

Upaya dan usaha untuk meningkatkan capaian IKLH :

A. Indeks Kualitas Air

1. Perlu upaya pemisahan saluran pembuangan air hujan dengan limbah domestik skala kabupaten dengan pembangunan IPAL komunal terpusat agar tidak ada limbah domestik yang masuk ke air sungai (Kewenangan Dinas PUPR)
2. Perlunya pembangunan IPAL komunal pada kawasan permukiman (Kewenangan Dinas PUPR)
3. Perlunya sosialisasi dan pembinaan ke semua pelaku usaha terutama skala UMKM untuk mempunyai IPAL dalam pengelolaan air limbah industri dan domestik. (Kewenangan Dinas Nakerinkop dan UKM dan Dinas PKPLH)
4. Perlunya fasilitasi pembangunan Instalasi pengolahan air limbah pada industri skala UMKM (Kewenangan Dinas Nakerinkop dan UKM atau Pemerintah Desa)
5. Perlunya perbaikan kondisi vegetasi pada daerah hulu sungai dan daerah sempadan sungai (Kewenangan BPDAS-KLHK).
6. Perlunya sosialisasi kepada petani baik di daerah hulu, tengah, maupun hilir dalam penggunaan pupuk kimia, agar tidak mencemari air sungai (Kewenangan Dinas Pertanian)
7. Perlunya pengawasan intensif pada kualitas air limbah yang dibuang oleh pelaku usaha ke sungai sebagai badan air penerima (Kewenangan Dinas PKPLH)
8. Perlunya sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh masyarakat untuk tidak buang air besar sembarangan pada seluruh Daerah Aliran Sungai (Kewenangan Dinas Kesehatan)
9. Perlunya penguatan eco enzym pada air sungai secara berkala (Kewenangan Dinas PKPLH)
10. Perlunya sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat pada Daerah Aliran Sungai agar tidak membuang sampah pada sungai (Dinas PKPLH, Pemdes, Dinas PMD, BBWS Pemali Juwana)
11. Perlunya memperbanyak jumlah titik sampling uji kualitas air permukaan dan air sungai (Kewenangan Dinas PKPLH)

12. Perlunya mewujudkan laboratorium lingkungan yang telah ada agar terakreditasi dan teregister di KLHK (Kewenangan Dinas PKPLH)

B. Indeks Kualitas Udara

1. Perlunya memperbanyak penghijauan turus jalan, (Kewenangan Dinas PKPLH)
2. Perlunya penambahan ruang terbuka hijau (Kewenangan Dinas PKPLH, Pemdes)
3. Perlu adanya kawasan bebas rokok (Kewenangan Dinas Kesehatan)
4. Perlunya memperbanyak jalur sepeda (Kewenangan Dinas Perhubungan)
5. Perlunya pengintensifan pengawasan dan pembinaan pada pelaku usaha penghasil emisi udara (Kewenangan Dinas PKPLH)
6. Perlunya sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha sektor industri penghasil emisi udara terutama skala UMKM untuk mengelola sesuai ketentuan yang berlaku (Dinas Nakerinkop dan UKM)
7. memperbanyak jumlah titik sampling uji kualitas udara di Kabupaten Kudus (Kewenangan Dinas PKPLH)

C. Indeks Kualitas Lahan

1. Perlunya penambahan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus (Kewenangan Dinas PKPLH, Pemdes)
2. Perlunya koordinasi ke perusahaan/swasta/masyarakat untuk berperan serta menyediakan RTH publik dalam bentuk perjanjian atau kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten
3. Perlunya koordinasi ke Kementerian LHK terkait approve tutupan lahan.

Analisa /Faktor pendukung keberhasilan

Dari capaian kinerja IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2024 sebesar 117,81% diatas, sebagaimana formula penghitungan, pencapaian IKU IKLH dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.28
Capaian Indikator IKA, IKU dan IKTL Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Kualitas Air	46,67	54,29	116,33%
2	Indeks Kualitas Udara	79,67	91,47	114,81%
3	Indeks Tutupan Lahan	28,23	38,88	137,73%

Sumber : Dinas PKPLH Kab. Kudus

Tabel 2.29
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Kudus Tahun 2023-2024

Uraian	2023	2024
Indeks Kualitas Air (IKA)	19,80%	20,41%
Indeks Kualitas Udara (IKU)	33,18%	37,05%
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	7,82%	8,51%
IKLH	60,80%	65,97%

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2024-2026 mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif, dimana capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 64,67, selanjutnya mengalami penurunan dengan capaian paling rendah pada tahun 2022 sebesar 54,88.

Pada tahun 2024 indeks kualitas lingkungan hidup mengalami perbaikan dengan naik sebesar 65,97. Hal ini diikuti komponen IKA, IKU dan IKL yang juga berfluktuasi capaiannya, dimana pada tahun 2018-2020 mengalami kenaikan dan tahun 2021-2022 secara umum menurun, sedangkan pada tahun 2024 capaian ketiga komponen penyusun IKLH mengalami kenaikan, dimana khusus IKA mengalami capaian tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 54,29

Permasalahan :

Dengan adanya Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021, terhadap baku mutu referensi yang tidak sama dengan baku mutu kualitas ambien, sehingga perhitungan menggunakan baku mutu referensi yaitu angka 40 untuk NO₂ dan angka 20 untuk SO₂.

Solusi

Perlunya sosialisasi kepada pemilik persetujuan dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mengawasi lebih ketat lagi terhadap ambang batas NO₂ dan SO₂.

Efektifitas Dan Efisiensi

Dari uraian program dan kegiatan diatas dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dikatakan efektif dan efisien, karena program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran dalam mencapai sasaran tersebut dan anggaran yang digunakan juga lebih sedikit dari target pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 117,81% atau kategori **Sangat tinggi**.

11. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Realisasi Sasaran Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

Tabel 2.30
Formula Perhitungan Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai hasil evaluasi dari KemenPAN RB

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 0.0.08.6.3/8/2024 tanggal 11 Januari 2024

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun				Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
		2023	2024				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	101,94	70 Indeks	83,16 indeks	118,80	73	113,92
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	101,94			118,80		113,92

Sumber data :RPD Kabupaten Kudus 224-2026, Bagian Organisasi Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2023

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 118,80%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 16,86 dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2023 sebesar 101,94%.

2. Capaian kinerja IKU

- a. Angka capaian kinerja IKU Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 sebesar 118,80% Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2023.

Tahun 2023 dengan Nilai 71.36 dengan predikat Nilai BB pada tanggal 6 Februari 2024 dari KemenPAN RB. Dan untuk tahun 2024 dengan Nilai 83,16 dengan Predikat Nilai A pada tanggal 26 Februari 2025.

Untuk Catatan dan Rekomendasi dari Komponen RB General sebagai berikut:

Tabel 2.32
Catatan dan Rekomendasi dari Komponen RB General

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
1	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan target atas Kegiatan Utama belum sepenuhnya didasarkan pada target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 182 Tahun 2024) - Rencana Aksi belum sepenuhnya relevan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama - Penganggaran atas Rencana Aksi berpotensi tidak efisien 	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan target atas Kegiatan Utama memperhatikan target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 182 Tahun 2024) - Memastikan Rencana Aksi relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama - Melakukan reuiu agar Rencana Aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektifitas serta efisiensi
2	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General		
3	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi		Segera melakukan penetapan pengaturan mengenai sistem kerja pasca dilakukan penyederhanaan birokrasi
4	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas SPIP	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penjabaran sasaran strategis perangkat daerah ke dalam sasaran program/kegiatan belum seluruhnya selaras; 2) Indikator kinerja yang tidak cukup menggambarkan sasaran, dan overlapping dengan indikator kinerja di atasnya; dan 3) Masih ditemukan sasaran strategis dan indikator kinerja OPD yang tidak berorientasi hasil/masih bersifat output, tidak Specific, Measurable, Achievable, Relevance, Timeliness (SMART). 1) Belum seluruh pimpinan OPD berkontribusi maksimal dalam penyusunan register risiko dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas substansi manajemen risiko; 2) Pimpinan daerah dan pimpinan OPD belum sepenuhnya menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan; 3) Program antikorupsi belum didukung dengan penyediaan sumber daya secara memadai baik anggaran, personil maupun sarana prasarana; 4) Pemerintah Kabupaten Kudus belum sepenuhnya mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko kemitraan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memperbaiki perencanaan dengan memperhatikan cascading sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome, memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevance, Timeliness (SMART), dan didukung oleh target yang tepat.

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
			<p>5) Penerapan manajemen risiko belum menjadi indikator kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;</p> <p>6) Proses manajemen risiko yang diselenggarakan pada masing-masing perangkat daerah belum sepenuhnya melekat pada proses bisnis pemda yang dimulai sejak proses perencanaan;</p> <p>7) Belum dilakukan penilaian risiko kecurangan/fraud; dan</p> <p>8) Pemantauan terhadap risiko dan RTP belum dilakukan secara terjadwal dan berkala. 2) Keandalan data untuk menguji ketercapaian kinerja sasaran strategis OPD dan sasaran kegiatan masih belum memadai; dan 3) Masih terdapat temuan atas LHP BPK terkait Keandalan Laporan Keuangan, Pengamanan Aset Daerah maupun Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang masih berulang atau belum tuntas.</p>	<p>2 Menerapkan dan melakukan penyempurnaan atas implementasi manajemen risiko secara berkelanjutan dengan: a. Menjadikan penerapan manajemen risiko sebagai indikator kinerja seluruh OPD; b. Pemutakhiran daftar risiko secara berkala mulai dari risiko strategis sampai risiko operasional OPD; c. Melakukan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama internal dan eksternal serta risiko fraud pada seluruh proses bisnis; d. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang manajemen risiko; e. Melakukan evaluasi dan reviu atas penerapan manajemen risiko oleh Inspektorat; dan f. Meningkatkan kualitas pengelolaan risiko meliputi pemantauan dan monitoring terhadap pelaksanaan RTP dan keterjadian risiko, baik risiko strategis maupun operasional, serta meningkatkan kualitas reviu manajemen risiko. 3. Melakukan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan mengidentifikasi secara menyeluruh permasalahan pengelolaan aset daerah dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang.</p>

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
5	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI		
6	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	Catatan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP dapat diakses pada esr.menpan.go.id dengan menggunakan akun instansi	
7	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Digitalisasi Arsip	Penjelasan catatan tingkat digitalisasi arsip dapat dikonfirmasi ke Lembaga Kearsipan Daerah provinsi	Penjelasan rekomendasi tingkat digitalisasi arsip dapat dikonfirmasi ke Lembaga Kearsipan Daerah provinsi
8	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	Belum menyusun renaksi	Perlu menyusun renaksi
9	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	a. Prinsip-prinsip tata kelola kebijakan yang baik belum terbukti dilakukan pada seluruh proses perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan publik yang dimiliki; b. Pengungkapan bukti dukung masih banyak yang kurang sesuai/memadai.	<ol style="list-style-type: none"> Memperkuat dukungan pimpinan terkait pengelolaan kualitas kebijakan dan meningkatkan konsolidasi antar unit kerja untuk menggali data dan informasi tata kelola kebijakan yang dimiliki. Meningkatkan penerapan tata kelola kebijakan yang baik dengan beberapa agenda antara lain: a. Memperkuat dukungan pengkajian/analisis/telaah kebijakan dalam perencanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan; b. Memperkuat partisipasi stakeholder dalam proses kebijakan secara lebih representatif termasuk dengan kelompok stakeholder di luar instansi atau kelompok rentan di lapangan; c. Mengelola komunikasi kebijakan kepada seluruh stakeholder sasaran dalam seluruh proses kebijakan; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan untuk memastikan dampak/ketercapaian tujuan kebijakan atau keselarasan implementasi kebijakan dalam penyelesaian masalah kebijakan atau target pencapaian yang menjadi latar belakang inisiasi kebijakan. e. Melibatkan secara aktif SDM fungsional Analisis Kebijakan/pejabat fungsional terkait lainnya yang kompeten untuk melakukan analisis dan menyusun rekomendasi kebijakan di seluruh proses kebijakan. Menyempurnakan bukti dukung sesuai catatan validasi LAN.
10	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Hukum	Kategori A (sangat baik)	Diperhatikan kekurangan nilai pada masing-masing variabel

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
11	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pembangunan Statistik	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus memiliki keunggulan pada Domain Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) dalam Aspek Standar Data Statistik, Interoperabilitas Data, serta Kode Referensi dan/atau Data Induk. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus perlu membuat kebijakan dan prosedur baku terkait mekanisme penjaminan kualitas data statistik di seluruh produsen data.
			<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus memiliki keunggulan pada Domain Kualitas Data hampir di seluruh aspek. Penerapan Aspek Relevansi, Akurasi, Aktualitas dan Ketepatan Waktu, Aksesibilitas, serta Keterbandingan dan Konsistensi telah merujuk pada Surat Edaran Sekretariat Daerah Kudus berupa Petunjuk Teknis (Juknis) tentang Tata Kelola Statistik Sektoral Nomor 000.7/2249.4/2023. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus memiliki keunggulan pada Domain Proses Bisnis Statistik di semua aspek. Penerapan Aspek Perencanaan Data, Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data, dan Penyebarluasan Data telah mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus nomor 000.7/2249.4/2023 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Profesionalitas pada indikator tingkat kematangan Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data Metodologi dan Penjaminan Kualitas Data masih belum mencapai predikat baik karena mekanisme proses penjaminan kualitas data belum jelas Belum seluruh aspek pada domain Statistik Nasional mencapai predikat memuaskan atau belum seluruh indikator berada pada tingkat kematangan optimum. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus perlu melakukan reviu dan evaluasi secara berkala serta melakukan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan pada Aspek Pemanfaatan Data Statistik, Pengelolaan Kegiatan Statistik, dan penguatan SSN Berkelanjutan
12	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	<ol style="list-style-type: none"> Pengumuman RUP di atas 70%; Realisasi e-Tendering di atas 70%; Paket selesai katalog elektronik kurang dari 50%; Terdapat transaksi Toko Daring; Realisasi non e-Tendering/non e-Purchasing di atas 70%; Pencatatan e-Kontrak di atas 70%; Keterisian JF PPBJ belum memenuhi 100% namun sudah mencapai 60%; 	<ol style="list-style-type: none"> Tingkatkan dan pertahankan kinerja pengumuman RUP SIRUP; Tingkatkan dan pertahankan kinerja realisasi paket tender; Perlu ada kolaborasi dan sinergi untuk menyelesaikan paket katalog elektronik yang sudah direalisasikan; Pertahankan kinerja realisasi toko daring; Tingkatkan dan pertahankan kinerja realisasi paket non-tender/non e-purchasing; Tingkatkan dan pertahankan kinerja pencatatan e-kontrak; Segera memenuhi keterisian JF PPBJ melalui pengangkatan pertama, PPPK, dan/atau Perpindahan dari Jabatan Lain;

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
			8) Level Kematangan sudah mencapai Level 3 (Proaktif).	8) Implementasi dengan baik pencapaian tersebut. Selanjutnya persiapan menuju tingkatan berikutnya.
13	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit	2023	
14	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik		
15	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik		Melaksanakan saran dalam surat ketua Ombudsman yang telah disampaikan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
16	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE	Predikat Memuaskan	Rekomendasi terdapat dalam LHE masing-masing instansi
17	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Makro	Merupakan capaian IKU Makro yang terdiri dari Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini	
18	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Non Makro	8 IKU dengan capaian <90% dari total 20 IKU	
19	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Opini BPK	WTP	
20	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Tindak Lanjut Rekomendasi		
21	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks BerAkhlaq	Kategori Sehat	Laporan lengkap dapat diunduh pada website evalbudker.menpan.go.id dengan username dan password yang sama sewaktu pengisian evaluasi budaya kerja
22	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Penilaian Integritas	Internal: 75.7; Eksternal: 88.06; Ekspers: 68.65	Setelah mengetahui analisis terkait faktor koreksi pada subbab sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kudus dapat melakukan analisis mendalam mengenai perumusan rekomendasi dan rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil SPI 2024. Dalam SPI 2024, Pemerintah Kabupaten Kudus mendapat skor SPI sebesar 70.54. Indeks tersebut menempatkan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam kategori rentan yang berarti Pemerintah Kabupaten Kudus sangat rentan terpapar praktik korupsi. Hal ini akibat sistem pencegahan yang lemah/tidak berjalan dan/atau

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
				meningkatnya jumlah oknum pejabat/pegawai yang kurang berintegritas yang menempati posisi/jabatan/layanan strategis/kunci di lembaga, sehingga meningkatkan risiko korupsi lembaga secara keseluruhan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa upaya dan program pencegahan korupsi dilakukan lembaga saat ini TIDAK EFEKTIF.
23	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Kepuasan Masyarakat		Pertahankan Pelaksanaan SKM, Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
24	Strategi Pembangunan	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	Penetapan sasaran belum sepenuhnya menjawab permasalahan utama pada tema terkait. - Perumusan indikator belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup. - "Rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah Rencana aksi tematik yang disusun belum menjabarkan "how to" atau bagaimana langkah-langkah mencapai sasaran".	Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait. - Indikator Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah belum mampu menjawab sasaran yang ditentukan sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan/atau mandat RB Tematiknya. - Memastikan Rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah
25	Strategi Pembangunan	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	- Penetapan sasaran belum sepenuhnya menjawab permasalahan utama pada tema terkait. - Perumusan indikator belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup. - Rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah. - Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.	- Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait. - Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup - Memastikan Rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah. - Memastikan Rencana aksi memenuhi aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.
26	Strategi Pembangunan	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	- Penetapan sasaran belum sepenuhnya menjawab permasalahan utama pada tema terkait. - Rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah. - Rencana aksi yang disusun pada tema "digitalisasi administrasi pemerintahan pada penanganan stunting" belum berfokus pada unsur digitalisasi penanganan stunting". - Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi. - Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya,	- Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait. - Memastikan Rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah. - Memastikan Rencana Aksi fokus pada unsur digitalisasi pada tematik "digitalisasi administrasi pemerintahan pada penanganan stunting". - Memastikan Rencana aksi memenuhi aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi. - Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain.

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
			khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan.	
27	Strategi Pembangunan	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	- Penetapan sasaran belum sepenuhnya menjawab permasalahan utama pada tema terkait. - Rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah. - Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.	- Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait. - Memastikan Rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah - Memastikan Rencana aksi memenuhi aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.
28	Strategi Pembangunan	Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan)	- Rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah. - Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.	- Memastikan Rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah - Memastikan Rencana aksi memenuhi aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.
29	Capaian Indikator Dampak	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	Angka Kemiskinan yang Digunakan Angka Maret Tahun 2024, sumber data BPS	
30	Capaian Indikator Dampak	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	Data Realisasi Investasi yang digunakan Triwulan III 2023	
31	Capaian Indikator Dampak	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	Menggunakan Data Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023 Berdasarkan Surat Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Nomor OT.04.03/A.IV/1483/2025 Tanggal 5 Februari 2025	
32	Capaian Indikator Dampak	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	Perhitungan Capaian Dampak PDN Mengacu pada KepmenPANRB 182 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2238	
33	Capaian Indikator Dampak	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	Berdasarkan Penilaian Kinerja Pengendalian Inflasi Kementerian Dalam Negeri dengan Menggunakan Data Tahun 2023 dan 2024, predikat penilaian kinerja pengendalian inflasi berada pada kriteria Belum Baik	
34	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	Instansi belum melakukan penyusunan Arsitektur SPBE sesuai standar	Instansi perlu menyusun Arsitektur As-Is

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 118,80% atau kategori Sangat tinggi

12. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

Realisasi Sasaran Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

Tabel 2.33
Formula Perhitungan Meningkatnya Kemandirian
Keuangan Daerah

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks untuk kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang terdiri dari 6 Dimensi : 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran 2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD 3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah 4. Penyerapan anggaran 5. Kondisi keuangan daerah 6. Opini BPK atas LKPD

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 0.0.08.6.3/8/2024 tanggal 11 Januari 2024

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun				Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
		2023	2024				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	118,15	68 Indeks	85,53 indeks	125,76	70 Indeks	122,19
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	118,15			125,76		122,19

Sumber data : RPD Kabupaten Kudus 2014-2026, BPPKAD Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2024
Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 125,76%.
2. Capaian kinerja IKU
Angka capaian kinerja IKU Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebesar 125,76%
Angka tersebut dipeoleh dari 6 dimensi penilaian yaitu :
 - kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
 - Alokasi anggaran belanja dalam ABBD
 - Transparansi pengelolaan Keuangan daerah
 - Penyerapan anggaran dan
 - Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 125,76% atau kategori **Sangat tinggi**.

13. Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintah

Realisasi Sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintah dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

Tabel 2.35
Formula Perhitungan Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintah

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Pemerintah	Nilai SAKIP	Nilai hasil evaluasi dari KemenPAN RB
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai hasil evaluasi dari KemenPAN RB

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 0.0.08.6.3/8/2024 tanggal 11 Januari 2024

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Pemerintah Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun				Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
		2023	2024				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai SAKIP	101,05	71,3 Nilai	73,20 Nilai	102,66	72,20 Nilai	101,39
2.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	99,53	4,25 Indeks	4,61 Indeks	108,47	4,45 Indeks	103,60
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	100,29			105,56		102,50

Sumber data :RPD Kabupaten Kudus 2024-2026, Bagian Organisasi Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2024

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 105,56%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,27% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2023 sebesar 100,29%.

a. Angka capaian kinerja IKU Nilai Akuntailitas Kinerja tahun 2024 sebesar 102,66%

Tahun 2024 Kabupaten Kudus mendapatkan Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 dengan predikat Nilai BB pada tanggal 3 September 2024 dari KemenPAN RB. Pemerintah Kabupaten Kudus telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan telah di melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut :

Tabel 2.37
RENCANA AKSI TINDAKLANJUT
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO.	REKOMENDASI	URAIAN AKSI	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
1	Menyelaraskan dokumen perencanaan jangka menengah dengan dokumen perencanaan jangka pendek pada level Pemerintah Daerah maupun pada level Perangkat Daerah	a. Melaksanakan reviu dokumen perencanaan baik di tingkat daerah maupun PD dengan menyertakan dalam ruang lingkupnya pengujian atas keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dengan jangka pendek	TW 2 dan TW 3 Tahun 2025	Tim-tim Reviu dokumen perencanaan level daerah dan perangkat daerah (Inspektorat)	Tim-tim Reviu dokumen perencanaan level daerah dan perangkat daerah (Inspektorat)
		b. Pelaksanaan desk perbaikan dengan 10 PD yang disebut dalam evaluasi dengan fokus perbaikan indikator sasaran	TW 4 Tahun 2024	Bappeda	Bappeda
		c. Pelaksanaan desk pencermatan target sasaran yang telah melebihi capaian tahun 2023	TW 4 Tahun 2024	Bappeda	Bappeda
2	Melakukan reviu dan perbaikan dokumen pada PD agar dapat mencerminkan kinerja yang berorientasi hasil dan mencerminkan kinerja yang diharapkan dari unit tersebut sesuai tugas dan fungsi serta ekspektasi stakeholders	Melaksanakan reviu dokumen perencanaan di tingkat PD dengan menyertakan dalam ruang lingkupnya pengujian atas keselarasan kinerja dengan permasalahan sesuai tugas dan fungsi PD	TW 2 dan TW 3 Tahun 2025	Tim-tim Reviu dokumen perencanaan level daerah dan perangkat daerah (Inspektorat)	Tim-tim Reviu dokumen perencanaan level daerah dan perangkat daerah (Inspektorat)
3	Membangun kerangka logis atau pohon kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 sebagai dasar penjenjangan kinerja pada level Pemerintah Daerah maupun pada level PD dengan mengidentifikasi CSF secara tepat, mengidentifikasi hingga level operasional agar dapat menjadi alat bantu penyelesaian masalah maupun pencapaian kinerja	a. Melaksanakan reviu dokumen perencanaan baik di tingkat daerah maupun PD dengan menyertakan dalam ruang lingkupnya pengujian atas indikator kinerja berjenjang yang direncanakan	TW 2 dan TW 3 Tahun 2025	Tim-tim Reviu dokumen perencanaan level daerah dan perangkat daerah (Inspektorat)	Tim-tim Reviu dokumen perencanaan level daerah dan perangkat daerah (Inspektorat)
		b. FGD identifikasi masalah pembangunan	TW 4 Tahun 2024	Bappeda	Bappeda
		c. FGD penajaman permasalahan aspek kesejahteraan sosial	TW 4 Tahun 2024	Bappeda	Bappeda
		d. FGD penajaman permasalahan bidang infrastruktur dan lingkungan	TW 4 Tahun 2024	Bappeda	Bappeda
		e. FGD penyusunan pohon kinerja berdasarkan pengelompokan permasalahan yang teridentifikasi	TW 4 Tahun 2024	Bappeda	Bappeda

NO.	REKOMENDASI	URAIAN AKSI	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
4	Melakukan reviu dan perbaikan pada dokumen IKU pada level Pemerintah Daerah maupun pada PD agar memiliki definisi operasional dan formulasi yang tepat serta relevan untuk mengukur kinerja yang diharapkan	Review / Perbaikan kualitas dokumen IKU agar Formulasi dokumen yang relevan mengukur kinerja yang diharapkan dan spesifik definisi operasional	TW 4 Tahun 2024	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
5	Meningkatkan kepatuhan pengisian aplikasi e-planning dan memanfaatkan aplikasi e-planning sebagai dasar monitoring dan evaluasi kinerja serta feedback perbaikan dari pimpinan unit/satuan kerja terkait kinerja yang tidak tercapai. Memanfaatkan aplikasi kinerja sebagai dasar pengukuran kinerja individu dan dasar pemberian reward and punishment baik bagi unit organisasi maupun bagi individu	a.Menambah jadwal Desk Tepra	TW 4 Tahun 2024	Bagian Adbang	Semua PD
		b.Melaksanakan Rakor Tepra	TW 4 Tahun 2024	Bagian Adbang	Semua PD
		c.Jumlah pelaksanaan monev ke perangkat daerah	TW 4 Tahun 2024	Bagian Adbang	Semua PD
		d.Membuat Surat Edaran Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	TW 4 Tahun 2024	Bagian Adbang	Semua PD
		e.Penyusunan RA kinerja individu pada e-sakip terintegrasi	TW 1 Tahun 2025	Bagian Organisasi	Semua PD
6	Mengunggah LPPD dan LKJ PD ke dalam <i>website</i> milik pemerintah daerah maupun PD sebagai bagian dari proses transparansi informasi kinerja kepada publik	Surat edaran arahan untuk mengunggah LPPD dan LKJ PD ke dalam website milik perangkat daerah masing-masing	TW 4 Tahun 2024	Bagian Organisasi	Semua PD
7	Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kudus yang disertai dengan perbandingan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya agar dapat melengkapi analisis data kinerja dan pemanfaatan data kinerja pada periode berikutnya	a.Reviu Dokumen LKjIP dan SAKIP dari Perangkat Daerah	TW 1 Tahun 2025	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		b.Bimtek Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja	TW 4 Tahun 2024	Bagian Organisasi	Semua PD

NO.	REKOMENDASI	URAIAN AKSI	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
8	Meningkatkan kualitas laporan kinerja agar merata pada setiap PD disertai analisis yang lengkap dengan melibatkan analisis ketercapaian, data pembandingan (target realisasi, realisasi beberapa tahun sebelumnya, dan target jangka menengah), faktor hambatan/ pendukung, solusi atas permasalahan, dan analisis efisiensi ketercapaian kinerja	Melakukan reviu LKjIP dengan memprioritaskan pada perangkat daerah dengan nilai Evaluasi AKIP yang di bawah rata-rata	Februari 2025	Tim Implementasi SAKIP PD dan Bagor	Tim Implementasi SAKIP PD dan Bagor
9	Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja yang dimiliki lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja	Melaksanakan reviu dokumen perencanaan di tingkat Daerah maupun PD dengan menyertakan dalam ruang lingkupnya pengujian atas penetapan target kinerja yang menantang	TW 2 dan TW 3 Tahun 2025	Tim-tim Reviu dokumen perencanaan level daerah dan perangkat daerah (Inspektorat)	Tim-tim Reviu dokumen perencanaan level daerah dan perangkat daerah (Inspektorat)
10	Menyempurnakan kualitas evaluasi internal SAKIP dengan meningkatkan kapasitas SDM evaluator internal agar memiliki pemahaman yang sama dan mampu memberikan catatan perbaikan yang sama baiknya	a. Mengirimkan perwakilan tim Evaluasi AKIP untuk mengikuti diklat evaluasi AKIP PD	TW 1 Tahun 2025	Inspektur Kab Kudus	Inspektur Kab Kudus
		b. Melakukan pertemuan internal antar tim evaluator pada tahapan sebelum pelaksanaan evaluasi, setelah pelaksanaan evaluasi, dan penyusunan konsep laporan hasil Evaluasi AKIP	TW 2 Tahun 2025	Tim Evaluasi AKIP PD	Tim Evaluasi AKIP PD
11	Menyelesaikan penyusunan kebijakan terkait pemberian reward and punishment atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal PD di lingkungan Pemerintah	Berkontribusi dalam bentuk pemberian reward dan punishment atas hasil evaluasi AKIP dan progress tindak lanjut evaluasi AKIP	TW 1 Tahun 2025	Inspektorat Daerah Kab. Kudus	Inspektorat Daerah Kab. Kudus

NO.	REKOMENDASI	URAIAN AKSI	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
	Kabupaten Kudus untuk mendorong lebih cepat perbaikan implementasi SAKIP di PD				
12	Memfaatkan teknologi informasi dalam evaluasi SAKIP internal melalui penggunaan secara optimal aplikasi e-planning sehingga mempermudah pelaksanaan evaluasi internal dan juga memantau tindak lanjut yang dilakukan	a. Mengembangkan aplikasi e-planning dalam rangka Evaluasi AKIP dan pemantauan atas tindak lanjut per triwulannya	TW 4 Tahun 2024 - TW 1 Tahun 2025	Bappeda	Bappeda dan Inspektorat Daerah Kab. Kudus
		b. Menyelenggarakan Diklat bagi seluruh PD agar mampu melaksanakan evaluasi mandiri atas implementasi SAKIP pada PD masing-masing/Pengiriman peserta SAKIP	Tahun 2025	BKPSDM	BKPSDM

b. Angka capaian kinerja IKU Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2024 sebesar 108.47%

Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2024 didapatkan dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB terhadap unit-unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. Pada penilaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus mendapatkan nilai 4,61 Kategori A dengan predikat Pelayanan Prima dan dari hasil tersebut Pemerintah Kabupaten Kudus mendapat peringkat ke 6 (enam) tingkat Nasional. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 659 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Berikut adalah rincian hasil Pemantauan dan evaluasi kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Daerah untuk Kabupaten Kudus :

- IPP Dinas Sosial 4,56
- IPP RSUD 4,64
- IPP Disdukcapil 4,63
- IPP Kabupaten 4,61

Dengan Kategori A (Pelayanan Prima)

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 105,56% atau **Sangat tinggi**.

Secara umum Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2024 dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, kinerjanya dikategorikan Sangat tinggi (nilai 91% < 100%), Tinggi (nilai 76% < 90%), Sedang (nilai 66% < 75%), Rendah (nilai 51% < 65%) dan Sangat Rendang (nilai < 50%), sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Sesuai dengan ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja terhadap 13 sasaran strategis dimaksud, capaian kinerja dalam kategori sangat tinggi sebanyak 11 sasaran, dalam kategori tinggi sebanyak 1 sasaran dan dalam kategori sangat rendah

Berkaitan hal tersebut, berikut ini disampaikan ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.38
Ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Kategori
1.	SDM yang unggul dan berbudaya	115,74	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berdaya	42,75	Sangat rendah
3.	Menurunnya pengangguran	97,89	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tanpa Industri Hasil Tembakau	84,56	Tinggi
5.	Terciptanya iklim Investasi yang kondusif	128,52	Sangat Tinggi
6.	Pembangunan wilayah yang berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat	105,65	Sangat Tinggi
7.	Menguatnya keberdayaan masyarakat di Pedesaan dan Perkotaan	168,06	Sangat Tinggi
8.	Meningkatnya ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	121,04	Sangat Tinggi
9.	Meningkatnya kekondusifan wilayah	100	Sangat Tinggi
10.	Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	117,81	Sangat Tinggi
11.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	118,80	Sangat Tinggi
12.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	125,76	Sangat Tinggi
13.	Meningkatnya akuntabilitas dan integritas Pemerintah	105,56	Sangat Tinggi

f. Analis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.39
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

1. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			457.594.861.682	428.064.476.314		93,55 %	3,33 %
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Dikpora)	32	Nilai	31,00	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	96,88 %	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			164.596.130.917	155.377.060.062		94,40 %	4,88 %
		Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS kesetaraan) (SPM)	100	Persen	100,00	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	100,00 %	
		Persentase warga negara usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APS PAUD) (SPM)	100	Persen	96,00	Kepala Bidang PAUD dan Dikmas	96,00 %	
		Persentase anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar (APS) (tercantum dalam SPM)	100	Persen	98,33	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	98,33 %	
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun (SPM)	97,8	Persen	99,82	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	102,07 %	
		Angka Anak Tidak Sekolah usia 7 - 18 Tahun (ATS)	0,39	Angka	0,39	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	100,00 %	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			310.000.000	306.300.000		98,81 %	1,19 %

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SMP) (SPM)	67,35	Angka	67,35	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	100,00 %	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (Pendidikan Kesetaraan) (SPM)	57,67	Angka	57,67	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	100,00 %	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SD) (SPM)	54,78	Angka	54,78	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	100,00 %	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			299.999.000	297.449.000		99,15 %	0,85 %
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai standar	80,67	Persen	80,67	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	100,00 %	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			789.999.980	745.220.745		94,33 %	5,67 %
		Persentase organisasi pemuda yang aktif	96,96	Persen	96,96	Kepala Bidang Kepemudaan	100,00 %	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			16.256.798.400	15.018.869.209		92,39 %	7,61 %
		Persentase peningkatan prestasi olahraga	4,76	Persen	4,76	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Plt. Kepala Bidang Olahraga)	100,00 %	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			400.000.000	400.000.000		100,00 %	0,00 %
		Persentase organisasi Pramuka yang aktif	100	Persen	100,00	Kepala Bidang Kepemudaan	100,00 %	

2. DINAS KESEHATAN

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			128.970.858.111	122.587.538.924		95,05 %	0,07 %

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	41	Nilai	39,00	SEKRETARIS	95,12 %	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			91.510.020.080	86.635.816.746		94,67 %	4,36 %
		Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	Persen	99,08	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	99,08 %	
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	Persen	95,93	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	95,93 %	
		Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	Persen	100,00	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	100,00 %	
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	Persen	100,00	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	100,00 %	
		Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	Persen	95,98	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	95,98 %	
		Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	Persen	99,86	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	99,86 %	
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	Persen	100,00	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	100,00 %	
		Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal strata utama	100	Persen	100,00	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	100,00 %	
		Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100	Persen	100,00	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	100,00 %	
		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	1.46	per 1.000 penduduk	1,06	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	72,60 %	
		Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	86.2	Persen	99,27	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	115,16 %	

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
		Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSUD)	100	Persen		100,00	100,00 %	
		Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	Persen		99,86	99,86 %	
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	Persen		100,00	100,00 %	
		Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	Persen		100,00	100,00 %	
		Persentase Desa/ Kelurahan STBM	50	Persen		52,27	104,54 %	
		Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/ wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)	100	Persen		100,00	100,00 %	
		Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	Persen		99,62	99,62 %	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				679.597.000	560.174.449	82,43 %	-2,43 %
		Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar	100	Persen		80,00	80,00 %	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				694.285.900	454.297.150	65,43 %	34,57 %
		Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar	100	Persen		100,00	100,00 %	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				913.667.500	749.612.542	82,04 %	17,96 %
		Cakupan Desa Siaga Aktif	81.25	Persen		81,25	100,00 %	

3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			16.145.642.305	15.590.683.696		96,56 %	-5,87 %
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas PUPR)	43	Nilai	39,00	SEKRETARIS	90,70 %	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			14.097.303.000	13.696.473.311		97,16 %	0,73 %
		Presentase Infrastruktur irigasi kabupaten dalam kondisi baik	92.38	persen	90,43	PLT. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR	97,89 %	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			7.250.266.000	6.966.185.600		96,08 %	-37,01 %
		Persentase pemantauan kualitas SPAM (desa)	100	persen	24,40	PLT. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR	24,40 %	
		Persentase rumah tangga berakses air minum perpipaan	40	Persen	37,50	PLT. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR	93,75 %	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			3.721.962.000	3.611.335.650		97,03 %	3,78 %
		Persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik	99.2	persen	100,00	KEPALA BIDANG TATA BANGUNAN DAN DRAINASE	100,81 %	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			17.722.824.435	17.121.954.286		96,61 %	0,67 %
		Persentase saluran drainase kabupaten dalam kondisi baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat	67	persen	65,18	KEPALA BIDANG TATA BANGUNAN DAN DRAINASE	97,28 %	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			6.680.017.260	6.147.395.610		92,03 %	-12,03 %
		Rasio bangunan berijin	7	persen	5,60	KEPALA BIDANG TATA BANGUNAN DAN DRAINASE	80,00 %	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			69.834.223.200	66.947.868.596		95,87 %	0,70 %
		Prosentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi Mantap	94.63	persen	91,38	KEPALA BIDANG BINA MARGA	96,57 %	

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			37.910.000	31.107.800		82,06 %	17,94 %
		Persentase tenaga jasa kontruksi yang memiliki sertifikasi kompetensi	52	persen		52,00	100,00 %	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			530.000.000	500.563.392		94,45 %	5,55 %
		Persentase ketersediaan dokumen regulasi rencana tata ruang	55	persen		55,00	100,00 %	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			137.500.000	17.478.400		12,71 %	89,03 %
		Persentase luas tanah terkena pembangunan untuk kepentingan umum yang terselesaikan dokumen administrasinya	90	persen		91,57	101,74 %	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			262.500.000	242.400.000		92,34 %	-9,01 %
		Persentase luas konsolidasi tanah yang terselesaikan	60	persen		50,00	83,33 %	

4. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			20.872.296.020	19.793.990.394		94,83 %	35,17 %
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	30	nilai		39,00	130,00 %	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			1.410.222.000	1.251.098.508		88,72 %	16,13 %
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/kab/kota yang memperoleh	100	Persen		100,00	100,00 %	

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi	
		fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)							
		Rata-rata persentase pelayanan penyediaan perumahan layak	76.52	Persen		87,65	Plt. KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	114,55 %	
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	Persen		100,00	Plt. KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100,00 %	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				686.207.000	453.924.071		66,15 %	182,29 %
		Presentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani	18.91	Persen		64,59	Plt. KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	341,57 %	
		Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	11.1	Persen		17,24	Plt. KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	155,32 %	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				1.809.991.000	1.758.416.300		97,15 %	203,73 %
		Presentase PSU dalam kondisi baik	25	Persen		75,22	Plt. KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	300,88 %	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				195.000.000	182.917.800		93,80 %	6,20 %
		Presentase dokumen perencanaan Lingkungan hidup yang disusun sesuai standar	100	Persen		100,00	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	100,00 %	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				575.882.000	554.824.238		96,34 %	76,20 %
		Persentase hasil uji kualitas udara yang memenuhi baku mutu	87.54	Persen		100,00	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	114,23 %	
		Persentase hasil uji kualitas air yang memenuhi baku mutu	8.33	Persen		19,23	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN	230,85 %	

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
							PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				2.394.569.630	2.105.823.909		87,94 %	10,77 %
		Persentase ruang terbuka hijau	8.1128	Persen		8,01	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU	98,71 %	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				4.999.830	4.656.000		93,12 %	51,65 %
		Persentase pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3	55.26	Persen		80,00	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU	144,77 %	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				20.000.000	15.696.200		78,48 %	25,33 %
		Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap persetujuan lingkungan	79.87	Persen		82,91	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	103,81 %	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				327.199.000	261.031.931		79,78 %	85,80 %
		persentase kelompok masyarakat aktif melakukan pengelolaan lingkungan hidup	54	Persen		89,41	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	165,57 %	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				145.000.000	124.255.755		85,69 %	-2,75 %

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi	
		Presentase penerimaan penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi	87,5	Persen		72,58	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	82,95 %	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				20.000.000	15.715.119		78,58 %	21,42 %
		Presentase tindaklanjut Pengaduan masyarakat terkait PPLH	100	Persen		100,00	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	100,00 %	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				11.446.640.560	10.714.055.882		93,60 %	-8,94 %
		Persentase penanganan sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah)	71	Persen		49,32	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU	69,46 %	
		Persentase pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah/reduce, pemanfaatan sampah/reuse, daur ulang/recycled) dari sumber sampah	28	Persen		27,96	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU	99,86 %	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				20.000.000	18.313.000		91,57 %	24,44 %
		persentase tutupan lahan tahura	24,87	Persen		28,85	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	116,00 %	

5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.348.194.310	7.907.351.563		94,72 %	-10,21 %
		Nilai hasil evaluasi kematangan kelembagaan Perangkat Daerah sejumlah 11 variabel sesuai PMDN No. 99 Tahun 2018	35,5	nilai		30,00	SEKRETARIS	84,51 %	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				5.149.394.300	4.777.541.537		92,78 %	18,20 %
		Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas	100	Persen		100,00	KABID TIBUM DAN TRANMAS	100,00 %	
		Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Yang terselesaikan	82	Persen		100,00	KABID PENEGAKAN PERDA	121,95 %	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				2.720.779.200	2.619.544.977		96,28 %	-39,28 %
		Persentase Penanganan kebakaran yang terlayani dalam Tingkat waktu tanggap (response time rate)	100	Persen		57,00	KABID LINMAS DAN DAMKAR	57,00 %	
		Persentase ketercapaian SPM Damkar	100	Persen		57,00	KABID LINMAS DAN DAMKAR	57,00 %	

6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.153.483.065	6.746.899.198		94,32 %	5,68 %
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	36	Persen		36,00	SEKRETARIS BPBD KABUPATEN KUDUS	100,00 %	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				4.322.340.935	4.080.890.107		94,41 %	42,99 %

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
		Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100	Persen	100,00	KEPALA BIDANG REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI	100,00 %	
		Persentase penanganan darurat kebencanaan	100	Persen	100,00	KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	100,00 %	
		Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana	100	Persen	100,00	KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	100,00 %	
		Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana di Wilayah Rawan Bencana	100	Persen	100,00	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	100,00 %	
		Persentase Desa Tangguh Bencana	17.42	Persen	50,00	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	287,03 %	

7. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.029.093.557	7.058.726.093		87,91 %	-7,48 %
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	46	nilai	37,00	SEKRETARIS	80,43 %	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			306.050.000	269.844.389		88,17 %	11,83 %
		Persentase PSKS yang aktif dalam Penangan PPKS	85	persen	85,00	KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN SOSIAL DAN KELUARGA MISKIN	100,00 %	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			2.427.313.660	2.257.283.543		93,00 %	7,00 %
		Persentase penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial (SPM)	100	persen	100,00	KOORDINATOR BIDANG PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DAN BANTUAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL	100,00 %	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			57.503.882.600	56.597.890.669		98,42 %	1,58 %

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	89persen		89,00	KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN SOSIAL DAN KELUARGA MISKIN	100,00 %	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			302.210.200	201.354.500		66,63 %	33,37 %
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (SPM)	100persen		100,00	KOORDINATOR BIDANG PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DAN BANTUAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL	100,00 %	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			25.000.000	5.155.150		20,62 %	79,38 %
		Persentase pemeliharaan TMP yang sesuai standar	100persen		100,00	KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN SOSIAL DAN KELUARGA MISKIN	100,00 %	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			204.930.900	71.983.107		35,13 %	66,44 %
		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja Langsung APBD	42persen		43,00	KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	102,38 %	
		Persentase Perempuan yang bekerja	93.3persen		94,00	KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	100,75 %	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			33.894.660	21.025.250		62,03 %	37,97 %
		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	100persen		100,00	KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	100,00 %	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			9.999.000	6.896.000		68,97 %	31,03 %
		Persentase Data SIGA yang tervalidasi	100persen		100,00	KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	100,00 %	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			292.953.270	205.437.900		70,13 %	29,87 %

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
		Persentase Forum Anak yang aktif	62persen		62,00	KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	100,00 %	
		Persentasi Fasilitas layanan Publik Ramah Anak	20persen		20,00	KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	100,00 %	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			61.979.000	55.334.500		89,28 %	10,72 %
		Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	100persen		100,00	KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	100,00 %	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			368.600.000	147.937.620		40,14 %	56,81 %
		Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	45persen		40,00	KOORDINATOR BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	88,89 %	
		Rata-rata usia kawin pertama wanita	20tahun		21,00	KOORDINATOR BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	105,00 %	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			2.315.401.000	1.420.490.554		61,35 %	15,96 %
		Cakupan PUS yang ber-KB Aktif	72.62persen		71,18	KOORDINATOR BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	98,02 %	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need)	13.85persen		6,09	KOORDINATOR BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	43,97 %	
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	15.4persen		13,85	KOORDINATOR BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	89,94 %	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			4.455.200.000	4.169.067.418		93,58 %	6,42 %
		Persentase Kecamatan yang memiliki UPPKS Aktif	100Persen		100,00	KOORDINATOR BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	100,00 %	

8. DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.795.614.662	9.049.429.105		92,38 %	-1,27 %
		Nilai Kematangan OPD	45		41,00	Plt. SEKRETARIS DINAS	91,11 %	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			20.000.000	19.536.270		97,68 %	84,82 %
		Persentase perusahaan yang melaksanakan kegiatan mengacu ke rencana tenaga kerja	0,4		0,73	KEPALA BIDANG PENEMPATAN, PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	182,50 %	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			4.522.250.000	4.339.973.748		95,97 %	63,95 %
		Presentase Kebekerjaan Lulusan Pelatihan	35		75,00	KEPALA BIDANG PENEMPATAN, PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	214,29 %	
		Presentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	18		19,00	KEPALA BIDANG PENEMPATAN, PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	105,56 %	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			259.999.000	253.878.275		97,65 %	54,05 %
		Presentase pencari kerja yang ditempatkan	50		75,85	KEPALA BIDANG PENEMPATAN, PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	151,70 %	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			104.000.000	103.722.000		99,73 %	0,27 %
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	17		17,00	KABID HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSELISIHAN KETENAGAKERJAAN	100,00 %	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			50.000.000	48.702.000		97,40 %	14,20 %
		Presentase koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	5		5,58	KEPALA BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	111,60 %	

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			100.000.000	98.301.300		98,30 %	31,20 %
		Persentase SDM Pengelola Koperasi yang mempunyai kompetensi	20persen		25,90	KEPALA BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	129,50 %	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			299.999.360	277.337.660		92,45 %	7,55 %
		Persentase pelaku usaha Mikro yang meningkat kapasitas SDMnya	33persen		33,00	KEPALA BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	100,00 %	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			349.999.590	339.286.115		96,94 %	3,06 %
		Persentase Usaha mikro yang meningkat produksinya	22persen		22,00	KEPALA BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	100,00 %	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			13.758.316.200	10.971.341.665		79,74 %	20,41 %
		Persentase usaha industri yang mempunyai produk dan jasa terstandarisasi (SNI/ GMP/ ISO/ HACCP/ Halal)	4.5Persen		4,51	KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN	100,15 %	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA			5.000.000	4.236.400		84,73 %	15,50 %
		Persentase IKM yang mempunyai izin Usaha industri	8.4Persen		8,42	KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN	100,23 %	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			2.500.000	2.309.000		92,36 %	8,17 %
		Persentase Industri yang Menyampaikan informasi industri di SIINAS yang lengkap dan terkini	3.8Persen		3,82	KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN	100,53 %	

9. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.142.408.800	4.783.037.232		93,01 %	-1,90 %	
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	45	indeks		41,00	SEKRETARIS	91,11 %	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			2.175.900.700	2.073.726.889		95,30 %	6,18 %	
		Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	89	Persen		90,32	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	101,48 %	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			826.702.000	813.456.926		98,40 %	-11,57 %	
		Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100	Persen		86,83	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	86,83 %	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			745.234.500	689.974.138		92,58 %	7,42 %	
		Persentase ketersediaan data kependudukan skala kabupaten yang mutakhir sesuai standar	100	Persen		100,00	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	100,00 %	

10. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.055.107.608	5.811.359.588		95,97 %	-2,79 %	
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	44	Nilai		41,00	SEKRETARIS	93,18 %	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA			3.288.201.000	3.205.640.627		97,49 %	2,51 %	
		Prosentase desa yang tertata	2	Persen		2,00	KEPALA BIDANG KEUANGAN DAN ASET DESA	100,00 %	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			115.000.000	101.802.382		88,52 %	-8,52 %	

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
		Persentase desa yang meningkat PADesa yang bersumber dari Kerjasama Desa	10		8,00	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA	80,00 %	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			2.583.462.900	2.500.224.831		96,78 %	3,22 %
		nilai rata-rata variabel penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas pemerintah desa dalam IPPD	115		115,00	KEPALA BIDANG KEUANGAN DAN ASET DESA	100,00 %	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			843.173.020	738.104.639		87,54 %	12,46 %
		nilai variabel kelembagaan masyarakat desa	33		33,00	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	100,00 %	

11. DINAS PERHUBUNGAN

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			16.254.721.695	15.424.069.882		94,89 %	58,96 %
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD))	24.05		37,00	SEKRETARIS	153,85 %	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			63.713.979.470	62.959.119.679		98,82 %	-0,98 %
		Persentase Terpenuhinya Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Wajib Uji	87.69		87,69	KEPALA BIDANG KESELAMATAN DAN SARANA PRASARANA LLAJ	100,00 %	
		Persentase Perlengkapan Jalan Dalam Kondisi Baik	79		79,00	KEPALA BIDANG KESELAMATAN DAN SARANA PRASARANA LLAJ	100,00 %	
		Cakupan Rekayasa Lalu Lintas Pada Titik Kemacetan	100		100,00	KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	100,00 %	
		Persentase Fasilitas Perhubungan Dalam Kondisi Baik	81		74,00	Ka. UPTD PENGELOLAAN PERPARKIRAN DAN TERMINAL	91,36 %	

12. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12.750.025.398	12.200.172.903		95,69 %	-4,99 %
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	43 nilai		39,00	SEKRETARIS	90,70 %	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			9.738.525.680	9.533.474.958		97,89 %	4,18 %
		Nilai Survey Kepuasan Publik	82 nilai		83,70	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI	102,07 %	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			2.786.425.600	2.488.335.807		89,30 %	-0,67 %
		Nilai SPBE domain tata kelola	4.4 nilai		3,90	KEPALA BIDANG INFORMATIKA	88,64 %	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			90.600.000	73.782.062		81,44 %	21,42 %
		Indeks Pembangunan Statistik	2.8 indeks		2,88	KEPALA BIDANG INFORMATIKA	102,86 %	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			434.803.000	408.184.022		93,88 %	6,12 %
		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	324 indeks		324,00	KEPALA BIDANG INFORMATIKA	100,00 %	

13. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.746.830.940	5.513.375.565		95,94 %	4,06 %
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	39 Nilai		39,00	SEKRETARIS	100,00 %	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			175.425.000	162.141.815		92,43 %	7,57 %
		Prosentase Investor yang mendapat dukungan kemudahan investasi	50 persen		50,00	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA (KOORDINATOR PENANAMAN MODAL)	100,00 %	

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			181.820.550	128.217.800		70,52 %	29,48 %
		Persentase calon investor yang merealisasikan potensi investasi	10persen		10,00	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA (KOORDINATOR PENANAMAN MODAL)	100,00 %	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			275.007.454	266.112.977		96,77 %	-5,02 %
		IKM atas pelayanan perizinan	96indeks		88,08	KEPALA BIDANG	91,75 %	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			641.286.000	483.275.376		75,36 %	-34,03 %
		Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	75persen		31,00	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA (KOORDINATOR PENANAMAN MODAL)	41,33 %	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			78.509.000	77.880.000		99,20 %	9,50 %
		Prosentase perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi	92persen		100,00	KEPALA BIDANG	108,70 %	

14. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11.283.089.650	10.353.202.935		91,76 %	3,36 %
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	41Nilai		39,00	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	95,12 %	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			2.578.211.060	2.530.651.440		98,16 %	4,22 %
		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	78Persentase		79,85	Kepala Bidang Kebudayaan	102,37 %	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			331.335.185	325.337.270		98,19 %	15,67 %
		Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	70Persentase		79,70	Kepala Bidang Kebudayaan	113,86 %	

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			2.185.579.871	2.148.323.085		98,30 %	-79,30 %	
		Persentase Kenaikan jumlah kunjungan museum	10	Persentase		1,90	Kepala Bidang Kebudayaan	19,00 %	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			2.325.817.552	2.249.023.900		96,70 %	160,44 %	
		Destinasi Pariwisata yang Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatanya	7	Objek		18,00	Kepala Bidang Pariwisata	257,14 %	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			816.000.000	802.418.190		98,34 %	7,18 %	
		Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan	84	Prosentase		88,63	Kepala Bidang Pariwisata	105,51 %	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			482.800.000	468.226.250		96,98 %	36,35 %	
		Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	18	Persentase		24,00	Kepala Bidang Pariwisata	133,33 %	

15. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.480.544.130	4.895.902.099		89,33 %	5,26 %	
		Nilai Kematangan organisasi Perangkat daerah	37	Nilai		35,00		94,59 %	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			1.557.335.800	1.417.959.098		91,05 %	232,44 %	
		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	24.73	nilai		80,00	Kepala Bidang Perpustakaan	323,49 %	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			347.721.950	341.445.798		98,20 %	4,00 %	
		persentase arsip perangkat daerah dan BUMD yang terselamatkan	34.9	persen		36,43		104,38 %	
		persentase perangkat daerah dan BUMD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	57.89	persen		57,89	Kepala Bidang Kearsipan	100,00 %	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			10.736.000	10.684.000		99,52 %	9,23 %	

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi	
		persentase arsip perangkat daerah dan BUMD yang terselamatkan	33.5	persen		36,43	Kepala Bidang Kearsipan	108,75 %	

16. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			16.404.122.000	15.093.675.048		92,01 %	7,99 %
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	40	nilai	40,00	SEKRETARIS DINAS	100,00 %	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			35.691.000	33.774.000		94,63 %	18,68 %
		Persentase Kelompok lumbung pangan yang berdaya	65.22	Persen	73,90	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	113,31 %	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			480.249.000	472.789.900		98,45 %	15,38 %
		Persentase ketersediaan pangan utama	100	Persen	113,83	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	113,83 %	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			120.420.000	104.249.500		86,57 %	-27,89 %
		Persentase daerah rawan pangan	12.9	Persen	7,57	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	58,68 %	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			75.000.000	73.076.200		97,43 %	-2,78 %
		Persentase pangan segar aman konsumsi	88	Persen	83,30	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	94,66 %	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			72.508.000	65.378.000		90,17 %	13,11 %
		Persentase nelayan yang berdaya	96.83	Persen	100,00	Kepala Bidang Perikanan	103,27 %	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			878.021.000	809.471.875		92,19 %	6,24 %
		Persentase pembudidaya perikanan yang berdaya	98.46	Persen	96,92	Kepala Bidang Perikanan	98,44 %	

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			60.798.000	56.116.920		92,30 %	1,02 %
		Persentase pengolah hasil perikanan yang berdaya	98,91	Persen		92,30	Kepala Bidang Perikanan	93,32 %
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			2.115.630.000	2.059.055.500		97,33 %	18,96 %
		persentase penyediaan sarana pertanian yang memadai	84,68	persen		98,47	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan	116,28 %
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			2.205.000.000	2.174.455.700		98,61 %	1,71 %
		persentase prasarana pertanian kondisi baik	70,76	persen		70,99	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan	100,33 %
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			225.049.000	209.925.000		93,28 %	6,72 %
		Persentase hewan terserang penyakit yang tertangani	100	Persen		100,00	Kepala Bidang Peternakan	100,00 %
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			150.000.000	142.145.850		94,76 %	12,22 %
		Persentase luas lahan pertanian bebas serangan Hama/Penyakit	87	Persen		93,08	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan	106,99 %
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			1.930.229.000	1.752.653.675		90,80 %	26,09 %
		Persentase kelompok tani yang berdaya	20,63	Persen		25,52	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan	123,70 %
		persentase kelompok ternak yang berdaya	16,26	Persen		17,90	Kepala Bidang Peternakan	110,09 %

17. DINAS PERDAGANGAN

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			18.956.583.308	15.986.124.721		84,33 %	29,96 %

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
		Nilai KOPD	35	Nilai	40,00	Plt. SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN	114,29 %	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			10.000.000	6.132.650		61,33 %	26,39 %
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	70	Persen	61,40	KEPALA BIDANG FASILITASI PERDAGANGAN, PROMOSI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	87,71 %	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			12.724.651.480	12.069.983.802		94,86 %	3,52 %
		Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi baik	80	Persen	78,70	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PASAR	98,38 %	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			139.768.040	135.124.900		96,68 %	-1,74 %
		Persentase bahan pokok penting yang harganya stabil	79	Persen	75,00	KEPALA BIDANG FASILITASI PERDAGANGAN, PROMOSI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	94,94 %	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			221.123.000	204.278.586		92,38 %	-25,72 %
		Persentase Pertumbuhan Ekspor	0.15	Persen	0,10	KEPALA BIDANG FASILITASI PERDAGANGAN, PROMOSI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	66,67 %	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			69.336.000	34.540.359		49,82 %	51,56 %
		Persentase peralatan UTTP yang terstandardisasi	94	Persen	95,29	KEPALA BIDANG FASILITASI PERDAGANGAN, PROMOSI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	101,37 %	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			692.230.350	640.562.362		92,54 %	7,46 %
		Persentase produk lokal yang meningkat Kapasitas pemasarannya	5	Persen	5,00	KEPALA BIDANG PEDAGANG KAKI LIMA	100,00 %	

18. SEKRETARIAT DAERAH

No Rekening	Program	Anggaran	Capaian Anggaran Bulan Desember Tahun 2024	Persentase Capaian Anggaran
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.280.393.096	47.680.111.211	92,98%
4.1.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	90.623.068.890	87.345.324.391	96,38%
4.1.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.075.578.020	1.898.921.655	91,49%

19. SEKRETARIAT DPRD

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			61.498.184.600	56.544.606.308		91,95 %	26,24 %
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	33	Nilai	39,00	KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS	118,18 %	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			35.956.672.400	25.020.042.619		69,58 %	23,42 %
		Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD Yang Disahkan	100	Persen	86,00	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	86,00 %	
		Persentase Ranperda Yang Dibahas Sesuai Standar	100	Persen	100,00	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	100,00 %	

20. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.940.353.760	7.475.383.454		94,14 %	-10,81 %
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bappeda)	48	Nilai	40,00	KEPALA BIDANG PRASARANA WILAYAH, EKONOMI, SDA	83,33 %	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			3.555.011.070	3.152.670.937		88,68 %	11,32 %

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
		Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Daerah	100	persen	100,00	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	100,00 %	
		Tingkat Capaian Hasil Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	persen	100,00	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	100,00 %	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1.073.896.000	897.162.802	83,54 %	16,46 %
		Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	persen	100,00	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	100,00 %	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				728.643.200	678.155.756	93,07 %	6,93 %
		Persentase hasil penelitian pengembangan diseminarkan/dipublikasikan	20	persen	20,00	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	100,00 %	

21. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				23.220.905.050	20.925.974.247	90,12 %	9,88 %
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	38	Indeks	38,00	SEKRETARIS	100,00 %	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				315.377.151.190	308.779.405.236	97,91 %	-7,07 %
		Selisih Laporan Keuangan Audit dan Laporan Keuangan Unaudit	2	Persen	1,45	KEPALA BIDANG AKUNTANSI	72,50 %	
		Indeks Penganggaran Daerah	100	Indeks	100,00	KEPALA BIDANG ANGGARAN	100,00 %	
		Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	2.75	Persen	2,75	Pt. KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	100,00 %	

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			2.908.258.700	2.059.104.618		70,80 %	29,20 %
		Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai Peraturan yang berlaku	100	Persen		100,00	100,00 %	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			2.348.698.650	2.133.483.591		90,84 %	-51,68 %
		Peningkatan PAD	110139072000	Rupiah		43.131.463.055,00	39,16 %	

22. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.990.263.570	8.684.916.442		96,60 %	-13,27 %
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	48	nilai		40,00	83,33 %	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			4.287.382.170	3.386.838.482		79,00 %	17,01 %
		Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Mutasi dan Promosi	0,074	indeks		0,07	100,00 %	
		Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	0,2	indeks		0,20	97,50 %	
		Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengembangan Kompetensi Aparatur	0,0988	indeks		0,10	99,19 %	
		Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0,221	indeks		0,19	87,33 %	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			2.521.800.000	2.089.581.071		82,86 %	13,69 %

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
		Indeks Dimensi Kompetensi IP ASN	29	indeks	28,00	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR	96,55 %	

23. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.526.945.700	4.229.713.002		93,43 %	12,28 %
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	35	Nilai	37,00	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	105,71 %	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			1.526.016.180	1.481.836.740		97,10 %	2,90 %
		Persentase Potensi Gangguan Keamanan Dari Kelompok Radikal Yang Tertangani	100	Persen	100,00	KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA	100,00 %	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			32.433.115.033	32.349.007.730		99,74 %	-4,59 %
		Persentase Pendidikan Politik Masyarakat	100	Persen	95,15	KABID POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	95,15 %	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			222.650.000	197.147.500		88,55 %	11,45 %
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif	100	Persen	100,00	KABID POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	100,00 %	

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			429.713.000	411.825.450		95,84 %	4,16 %
		Persentase Potensi Konflik SARA Yang Tertangani	100	Persen		100,00	100,00 %	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			276.908.000	270.891.727		97,83 %	2,17 %
		Persentase Potensi Konflik Sosial Yang Tertangani	100	Persen		100,00	100,00 %	

24.INSPEKTORAT DAERAH

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.491.628.000	9.736.613.088		92,80 %	10,05 %
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	35	Nilai		36,00	102,86 %	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			754.905.150	377.865.719		50,05 %	49,95 %
		Persentase Tindak lanjut Rekomendasi hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	86	Persen		86,00	100,00 %	
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti	70	Persen		70,00	100,00 %	
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas keuangan yang selesai ditindaklanjuti	70	Persen		70,00	100,00 %	
		Persentase pengaduan yang ditangani sesuai standart	100	persen		100,00	100,00 %	

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			864.868.850	604.002.739		69,84 %	28,70 %
		Indeks integritas	78	Nilai	75,77	INSPEKTUR PEMBANTU II	97,14 %	
		Nilai MCP (Monitoring Center Prevention)	93	persen	92,93	INSPEKTUR PEMBANTU II	99,92 %	

25. RSUD DR. LOEKMONO HADI

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			263.318.022.130	241.140.211.970		91,58 %	-2,22 %
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	47	Nilai	42,00	Kepala Bagian Keuangan	89,36 %	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			56.967.591.522	52.849.045.214		92,77 %	7,08 %
		Prosentase Sarana Prasarana sesuai Standart	86.2	Persen	86,07	Kepala Bagian Keuangan	99,85 %	

26. KECAMATAN KOTA KUDUS

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.411.784.300	13.578.701.330		94,22 %	22,92 %
		Nilai Kematangan Organisasi	35	nilai	41,00	Sekretaris Kecamatan	117,14 %	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			72.612.000	64.527.000		88,87 %	9,94 %
		Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan	92.2	angka	90,00	CAMAT KOTA KUDUS	97,61 %	
		Nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	74	angka	74,00		100,00 %	

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			126.540.000	113.810.000		89,94 %	21,17 %
		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	90	persen	100,00	CAMAT KOTA KUDUS	111,11 %	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			127.865.450	114.543.090		89,58 %	10,42 %
		Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	100	persen	100,00	CAMAT KOTA KUDUS	100,00 %	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			18.993.000	14.997.000		78,96 %	21,04 %
		Persentase Konflik yang tertangani	77	persen	77,00	CAMAT KOTA KUDUS	100,00 %	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			60.409.000	59.589.000		98,64 %	6,62 %
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemdes	95	persen	100,00	CAMAT KOTA KUDUS	105,26 %	

27. KECAMATAN KALIWUNGU

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.740.673.000	3.402.496.286		90,96 %	14,04 %
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	40	Nilai	42,00	sekretaris camat	105,00 %	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			24.951.000	22.381.000		89,70 %	8,40 %
		Presentase Kepuasan Layanan Kecamatan	91	persen	90,00	Camat	98,90 %	
		Persentase dukungan SPM bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, bidang Pekerjaan Umum, bidang Perumahan Rakyat dan bidang Sosial yang terealisasi	74	persen	72,00	Camat	97,30 %	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			246.904.000	231.799.750		93,88 %	2,71 %

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa	88		85,00	Camat	96,59 %	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			183.823.000	181.944.250		98,98 %	1,02 %
		Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	100		100,00	Camat	100,00 %	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			162.345.000	152.474.000		93,92 %	3,12 %
		Persentase Konflik yang tertangani	87		85,00	Camat	97,70 %	
		Persentase layanan kecamatan sesuai	83		80,00	Camat	96,39 %	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			196.463.000	186.397.750		94,88 %	-0,14 %
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	95		90,00	Camat	94,74 %	

28. KECAMATAN JATI

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.902.750.560	3.770.265.204		96,61 %	-3,13 %
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Jati)	46		43,00	SEKRETARIS KECAMATAN	93,48 %	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			89.988.850	69.614.500		77,36 %	22,98 %
		Nilai kepuasan dukungan SPM kecuali Trantibum	74		75,00	CAMAT	101,35 %	
		Nilai kepuasan layanan Kecamatan	86		86,00	CAMAT	100,00 %	
		Persentase dukungan SPM Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Sosial yang Terealisasi	83		83,00		100,00 %	
		Persentase Layanan Kecamatan Sesuai Standar	85		85,00		100,00 %	

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			156.683.910	149.179.410		95,21 %	4,79 %
		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat Desa	92	Persen		92,00	CAMAT	100,00 %
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			104.884.126	112.366.987		107,13 %	-7,13 %
		Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	100	Persen		100,00	CAMAT	100,00 %
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			141.986.000	141.777.500		99,85 %	8,84 %
		Persentase Konflik yang Tertangani	92	Persen		100,00	CAMAT	108,70 %
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			95.865.550	87.954.540		91,75 %	13,52 %
		Cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	95	Persen		100,00	CAMAT	105,26 %

29. KECAMATAN UNDAAN

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.809.610.666	3.635.728.264		95,44 %	7,06 %
		Nilai Kematangan OPD	40	Nilai		41,00	SEKRETARIS KECAMATAN	102,50 %
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			57.951.250	55.014.700		94,93 %	7,65 %
		Persentase Kepuasan Layanan Kecamatan	90.3	Persentase		94,97	CAMAT UNDAAN	105,17 %
		Persentase Dukungan SPM bidang pendidikan, kesehatan, pu, perumahan rakyat dan sosial (kecuali trantibum) yang terealisasi	74	Persentase		74,00	CAMAT UNDAAN	100,00 %

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			173.921.770	170.311.450		97,92 %	-2,18 %
		Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki Kelompok Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif	94	Persentase		90,00	CAMAT UNDAAN	95,74 %
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			95.804.400	94.534.654		98,67 %	1,33 %
		Persentase dukungan SPM bidang Trantibum dan Kebencanaan yang terealisasi	100	Persentase		100,00	CAMAT UNDAAN	100,00 %
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			87.979.880	87.893.500		99,90 %	0,10 %
		Persentase Konflik yang tertangani	95	Persentase		95,00	CAMAT UNDAAN	100,00 %
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			147.908.890	145.711.700		98,51 %	1,49 %
		Persentase Desa Tertib Administrasi	92	Persentase		92,00	CAMAT UNDAAN	100,00 %

30. KECAMATAN MEJOB

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.879.326.206	3.728.512.097		96,11 %	6,33 %
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	41	Nilai		42,00	SEKRETARIS KECAMATAN	102,44 %
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			118.631.660	79.483.200		67,00 %	33,17 %
		Persentase Dukungan SPM bidang pendidikan, kesehatan, pu, perumahan rakyat dan sosial (kecuali trantibum) yang terealisasi	74	persen		74,00	CAMAT MEJOB	100,00 %

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
		Persentase Layanan Kecamatan Sesuai Standar	92		92,31	CAMAT MEJOB	100,34 %	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			111.654.840	90.348.000		80,92 %	19,08 %
		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa	92		92,00	CAMAT MEJOB	100,00 %	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			99.684.800	90.593.500		90,88 %	9,12 %
		Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	100		100,00	CAMAT MEJOB	100,00 %	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			70.200.000	66.492.000		94,72 %	5,28 %
		Persentase Konflik yang tertangani	87		87,00	CAMAT MEJOB	100,00 %	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			64.099.000	61.376.000		95,75 %	4,25 %
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pempdes	95		95,00	CAMAT MEJOB	100,00 %	

31. KECAMATAN JEKULO

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.002.952.711	3.858.726.595		96,40 %	-3,06 %
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	45		42,00	SEKRETARIS KECAMATAN	93,33 %	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			58.516.500	51.102.200		87,33 %	13,42 %
		Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan	90,5		91,18	CAMAT JEKULO	100,75 %	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			54.499.330	43.208.175		79,28 %	8,63 %
		Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	91		80,00	CAMAT JEKULO	87,91 %	

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			109.420.700	102.527.646		93,70 %	-8,70 %
		Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	100	persen	85,00	CAMAT JEKULO	85,00 %	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			84.999.540	80.021.500		94,14 %	5,86 %
		Persentase Konflik yang tertangani	77	persen	77,00	CAMAT JEKULO	100,00 %	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			27.782.000	24.066.250		86,63 %	13,37 %
		Persentase Desa Tertib Administrasi	95	persen	95,00	CAMAT JEKULO	100,00 %	

32. KECAMATAN BAE

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.334.726.870	3.163.687.066		94,87 %	10,26 %
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bae)	39	Nilai	41,00	SEKRETARIS KECAMATAN	105,13 %	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			58.602.850	50.298.374		85,83 %	14,17 %
		Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan	100	persen	100,00	CAMAT BAE	100,00 %	
		Nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali bidang Trantibum	100	Persen	100,00		100,00 %	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			115.678.380	93.828.000		81,11 %	18,89 %
		Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10	desa	10,00	CAMAT BAE	100,00 %	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			115.077.660	90.945.129		79,03 %	20,97 %
		Persentase dukungan SPM Bidang Trantib Umum dan kebencanaan yang terealisasi	10	desa	10,00	CAMAT BAE	100,00 %	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			67.044.000	64.404.000		96,06 %	3,94 %

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
		Persentase Konflik yang tertangani	10		10,00	CAMAT BAE	100,00 %	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			52.979.000	45.215.000		85,35 %	14,65 %
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	10		10,00	CAMAT BAE	100,00 %	

33. KECAMATAN GEBOG

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.750.970.118	3.535.861.498		94,27 %	1,19 %
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	44		42,00	SEKRETARIS CAMAT	95,45 %	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			85.024.360	79.808.500		93,87 %	13,76 %
		Nilai Kepuasan dukungan SPM Kecuali bidang Trantib	85		90,00	CAMAT GEBOG	105,88 %	
		Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan	80		87,50	CAMAT GEBOG	109,38 %	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			114.400.910	106.000.300		92,66 %	33,41 %
		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa	75		94,55	CAMAT GEBOG	126,07 %	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			51.375.470	39.481.001		76,85 %	23,15 %
		Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	100		100,00	CAMAT GEBOG	100,00 %	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			71.846.870	60.473.300		84,17 %	45,70 %
		Persentase Konflik yang tertangani	77		100,00	CAMAT GEBOG	129,87 %	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			34.449.090	32.425.400		94,13 %	5,87 %
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	100		100,00	CAMAT GEBOG	100,00 %	

34. KECAMATAN DAWU

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.133.951.282	3.967.014.145		95,96 %	-0,61 %
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	43	Nilai	41,00	SEKRETARIS KECAMATAN	95,35 %	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			102.770.900	93.222.050		90,71 %	8,05 %
		Presentase Kepuasan Layanan Kecamatan (melalui survey pelayanan di kecamatan)	100	persen	97,51	Plt. CAMAT	97,51 %	
		Nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecamatan Kecuali bidang Trantibbum	100	Persen	100,00		100,00 %	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			223.093.720	196.938.850		88,28 %	11,72 %
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terealisasi	5	kegiatan	5,00	Plt. CAMAT	100,00 %	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			182.869.190	168.323.031		92,05 %	7,95 %
		Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	100	persen	100,00	Plt. CAMAT	100,00 %	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			74.034.880	60.033.600		81,09 %	18,91 %
		Persentase Konflik yang Tertangani	92	persen	92,00	Plt. CAMAT	100,00 %	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			202.021.000	175.595.750		86,92 %	13,08 %
		Cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	95	persen	95,00	Plt. CAMAT	100,00 %	

Efisiensi penggunaan anggaran dapat kita lihat dengan memperbandingkan capaian kinerja sasaran dan realisasi anggaran, Tahun 2023 Realisasi Anggaran sebesar 91,18%, dengan demikian maka katagori pelaksanaan anggaran adalah Efisien sebesar 8,82%. Dimana Capaian Kinerja sasaran rata-rata mencapai diatas Realisasi anggaran.

PENGHARGAAN YANG DIRAIH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

NO	TANGGAL	PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	FOTO
1	26 Februari 2024	Piagam Penghargaan Peringkat 3 Realisasi Investasi Jawa Tengah	Pj. Gubernur Jawa Tengah	
2	27 Februari 2024	TOP 5 KIPP Jawa Tengah	Kementerian PANRB	
3	05 Maret 2024	Adipura	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKHK)	
4	24 April 2024	Implementasi Integrasi SIASN-SIMPEG Terbaik	Kanreg I BKN Yogyakarta	
5	30 April 2024	Juara II Lomba Kreasi Olahan Pangan	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	
6	22-May-24	Opini WTP ke 12 kali berturut-turut	BPK RI	

NO	TANGGAL	PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	FOTO
7	27 Mei 2024	Digital Government Award dengan Indeks SPBE Tertinggi kategori Pemerintah Kabupaten	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	
8	12 Juni 2024	Juara 3 Lomba Inovasi Digital TP2DD 2023	Bank Indonesia	
9	23 Juni 2024	Juara Stand Terbaik KaTa Kreatif	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	
10	28 Juni 2024	Radar Award kategori "Kepala Daerah Inspiratif Penggerak Pendidikan"	Jawa Pos	
11	11 Juli 2024	Program Pariwara Antikorupsi 2024	Komisi Pemberantasan Korupsi	

NO	TANGGAL	PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	FOTO
12	08 Agustus 2024	Universal Health Coverage (UHC) kategori Madya	Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI	
13	14 Agustus 2024	Best Integrity Implementation Award Outstanding Transparency Financial Management Smart Village Accelerator	CNN Indonesia	
14	15 Agustus 2024	Satuan Kinerja Terbaik Pengelolaan DAK Fisik	KPPN	
15	5 September 2024	Sertifikat Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, Malaria	Ketua Umum Adinkes	
16	07 September 2024	Wahana Tata Nugraha (WTN) 2024	Kementerian Perhubungan	
17	24 September 2024	Sertifikasi Akreditasi Perpustakaan nasional bagi 10 sekolah akreditasi A dan B	Perpustakaan Nasional RI	

NO	TANGGAL	PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	FOTO
18	6 Desember 2024	Satria Brand Award kategori Kepala Daerah Inovatif di bidang Inovasi dan Transformasi Birokrasi	Suara Merdeka Network	
19	17 Desember 2024	Anugerah Kebudayaan Indonesia kategori Pemerintah Daerah	Kementerian Kebudayaan RI	

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Prinsip Keuangan Negara menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Tugas Pembantuan mempunyai peran strategis untuk melaksanakan tiga fungsi ekonomi Pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan bagian dari APBN yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga. Pada umumnya sering muncul pertanyaan terkait adanya kegiatan yang bersumber dari APBN berupa Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Hal ini disebabkan penulisan nomenklatur Dekonsentrasi selalu dibarengi dengan Tugas Pembantuan.

Pemerintah Kabupaten Kudus pada Tahun 2024 tidak menerima alokasi Tugas Pembantuan APBN maupun APBD Provinsi (NIHIL), sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.
Tugas Pembantuan dan Penugasan yang Diterima Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2024

NO	K/L	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
- NIHIL -											

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pendidikan di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus. Jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan pada Urusan Pendidikan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, meliputi :

- a. Pendidikan Dasar;
- b. Pendidikan Kesetaraan;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pelaksanaan target pemenuhan SPM pada Urusan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Capaian SPM Urusan Pendidikan

	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100% (26.804)	1 Tahun
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100 % (126.373)	1 Tahun
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100% (2.858)	1 Tahun

4.1.3 Realisasi

Realisasi SPM pada Urusan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut :

Tabel 4.2
Realisasi SPM Urusan Pendidikan

	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100% (26.804)	1 Tahun	95,99% (25.730)
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100 % (126.373)	1 Tahun	99,29 % (12.5475)
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100% (2.858)	1 Tahun	65,54% (1.873)

Pada Tahun 2024, capaian layanan Pendidikan Anak Usia Dini untuk usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD mencapai 95,99%. Hal ini menunjukkan peningkatan capaian dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 93,62%.

Capaian layanan Pendidikan Dasar untuk usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs) pada Tahun 2024 mencapai 99,29 % sedikit turun dari capaian Tahun 2023 yang berada di angka 99,91%.

Capaian layanan Pendidikan Kesetaraan pada usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan pada tahun 2024 mencapai 65,54%. Capaian ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2023 yang hanya sebesar 84,46 %.

Penurunan capaian pendidikan kesetaraan yang sangat signifikan ini dikarenakan adanya penurunan minat lulusan SMP untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Para siswa lulusan SMP sebagian besar langsung bekerja pada pabrik rokok di sekitar lingkungan tinggal.

Selain jumlah penerima target layanan terdapat penghitungan mutu yang harus dipenuhi. Adapun capaian layanan dan mutu pada masing-masing jenis layanan kesehatan dapat dilihat pada tabel indeks capaian SPM.

➤ **Indeks Pencapaian (IP) SPM**

Indeks Capaian SPM merupakan penghitungan antara pencapaian mutu minimal layanan dasar dengan bobot 20 % dan pencapaian penerima layanan dasar dengan bobot 80%. Indeks Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Kudus Tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Yang Belum Terlayani	Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)			
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendidikan Anak Usia Dini					91,44 %
	Prosentase Penerima Layanan Dasar (80%)	26804	25730	1074	95.99 %	76,79 %
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Yang Belum Terlayani	Persentase	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia			
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						73,22%
1	Angka partisipasi sekolah	100	96	4	96.00 %	14,64 %
2	Angka partisipasi murni	100	85	15	85.00 %	
3	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	100	81	19	81.00 %	
4	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	100	92	8	92.00 %	
5	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	100	13	87	13.00 %	
6	Kecukupan formasi guru ASN	100	100	0	100.00 %	
7	Indeks distribusi guru	100	68	32	68.00 %	
8	Proporsi PTK bersertifikat	100	98	2	98.00 %	
9	Proporsi PTK penggerak*	100	26	74	26.00 %	
CAPAIAN LAYANAN I						91,44 %
No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Yang Belum Terlayani	Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)			
2	Pendidikan Dasar					92,97 %
	Prosentase penerima layanan dasar (80%)	126.373	125.475	898	99.29 %	79,43 %

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Yang Belum Terlayani	Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia			
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						67,70 %
	SD				68,74	
1	Angka partisipasi kasar	100	102.02.00	-2.02	100.00 %	
2	Angka partisipasi sekolah	100	98.33.00	0,088	98.33 %	
3	Kemampuan literasi	100	84.05.00	15.05	84.50 %	
4	Kemampuan numerasi	100	78.01.00	0,94	78.01 %	
5	Perbedaan skor literasi	08.13	08.14	-0.0099	100.00 %	
6	Perbedaan skor numerasi	0,78	18.02	-0.03	100.00 %	
7	Indeks iklim keamanan	100	75.73	24.27.00	75.73 %	
8	Indeks iklim kebhinekaan	100	76.01.00	1,027	76.01 %	
9	Indeks iklim inklusivitas	100	58.09.00	41.01	58.90 %	
10	Kecukupan formasi guru ASN	100	26.69	73.31	26.69 %	
11	Indeks distribusi guru	100	35	65	35.00 %	
12	Proporsi PTK bersertifikat	100	26.69	73.31.	26.69 %	
13	Proporsi PTK penggerak*	100	36.31	63.69	36.31 %	
	SMP				66,47%	
1	Angka partisipasi kasar	100	100.13	-0.13	100.00 %	
2	Angka partisipasi sekolah	100	95.41	04.59	95.41 %	
3	Kemampuan literasi	100	87.04	12.06	87.40 %	
4	Kemampuan numerasi	100	65.92	34.08.	65.92 %	
5	Perbedaan skor literasi	0,143	0,35	-4.98	100.00 %	
6	Perbedaan skor numerasi	0,047	0,33	-6.97	100.00 %	
7	Indeks iklim keamanan	100	71.15	28.85	71.15 %	
8	Indeks iklim kebhinekaan	100	75.15	24.85	75.15 %	
9	Indeks iklim inklusivitas	100	58.77	41.23	58.77 %	
10	Kecukupan formasi guru ASN	100	17.44	82.56.	17.44 %	
11	Indeks distribusi guru	100	28	72	28.00 %	
12	Proporsi PTK bersertifikat	100	47.04	52.06.	47.40 %	
13	Proporsi PTK penggerak*	100	17.44	82.56.	17.44 %	
CAPAIAN LAYANAN II						92,97 %
No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Yang Belum Terlayani	Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)			
3	Pendidikan Kesetaraan					69,08 %
	Jumlah yang harus dilayani (80%)	2.858	1.873	985	65.54 %	52.43 %

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Yang Belum Terlayani	Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia			
Prosentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan						16,65 %
1	Angka partisipasi kasar	84.46.00	84,46	-26.07	100.00 %	
2	Angka partisipasi sekolah	84.46.00	84,46	0,81	77.60 %	
3	Kemampuan literasi	100	77,73	34.19	65.81 %	
4	Kemampuan numerasi	100	78,26	45.58	54.42 %	
5	Perbedaan skor literasi	03.43	62,32	-9.02	100.00 %	
6	Perbedaan skor numerasi	0,147	5,09	-4.98	100.00 %	
7	Indeks iklim keamanan	100	35,49	31.05	68.50 %	
8	Indeks iklim kebhinekaan	100	62.67	37.33.00	62.67 %	
9	Indeks iklim inklusivitas	100	53.17.00	46.83	53.17 %	
10	Kecukupan formasi guru ASN	0	0	0	100.00 %	
11	Indeks distribusi guru	0	0	0	100.00 %	
12	Proporsi PTK bersertifikat	0	0	0	100.00 %	
13	Proporsi PTK penggerak*	0	0	0	100.00 %	
CAPAIAN LAYANAN III						69,08 %
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar (I + II + III)						253,49
Indeks Pencapaian (IP) SPM Pendidikan (TOTAL IP : 3)						84,50 %

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks Pencapaian (IP) SPM Pendidikan Kabupaten Kudus tahun 2024 adalah **84,50 %** masuk dalam Kategori **Tuntas Madya**.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pendidikan sebagaimana tersebut di atas, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Tabel berikut ini menunjukkan dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pendidikan:

Tabel 4.4
Tabel Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Pendidikan
Kabupaten Kudus Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	Pendidikan Anak Usia Dini	-	24.832.477.080,-	-
2	Pendidikan Dasar	-	135.262.271.887,-	-
3	Pendidikan Kesetaraan	-	4.353.879.960,-	-
4	Jumlah		164.448.628.927,-	

Berdasarkan tabel di atas, total anggaran yang dialokasikan untuk pemenuhan layanan dasar masyarakat pada bidang Pendidikan total mencapai Rp. 164.448.628.927,-

4.1.5 Dukungan Personil

Adapun dukungan personil pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan diantaranya PAUD 2.750 org, pendidikan dasar 9.031 orang, dan Pendidikan Kesetaraan sebanyak 409 org

Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pendidikan sebagaimana tersebut di atas, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dukungan dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan jenis pelayanan dasar pendidikan sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari 2.750 personil;
2. Pendidikan Dasar terdiri dari 9.031 personil;
3. Pendidikan Kesetaraan terdiri dari 409 personil.

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal Urusan Pendidikan, ditemukan beberapa kendala permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Permasalahan

Dalam pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal Urusan Pendidikan, terdapat kendala permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Tahap pengumpulan data, rilis data jumlah penduduk usia dari dukcapil seringkali terlambat dari pengisian SPM.
- tahap penghitungan kebutuhan, penerapan hasil perhitungan kebutuhan guru SD, SMP dan PAUD belum maksimal dan Kekurangan Guru TK yang memenuhi syarat untuk rekrutmen Pengawas
- Tidak adanya guru ASN pada PKBM swasta pada tingkat pendidikan kesetaraan, sehingga capaian mutu kesetaraan pada bidang tersebut dinyatakan kosong.
- Tahap pelaksanaan SPM, terdapat kendala terkait Kemampuan Numerasi Siswa (Pendidikan Kesetaraan) masih rendah, karena kekurangpahaman siswa memahami dan menerapkan materi matematika, dan Sertifikasi Pendidik dan Guru Penggerak, kewenangan Kementrian, OPD hanya mendorong pendidik untuk mendaftar
- Minat Pendidik / Guru TK untuk mengikuti seleksi Guru Penggerak rendah, karena banyak Guru TK yang berstatus non ASN. Sedangkan Guru ASN sebagian besar mendekati usia pensiun.

- b) Solusi
- Penertiban PAUD Swasta dengan mendorong mereka agar segera mengurus izin pendirian /operasiona.
 - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus akan segera berkoordinasi dengan BKPSDM Kabupaten Kudus untuk mendorong peningkatan pemerataan penempatan dan kapasitas ASN khususnya tenaga pendidik di Kabupaten Kudus.

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Wajib Kesehatan di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dr Loekmonohadi, meliputi Jenis Pelayanan Dasar:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- b. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan Kesehatan Balita;
- e. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar;
- f. Pelayanan Kesehatan Pada usia Produktif;
- g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Millitus;
- i. Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi;
- j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan Jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan TB;
- l. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko HIV.

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pelaksanaan target pemenuhan SPM pada Urusan Kesehatan di Kabupaten Kudus yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.4
Target Capain SPM Urusan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % (14.811)	1 Tahun
2.	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100 % (14.138)	1 Tahun
3.	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % (12.213)	1 Tahun

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % (48.809)	1 Tahun
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Persentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 % (126.115)	1 Tahun
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (573.808)	1 Tahun
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Persentase usia lanjut yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 % (97.968)	1 Tahun
8.	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (232.426)	1 Tahun
9.	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Millitus	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (18.033)	1 Tahun
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan Jiwa berat	Persentase ODGJ gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 % (2.182)	1 Tahun
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100 % (12.867)	1 Tahun
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko HIV	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/ preventif	100 % (16.547)	1 tahun

4.2.3 Realisasi

Realisasi pemenuhan SPM pada Urusan Kesehatan di Kabupaten Kudus yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.5
Realisasi Capaian SPM Urusan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % (14.811)	1 Tahun	100 % (14.811)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN
2.	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100 % (14.138)	1 Tahun	100 % (14.138)
3.	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % (12.213)	1 Tahun	99,08 % (12.101)
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % (48.809)	1 Tahun	95,93 % (46.824)
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Persentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 % (126.115)	1 Tahun	100 % (126.115)
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (573.808)	1 Tahun	99,62 % (571.607)
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Persentase usia lanjut yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 % (97.968)	1 Tahun	95,98 % (94.030)
8.	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (232.426)	1 Tahun	99,74 % (231.826)
9.	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Millitus	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (18.033)	1 Tahun	99,86 % (18.008)
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan Jiwa berat	Persentase ODGJ gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 % (2.182)	1 Tahun	99,27 % (2.166)
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Persentase orang terduga tuberculosi yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100 % (12.867)	1 Tahun	100 % (18.843)
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko HIV	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/ preventif	100 % (16.547)	1 tahun	100 % (16.547)

Bersadarkan tabel target dan realisasi capaian SPM bidang kesehatan di atas, Kabupaten Kudus tahun 2024 telah melayani seluruh target penerima layanan bidang kesehatan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan capaian layanan sebesar 100% hampir pada setiap jenis layanan dasar.

Selain jumlah penerima target layanan terdapat penghitungan mutu yang harus dipenuhi. Adapun capaian layanan dan mutu pada masing-masing jenis layanan kesehatan dapat dilihat pada tabel indeks capaian SPM.

➤ **Indeks Pencapaian (IP) SPM**

Indeks Capaian SPM merupakan penghitungan antara prosentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dengan bobot 20 % dan prosentase pencapaian penerima layanan dasar dengan bobot 80%. Adapun Indeks pencapaian SPM bidang kesehatan Kabupaten Kudus tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3x100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani (orang)	Jumlah Total Yang Terlayani (orang)	Yang Belum Terlayani		
1	2	3	4	5		6
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	14811	14811	0	100.00 %	80 %
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Persentase (4 : 3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia	Presentase		
1	2	3	4	5		6
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						100%
1.	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	14811	14811	0	100.00 %	20 %
2.	Tablet tambah darah	14811	14811	0	100.00 %	
3.	Alat Test Kehamilan		13,866	97.97 %		
4.	Alat Pemeriksaan HB	14811	14811	0	100.00 %	
5.	Alat Pemeriksaan Gol Darah	14811	14811	0	100.00 %	
6.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil Glukoprotein Urin	14811	14811	0	100.00 %	
7.	Kartu ibu/rekam medis ibu	14811	14811	0	100.00 %	
8.	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)		13,866	97.97 %		
9.	Tenaga Kesehatan Dokter/ Dokter spesialis kebidanan	14811	14811	0	100.00 %	
10.	Tenaga kesehatan : Bidan	14811	14811	0	100.00 %	

11.	Tenaga kesehatan : Perawat	14811	14811	0	100.00 %	
12.	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;	16	16	0	100.00 %	
13.	Tenaga kesehatan : Perawat	1913	1913	0	100.00 %	
14.	Tenaga kesehatan : Bidan	824	824	0	100.00 %	
15.	Tenaga kesehatan : Bidan	499	499	0	100.00 %	
16.	Tenaga kesehatan : Bidan	67	67	0	100.00 %	
17.	Tenaga kesehatan : Bidan	14811	14811	0	100.00 %	
CAPAIAN LAYANAN I						100 %
No	Jenis Layanan	Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani (orang)	Jumlah Yang Terlayani (orang)	Yang Belum Terlayani		
1	2	3	4		5	6
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	14138	14138	0	100.00 %	80 %
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jml Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jml Mutu Barang/ Jasa Tersedia	Presentase		
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						100%
1.	Formulir partograf	14138	14138	0	100.00 %	20 %
2.	Kartu ibu/rekam medis ibu	14138	14138	0	100.00 %	
3.	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	14138	14138	0	100.00 %	
4.	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	14138	14138	0	100.00 %	
5.	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	16	16	0	100.00 %	
6.	Tenaga kesehatan : Bidan	824	824	0	100.00 %	
7.	Tenaga kesehatan : Perawat	1913	1913	0	100.00 %	
8.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	499	499	0	100.00 %	
9.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	67	67	0	100.00 %	
Capaian Layanan II						100 %
No	Jenis Layanan Dasar	Jumlah Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani (orang)	Jumlah Total Yang Terlayani (orang)	Yang blm terlayani		
1	2	3	4	5		6
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12213	12101	112	99.08 %	79,27 %

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia			
1	2	3	4	5		6
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						99,08%
1.	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	12213	12101	112	99.08 %	19.91 %
2.	Vitamin K1 injeksi	12213	12101	112	99.08 %	
3.	Salep/tetes mata antibiotik	12213	12101	112	99.08 %	
4.	Formulir bayi baru lahir	12213	12101	112	99.08 %	
5.	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	12213	12101	112	99.08 %	
6.	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	12213	12101	112	99.08 %	
7.	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	12213	12101	112	99.08 %	
8.	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	16	16	0	100.00 %	
9.	Tenaga kesehatan : Bidan	824	824	0	100.00 %	
10.	Tenaga kesehatan : Perawat	1913	1913	0	100.00 %	
11.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	499	499	0	100.00 %	
12.	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	25	25	0	100.00 %	
13.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	67	67	0	100.00 %	
14.	Kader Kesehatan	4180	4180	0	100.00 %	
Capaian Layanan III						99,17 %
No	Jenis Layanan Dasar	Jml Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani (orang)	Jumlah Yang Terlayani (orang)	Yang Belum terlayani		
1	2	3	4	5		6
4	Pelayanan Kesehatan Balita	48.809	46824	1985	95.93 %	76,75 %
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Yang Belum Terlayani		
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						97,48
1.	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	48809	46824	1985	95.93 %	19,50 %
2.	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	48809	46824	1985	95.93 %	

3.	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	48809	46824	1985	95.93 %	
4.	Vitamin A Biru	48809	46824	1985	95.93 %	
5.	Vitamin A Merah	12,254	12,254	100.00 %		
6.	Vaksin imunisasi dasar: BCG	48809	46824	1985	95.93 %	
7.	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	12,254	12,254	100.00 %		
8.	Vaksin imunisasi dasar: IPV	48809	46824	1985	95.93 %	
9.	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	48809	46824	1985	95.93 %	
10.	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	48809	46824	1985	95.93 %	
11.	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib	48809	46824	1985	95.93 %	
12.	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	48809	46824	1985	95.93 %	
13.	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	48809	46824	1985	95.93 %	
14.	Peralatan Anafilaktik	48809	46824	1985	95.93 %	
15.	Formula Terapi Gizi Buruk	48809	46824	1985	95.93 %	
16.	Tenaga medis : Dokter	20	20	0	100.00 %	
17.	Tenaga kesehatan : Bidan	20	20	0	100.00 %	
18.	Tenaga kesehatan : Perawat	372	372	0	100.00 %	
19.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	824	824	0	100.00 %	
20.	Guru PAUD	1913	1913	0	100.00 %	
21.	Kader Kesehatan	67	67	0	100.00 %	
Capaian Layanan IV						96,25 %
No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Yang Belum Terlayani	Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x80%)
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani (orang)	Jumlah Total Yang Terlayani (orang)			
1	2	3	4	5		6
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	126,115	126,115	0	100 %	80 %
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Presentase	Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia			
1	2	3	4	5		6
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						100%
1.	Form pencatatan/ buku rapor kesehatanku	126115	126115	0	100.00 %	20 %
2.	Form pencatatan/ buku pemantauan kesehatan	126115	126115	0	100.00 %	
3.	Kuesioner skrining kesehatan	126115	126115	0	100.00 %	

4.	Formulir rekap hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	126115	126115	0	100.00 %	
5.	Formulir rekap hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	126115	126115	0	100.00 %	
6.	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	126115	126115	0	100.00 %	
7.	Alat Pemeriksaan Hb	20	20	0	100.00 %	
8.	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	126115	126115	0	100.00 %	
9.	Media promosi kesehatan	20	20	0	100.00 %	
10.	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	126115	126115	0	100.00 %	
11.	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	60	60	0	100.00 %	
12.	Tenaga kesehatan : Bidan	824	824	0	100.00 %	
13.	Tenaga kesehatan : Perawat	1913	1913	0	100.00 %	
14.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	67	67	0	100.00 %	
15.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	499	499	0	100.00 %	
16.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	65	65	0	100.00 %	
17.	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	80	80	0	100.00 %	
18.	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/ dokter kecil/peer conselor	4180	4180	0	100.00 %	
Capaian Layanan V						100 %
NO	Jenis Layanan Dasar	Jumlah Penerima layanan Dasar			Presentase (4 : 3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x80%)
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani (orang)	Jumlah Total Yang Terlayani (Orang)	Yang Belum Terlayani		
1	2	3	4	5		6
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	573808	571607	2201	99.62 %	79,69 %
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Presentase	Presentase (4 : 3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia			
1	2	3	4	5		6
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						99,88%

1.	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	573808	571607	2201	99.62 %	19,98 %
2.	Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	52	52	0	100.00 %	
3.	Alat : Tensimeter	37	37	0	100.00 %	
4.	Alat : Glukometer	81	81	0	100.00 %	
5.	Alat: Alat Pemeriksa Hb	27	27	0	100.00 %	
6.	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	573808	571607	2201	99.62 %	
7.	Alat : KIT IVA Tes	573808	571607	2201	99.62 %	
8.	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	27	27	0	100.00 %	
9.	Kit Ophthalmologi Komunitas	20	20	0	100.00 %	
10.	Kuesioner PUMA	573808	571607	2201	99.62 %	
11.	Alat Pelayanan KB	60	60	0	100.00 %	
12.	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	573808	571607	2201	99.62 %	
13.	Vaksin Tetanus Difteri (td)	573808	571607	2201	99.62 %	
14.	Tenaga medis : Dokter	372	372	0	100.00 %	
15.	Tenaga kesehatan : Bidan	824	824	0	100.00 %	
16.	Tenaga kesehatan : Perawat	1913	1913	0	100.00 %	
17.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	67	67	0	100.00 %	
18.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	65	65	0	100.00 %	
19.	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	22	22	0	100.00 %	
CAPAIAN LAYANAN VI						99,67 %
No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Yang Belum Terlayani	Persentase (4 : 3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x80%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani (orang)	Jumlah Yang Terlayani (orang)			
1	2	3	4	5	6	7
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	97968	94030	3938	95.98 %	79,78 %
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Presentase	Persentase (4 : 3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia			
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						98,76 %

1.	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	20	20	0	100.00 %	19,75 %
2.	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	97968	94030	3938	95.98 %	
3.	Alat pemeriksaan kolesterol	20	20	0	100.00 %	
4.	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	97968	94030	3938	95.98 %	
5.	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	20	20	0	100.00 %	
6.	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	97968	94030	3938	95.98 %	
7.	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	97968	94030	3938	95.98 %	
8.	Tenaga medis : Dokter	372	372	0	100.00 %	
9.	Tenaga kesehatan : Bidan	824	824	0	100.00 %	
10.	Tenaga kesehatan : Perawat	1913	1913	0	100.00 %	
11.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	67	67	0	100.00 %	
12.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	65	65	0	100.00 %	
13.	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	80	80	0	100.00 %	
CAPAIAN LAYANAN VII						99.53 %
No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Yang Belum Terlayani	Persentase (4 : 3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x80%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani (orang)	Jumlah Yang Terlayani (orang)			
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	232426	231826	600	99.74 %	79,79 %
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Yang Belum Terlayani	Persentase (4 : 3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x80%)
		Jml Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jml Mutu Barang/Jasa yang tersedia			
1	2	3	4	5		6
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						99,94%

1.	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	232426	231826	600	99.74 %	19,99 %
2.	Obat Hipertensi	232426	231826	600	99.74 %	
3.	Tensimeter	37	37	0	100.00 %	
4.	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	232426	231826	600	99.74 %	
5.	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	19	19	0	100.00 %	
6.	Tenaga medis : Dokter	372	372	0	100.00 %	
7.	Tenaga kesehatan : Bidan	824	824	0	100.00 %	
8.	Tenaga kesehatan : Perawat	1913	1913	0	100.00 %	
9.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	67	67	0	100.00 %	
10.	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	27	27	0	100.00 %	
11.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	499	499	0	100.00 %	
12.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	62	62	0	100.00 %	
CAPAIAN LAYANAN VIII						98.27 %
No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Yang Belum Terlayani	Persentase (4 : 3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x80%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani (orang)	Jumlah Yang Terlayani (orang)			
1	2	3	4	5		6
1	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	18033	18008	25	99.86 %	79,89 %
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4 : 3 x 100%)		Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x20%)
		Jml Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jml Mutu Barang/Jasa yang tersedia			
1	2	3	4	5		6
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						99,95%
1.	Obat Diabetes Melitus	18033	18008	25	99.86 %	19,99 %
2.	Fotometer atau Glukometer	27	27	0	100.00 %	
3.	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	18033	18008	25	99.86 %	
4.	Formulir pencatatan dan pelaporan	18033	18008	25	99.86 %	

	aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)					
5.	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	18033	18008	25	99.86 %	
6.	Tenaga medis : Dokter	372	372	0	100.00 %	
7.	Tenaga kesehatan : Bidan	824	824	0	100.00 %	
8.	Tenaga kesehatan : Perawat	1913	1913	0	100.00 %	
9.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	499	499	0	100.00 %	
10.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	65	65	0	100.00 %	
11.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	67	67	0	100.00 %	
12.	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	167	167	0	100.00 %	
CAPAIAN LAYANAN IX						99.88 %
	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Yang Belum Terlayani	Persentase (4 : 3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x80%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani			
1	2	3	4	5	7	6
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	2182	2166	16	99.27 %	79,41 %
No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Yang Belum Terlayani	Persentase (4 : 3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia			
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						99,59%
1.	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	2182	2166	16	99.27 %	19,92
2.	Penyediaan Psikofarmaka	2182	2166	16	99.27 %	
3.	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	2182	2166	16	99.27 %	

4.	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	2182	2166	16	99.27 %	
5.	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	2182	2166	16	99.27 %	
6.	Tenaga kesehatan : Dokter	372	372	0	100.00 %	
7.	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	4	4	0	100.00 %	
8.	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	20	20	0	100.00 %	
9.	Tenaga profesional lainnya	1	1	0	100.00 %	
CAPAIAN LAYANAN X						99,33 %
No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4 : 3 x 100%)		Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia			
1	2	3	4	5	6	7
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12867	18843	-5976	100.00 %	80 %
No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Yang Belum terlayani	Persentase (4 : 3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia			
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						100%
1.	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	12867	18843	-5976	100.00 %	20 %
2.	Reagen Zn TB	12867	18843	-5976	100.00 %	
3.	Masker bedah dan Masker N95	12867	18843	-5976	100.00 %	
4.	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/ Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	12867	18843	-5976	100.00 %	
5.	Katrid tes cepat molekuler	12867	18843	-5976	100.00 %	
6.	Formulir pencatatan dan pelaporan	12867	18843	-5976	100.00 %	
7.	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	12867	18843	-5976	100.00 %	
8.	Tuberkulin	12867	18843	-5976	100.00 %	

9.	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	18	18	0	100.00 %	
10.	Tenaga kesehatan : Perawat	1913	1913	0	100.00 %	
11.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	499	499	0	100.00 %	
12.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	62	62	0	100.00 %	
13.	Tenaga kesehatan : Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	167	167	0	100.00 %	
14.	Tenaga kesehatan : Radiografer	64	64	0	100.00 %	
15.	Kader Kesehatan	4180	4180	0	100.00 %	
CAPAIAN LAYANAN XI						100 %
No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Yang Belum Terlayani	Persentase (4 : 3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x80%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani (orang)	Jumlah Yang Terlayani (orang)			
1	2	3	4	5	6	7
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Human Immuno deficiency Virus	16547	16547	0	100.00 %	80 %
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						
No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Yang Belum Terlayani	Persentase (4 : 3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x20%)
		Jml Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jml Mutu Barang/Jasa yang tersedia			
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						99,06%
1.	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	16547	16547	0	100.00 %	19,21
2.	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	16547	16547	0	100.00 %	
3.	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/ Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/ Vacutainer dan Jarum Sesuai	16547	10031	6516	60.62 %	
4.	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	16547	16547	0	100.00 %	
5.	Tenaga medis : Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	5	5	0	100.00 %	

6.	Tenaga kesehatan : Bidan	824	824	0	100.00 %
7.	Tenaga kesehatan : Perawat	1913	1913	0	100.00 %
8.	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	167	167	0	100.00 %
9.	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	65	65	0	100.00 %
10.	Tenaga non kesehatan Terlatih/ Memiliki Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	22	22	0	100.00 %
CAPAIAN LAYANAN XII					
99,21 %					
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (I + II + III+IV+V+VI=VII+VIII+IX+X+XI+XII)					
1.189,82					
INDEKS PENCAPAIAN (IP) SPM KESEHATAN (TOTAL IP : 12)					
99,15 %					

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks Pencapaian (IP) SPM kesehatan Kabupaten Kudus tahun 2023 adalah **99,15 %** masuk dalam Kategori **Tuntas Utama**.

4.2.4 Alokasi Anggaran

Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kesehatan sebagaimana tersebut di atas, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Tabel berikut ini menunjukkan dukungan anggaran dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Kesehatan.

Tabel 4.7
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Kesehatan
Kabupaten Kudus Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	1,039,828,000	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	-	300,789,300	-
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	-	583,381,900	-
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	-	97,400,800	-
5.	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	-	615,787,500	-
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	-	151,312,310	-
7.	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	-	20,000,000	-
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita hipertensi	-	7,687,000	-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes militus	-	661,787,000	-
10.	Pelayanan Kesehatan Pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	23,792,840	-
11.	Pelayanan Kesehatan Pada terduga TBC	-	2,775,458,870	-
12.	Pelayanan Kesehatan Orang resiko HIV	-	572,434,880	-
	Total Anggaran	-	6,849,660,400	

4.2.5 Dukungan Personil

Adapun sumber daya manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus (Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah) adalah sebagai berikut:

No	Indikator SDM	Jumlah
1.	Dokter Spesialis Kandungan	16
2.	Dokter Umum	372
3.	Dokter Gigi	60
4.	Dokter Spesialis Paru	18
5.	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	5
6.	Perawat	1.913
7.	Bidan	824
8.	Tenaga Farmasi	499
9.	Ahli Gizi	67
10.	Tenaga Promosi Kesehatan	25
11.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	65
12.	Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik	167
13.	Tenaga Ahli Bidang Radiografer	64
14.	Tenaga Kesehatan Bidang Kesehatan Jiwa	4
15.	Tenaga lain terlatih bidang Kesehatanm Jiwa	20
16.	Tenaga Profesional	1
17.	Kader kesehatan	7.202
18.	Kader Lansia	80
19.	Guru PAUD	80
20.	Non Kesehatan pendukung	22
	Jumlah	11.504

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Beberapa kendala permasalahan yang dijumpai dalam upaya pemenuhan layanan SPM bidang kesehatan di Kabupaten Kudus, antara lain :

1. Masih terdapat kematian neonatal 0-28 hr sebanyak 61 bayi shg belum mendapat pelayanan kesh sesuai standar
2. Terdapat 51 bayi yg lahir di bulan desember akhir sehingga belum mendapat pelayanan bayi sesuai standar
3. Balita yang menimbangkan diri di posyandu belum 100 % baru 88,2% sehingga belum mendapat pelayanan balita sesuai standar KPUP,
4. Kurangnya kader dan perubahan dari posbindu ke posyandu
5. Tdk semua lansia datang ke posyandu dan puskesmas sehingga tdk bisa dilakukn skrining
6. Kurangnya kader dan perubahan dari posbindu ke posyandu
7. Pada pelayanan ODGJ. Perubahan kenaikan target dan adanya penurunan kunjungan keswa di puskesmas juga sangat mempengaruhi capaian penerapan SPM urusan Kesehatan

Sedangkan solusi yang dilakukan dalam upaya peningkatan layanan SPM Urusan Kesehatan diantaranya adalah :

1. Meningkatkan peran aktif dan dukungan dari Praktik Bidan Mandiri dalam pelayanan KIA
2. Meningkatkan media KIE bagi tenaga kesehatan dan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas data terutama di tingkat puskesmas dan fasilitas kesehatan swasta (rumah sakit, klinik, bidan praktek mandiri). Dengan menggunakan aplikasi yang sudah ada serta meningkatkan koordinasi dan pertemuan dengan fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta.
4. Peningkatan kompetensi teknis pada SDM Kesehatan, baik bersumber dana APBD maupun dana BLUD Puskesmas.
5. Bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Kudus dan lembaga-lembaga pelatihan lainnya untuk meningkatkan kemampuan Kader Kesehatan yang terlatih melalui pelatihan teknis bidang kesehatan
6. Aktif berkolaborasi dengan pelayanan swasta terkait pelayanan pada usia produktif, usia lanjut, Diabetes, Hipertensi dan ODGJ

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pekerjaan Umum di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, meliputi Jenis Pelayanan Dasar:

- a. Pemenuhan Kebutuhan air minum curah lintas kabupaten / kota

- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pelaksanaan target SPM pada Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.8
Target Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok	100% (6.408 Jiwa)	Setiap tahun
2.	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik regional	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100% (2.216 Jiwa)	Setiap Tahun

4.3.3 Realisasi

Tabel 4.9
Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok	100% (6.408 Jiwa)	Setiap tahun	97,65 % (6.408 Jiwa)
2.	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik regional	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100% (2.216 Jiwa)	Setiap Tahun	92,75% (2.216 Jiwa)

Sebagaimana pada tabel di atas, pemenuhan SPM Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Kudus terdiri atas 2 jenis pelayanan dasar, yaitu Layanan Dasar Pemenuhan Kebutuhan Air Minum sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional.

Capaian layanan SPM Kabupaten Kudus tahun 2024 terkait pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari untuk Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok sebanyak 6.408 Jiwa dari jumlah keseluruhan sebesar 6.408 Jiwa atau sekitar 100 %. Kemudian, untuk capaian layanan Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik regional

lintas kabupaten di Kabupaten Kudus pada tahun 2023 sebanyak 2.216 Jiwa dari jumlah keseluruhan sebesar 2.216 Jiwa atau sekitar 100 %. Hal ini menunjukkan komitmen serius Pemerintah Kabupaten Kudus untuk melayani dan mencukupi kebutuhan terkait akses air minum dan air limbah masyarakat di Kabuapten Kudus.

Selain jumlah penerima target layanan terdapat penghitungan mutu yang harus dipenuhi. Adapun capaian layanan dan mutu pada masing-masing jenis layanan kesehatan dapat dilihat pada tabel indeks capaian SPM.

➤ Indeks Pencapaian (IP) SPM

Indeks Capaian SPM merupakan penghitungan antara prosentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dengan bobot 20 % dan prosentase pencapaian penerima layanan dasar dengan bobot 80%. Adapun Indeks pencapaian SPM bidang pekerjaan umum Kabupaten Kudus tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.10
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Pekerjaan Umum
Tahun 2024

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Yang Belum Terlayani	Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jml yang harus dilayani (Orang)	Jml yang terlayani (Orang)			
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	6408	6408	0	100.00 %	80 %
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Yang Belum Terlayani	Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani			
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						100%
1	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	1602	1602	0	100.00 %	20 %

2	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	1602	1602	0	100.00 %	
3	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	1	0	1	100.00 %	
4	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	1	0	1	100.00 %	
CAPAIAN LAYANAN I						100 %
NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Yang Belum Terlayani	Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)			
1	2	3	4		5	6
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						100%
1	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	2216	2216	0	100.00 %	80 %
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Yang Belum Terlayani	Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani			
1	2	3	4		5	6
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	554	554	0	100.00 %	20 %

2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	554	554	0	100.00 %
3	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	554	554	0	100.00 %
CAPAIAN LAYANAN II					100%
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar (I + II)					200
Indeks Pencapaian (IP) SPM Pekerjaan Umum (TOTAL IP : 2)					100%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks Pencapaian (IP) SPM kesehatan Kabupaten Kudus tahun 2024 adalah 100% masuk dalam Kategori **Tuntas Paripurna**.

4.3.4 Alokasi Anggaran

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum, oleh Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran sebagai bentuk dukungan untuk terlaksananya pelayanan dasar di bidang tersebut. Tabel berikut ini menunjukkan dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum disesuaikan dengan kebutuhan pemenuhan mutu layanan.

Adapun alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan pelayanan SPM di Bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.11
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Pekerjaan Umum Kabupaten
Kudus Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber lain yang sah
1	2	3	4	5
1	Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari	2,475,000,000 (PAMSIMAS)	7,250,266,000	-
2	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik regional	-	3,721,962,000	1,927,084,250 (CSR <i>Djarum Foundation</i>)
	Jumlah	2,475,000,000	10,972,228,000	1,927,084,250

4.3.5 Dukungan Personil

Sedangkan dukungan personil untuk pelaksanaan dasar di bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh 7 orang personil bidang sanitasi dan 7 orang personil di bidang air minum.

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal Urusan Pekerjaan Umum terdapat kendala permasalahan diantaranya adalah bidang sanitasi : adanya perubahan penambahan sasaran penerima antara penetapan awal dengan pelaporan akhir tahun, bidang air minum belum dilaksanakan uji kualitas air minum secara berkala di semua titik sumur jaringan perpipaan.

Sedangkan salah satu solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan pendampingan dengan pola sharing untuk beberapa wilayah sekaligus.

4.4 Urusan Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, meliputi Jenis Pelayanan Dasar :

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana.
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pelaksanaan target dan realisasi pemenuhan SPM pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Perukiman di Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.12
Target SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2024	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100% (972)	Tiap Tahun
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat Progam Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100% (12)	Setiap Tahun

4.4.3 Realisasi

Tabel 4.13
Realisasi SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2023	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100% (972)	Tiap Tahun	100% (972)
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat Progam Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100% (12)	Setiap Tahun	100% (21)

Sebagaimana pada tabel di atas, target dan realisasi pemenuhan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Perukiman di Kabupaten Kudus terdiri atas 2 jenis pelayanan dasar, yaitu layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam dan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten.

Capaian layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam dan Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten pada tahun 2024 telah optimal, mencapai 100%. Dengan demikian layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam dan fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten sudah baik.

Selain jumlah penerima target layanan terdapat penghitungan mutu yang harus dipenuhi. Adapun capaian layanan dan mutu pada masing-masing jenis layanan kesehatan dapat dilihat pada tabel indeks capaian SPM.

➤ **Indeks Pencapaian (IP) SPM**

Indeks Capaian SPM merupakan penghitungan antara prosentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dengan bobot 20 % dan prosentase pencapaian penerima layanan dasar dengan bobot 80%. Adapun Indeks pencapaian SPM bidang pekerjaan umum Kabupaten Kudus Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.14
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Yang Harus dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang blm terlayani		
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	972	972	0	100	80 %
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi			
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						100%
1.	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	243	243	0	100%	20 %
2.	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0	0	0	100%	
3.	Pemukiman kembali bagi korban bencana	0	0	0	100%	
4.	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	0	100%	
CAPAIAN LAYANAN I						100%
No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang blm terlayani		

1	2	3	4	5	6	7
	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12	12		100 %	80 %
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi			
1	2	3	4	5	6	7
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	1	1		100%	20 %
2	Subsidi uang sewa	1	1		100%	
3	Penyediaan rumah layak huni	1	1		100%	
		CAPAIAN LAYANAN II				100 %
		TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (I + II)				200 %
		INDEKS PENCAPAIAN (IP) SPM PERUMAHAN RAKYAT (TOTAL IP : 2)				100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks Pencapaian (IP) SPM kesehatan Kabupaten Kudus tahun 2024 adalah 100 % masuk dalam Kategori Tuntas Paripurna. Hal ini mencerminkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupten Kudus sudah mencapai kerja optimal dalam pemenuhan layanan dasar perumahan rakyat di Kabupaten Kudus.

4.4.4 Alokasi Anggaran

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten menganggarkan alokasi anggaran sebagai bentuk dukungan untuk terlaksananya pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, diantaranya sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.15
Alokasi Anggaran Pemenuhan
SPM Perumahan Rakyat Kabupaten Kudus Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)			Jumlah Personil
		APBN	APBD	Sumber lain	
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam	-	40,000,000	-	6 (enam) Orang
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	-	-	-	
	Jumlah		15.823.500,-		

4.4.5 Dukungan Personil

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tersebut di atas, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman didukung 147 personil.

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat permasalahan diantaranya dalam proses usulan perbaikan rumah tidak layak huni, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yakni :

1. Kendala pada saat dilakukan verifikasi dan validasi ternyata terdapat data calon penerima yang sudah meninggal dunia, ataupun kondisi rumah yang diperbaiki oleh pemiliknya sehingga sudah menjadi layak huni.
2. Dalam pelaksanaan penyusunan identifikasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman terkendala keterbatasan ketersediaan data di desa.

Adapun upaya-upaya yang telah ditempuh Pemerintah Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak sehingga setiap perubahan akan segera terpantau dan dilaporkan secara dini.
2. Mengusulkan untuk menambah Formasi ASN baik kuantitas maupun kualitas (kompetensi) di bidang teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kesehatan

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Wajib Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dengan dukungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, meliputi Jenis Pelayanan Dasar :

- a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- c. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pelaksanaan target dan realisasi pemenuhan SPM pada Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.27

Target SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2024 (%)	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100% (212)	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Informasi Rawan bencana	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100% (59.174)	Setiap Tahun
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiap siagaan Terhadap Bencana	Persentase (%) jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100% (59.174)	Setiap Tahun
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase (%) jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100% (59.174)	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran	Persentase warga negarayang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100% (19)	Setiap Tahun

4.5.3 Realisasi

Tabel 4.28

Realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2024 (%)	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100% (212)	Setiap Tahun	100% (212)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2024 (%)	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI
2.	Pelayanan Informasi Rawan bencana	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100% (59.174)	Setiap Tahun	100% (59.174)
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiap siagaan Terhadap Bencana	Persentase (%) jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100% (59.174)	Setiap Tahun	100% (59.174)
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase (%) jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100% (59.174)	Setiap Tahun	100% (59.174)
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran	Persentase warga negarayang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100% (19)	Setiap Tahun	100% (19)

Target dan realisasi layanan pemenuhan SPM Urusan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus sebagaimana tabel di atas terdiri atas 5 jenis pelayanan dasar, yaitu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Informasi Rawan bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiap siagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran.

Pada tahun 2024, capaian 5 Layanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus sudah optimal, yakni masing-masing Layanan Dasar telah mencapai 100%. Hal tersebut mengindikasikan penyelenggaraan pelayanan di bidang Trantibumlinmas sudah dilaksanakan secara konsisten oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, dalam hal ini oleh Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk layanan terkait kebencanaan.

➤ **Indeks Pencapaian (IP) SPM**

Indeks Capaian SPM merupakan penghitungan antara prosentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dengan bobot 20 % dan prosentase pencapaian penerima layanan dasar dengan bobot 80%. Adapun Indeks pencapaian SPM bidang pekerjaan umum Kabupaten Kudus tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.29
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Trantibum Linmas Tahun 2024

No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jml yang harus dilayani (orang)	Jml yang terlayani (orang)	Yang Belum Terlayani		
1	2	3	4	5	6	7
	Pelayanan Trantibumlinmas	212	212	0	100.00 %	80 %
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jml Mutu Harus Dilayani	Jml Mutu Terlayani/ Terpenuhi	Yang Belum Terlayani		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	3	3	0	100 %	20%
2.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	14	14	0	100 %	
3.	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	139	139	0	100 %	
4.	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1	1	1	100 %	
5.	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	0	0	0	100 %	

6.	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	0	0	0	100 %	
CAPAIAN LAYANAN I						100
No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jml yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang harus dilayani (orang)	Yang Belum Terlayani		
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	59174	59174	0	100.00 %	80
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jml Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Yang Belum Terlayani		
1.	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dlm bentuk dokumen yang sah/legal)	1	1		100%	20 %
2.	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	59.174	59.174		100%	
3.	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	1.000	1.000		100%	
4.	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	122	122		100%	
CAPAIAN LAYANAN II						100 %
No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang harus dilayani (orang)	Yang Belum Terlayani		
1	2	3	4	5	6	7
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	59.174	59.174	0	100	80
No	Mutu Minimal Layanan	Penerima Layanan Dasar			Persentase	Indeks

	Dasar	Jml Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Yang Belum Terlayani	(4:3 x 100%)	Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 20%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	330	330		100%	20 %
2.	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	200	200		100%	
CAPAIAAN LAYANAN III						100 %
No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jml yang harus dilayani (orang)	Jml yang harus dilayani (orang)	Yang Belum Terlayani		
1	2	3	4	5	6	7
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN):	59.174	59.174	0	100%	80 %
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jml Mutu Yang Harus Dilayani	Jml Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Yang Belum Terlayani		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (pusdalops penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana)	1	1		100%	20 %
2.	Pendataan terhadap warga yang terkena/ menjadi korban bencana	59.174	59.174		100%	
3.	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	2	2		100%	
4.	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	1	1		100%	
5.	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	3591	3591		100%	
CAPAIAAN LAYANAN IV						100%
No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan
		Jumlah yang	Jumlah yang	Yang Belum		

		harus dilayani (orang)	harus dilayani (orang)	Terlayani		Dasar (5 x 80%)
1	2	3	4	5	6	7
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	19	19		100 %	80%
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Yang Belum Terlayani		
1	2	3	4	5	6	7
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/ laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kel relawan pemadam kebakaran/ redkar)	197	7	12	36,84%	17,89 %
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	1	1		100%	
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, dll.)	4	4		100%	
	4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	30	30		100%	
	5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	2	2		100%	

	6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	2	2		100%	
CAPAIAN LAYANAN V						97,89%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (I + II+III+IV+V)						497,89%
INDEKS PENCAPAIAN (IP) SPM TRANTIBUM LINMAS (TOTAL IP : 2)						99,30 %

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks Pencapaian (IP) SPM Trantibum linmas Kabupaten Kudus tahun 2024 adalah 99,30 % masuk dalam Kategori **Tuntas Utama**. Hal ini mencerminkan bahwa Satpol PP dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupten Kudus sudah mencapai kerja optimal dalam pemenuhan layanan dasar perumahan rakyat di Kabupaten Kudus

4.5.4 Alokasi Anggaran

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran sebagai bentuk dukungan untuk terlaksananya pelayanan dasar bidang ini, diantaranya sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.30
Alokasi Anggaran Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber lain yang sah
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban	-	4,469,754,300	-
2	Pelayanan Informasi Rawan bencana	-	250,000,000	-
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	3,269,691,495	-
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	729,442,440	-
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran	-	2,714,779,200	-
	Jumlah		11,183,917,435	

4.5.5 Dukungan Personil

Sedangkan dukungan personil untuk pelaksanaan dasar di bidang Trantibumlinmas : Personil Satpol PP = 58 Orang (terdiri dari 25 Orang personil trantib + 33 Orang personil damkar), Personil BPBD = 153 Orang (terdiri dari 21 ASN, 22 non ASN dan 110 relawan).

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang menghambat dalam penyelenggaraan pelayanan SPM bidang Trantibumlinmas diantaranya ;

1. Kasus dominan terkait dengan penegakan perda adalah pelanggaran izin, dimana diantaranya berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pusat sehingga perlu koordinasi dengan Pemerintah untuk pelaksanaan pendataan
2. KRB Belum detail mendeskripsikan kejadian rawan bencana tiap desa atau kelurahan, sehingga belum bisa dihitung secara detail kebutuhan barang dan biaya untuk pengantasan bencana
3. Untuk mencapai target SPM Time Response Damkar 15 menit, sarana dan prasarana serta lokasi posko Damkar belum memadai sepenuhnya

Sedangkan langkah-langkah yang dilaksanakan antara lain

1. Terkait respon time di atas 15 menit, Damkar melakukan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Kudus untuk penanganan tanggap kebakaran di Kabupaten Kudus.
2. Melakukan penambahan anggaran dan menutup kekurangan personil Satpol PP dari unsur P3K, serta mengirimkan anggota untuk mengikuti pelatihan dan bintek PPNS.
3. Mendorong agar Destana (Desa Tanggap Bencana) dan Kencana (Kecamatan Tanggap Bencana) semakin aktif dalam penanganan darurat bencana.

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus, meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial

- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pelaksanaan target dan realisasi pemenuhan SPM pada Urusan Sosial di Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.31
Pencapaian SPM Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2024 %	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 % (570)	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 % (85)	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial	umlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 % (368)	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 % (100)	Setiap Tahun
5.	Linjamsos pada saat tanggap & setelah bencana bagi korban bencana	Jml linjamsos pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah	100 % (7.022)	Setiap Tahun

4.6.3 Realisasi

Tabel 4.32
Pencapaian SPM Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2023 %	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 % (570)	Setiap Tahun	100 % (565)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2023 %	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 % (85)	Setiap Tahun	100 % (85)
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial	umlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 % (368)	Setiap Tahun	100 % (368)
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 % (100)	Setiap Tahun	100 % (82)
5.	Linjamsos pada saat tanggap & setelah bencana bagi korban bencana	Jml linjamsos pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah	100 % (7.022)	Setiap Tahun	100 % (7.022)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa, target dan realisasi pemenuhan SPM Urusan Sosial terdiri dari 5 layanan dasar, yakni Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial, Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & setelah bencana bagi korban bencana Kabupaten/kota.

Capaian 5 layanan dasar Urusan Sosial di Kabupaten Kudus pada tahun 2024 sudah optimal, yakni masing-masing layanan dasar telah mencapai 100% (**Kategori Tuntas Paripurna**). Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Perangkat Daerah terkait dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang ada. Capaian ini perlu dipertahankan sebagai motivasi untuk pencapaian pada periode berikutnya.

Selain jumlah penerima target layanan terdapat penghitungan mutu yang harus dipenuhi. Adapun capaian layanan dan mutu pada masing-masing jenis layanan kesehatan dapat dilihat pada tabel indeks capaian SPM.

➤ **Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Sosial**

Indeks Capaian SPM merupakan penghitungan antara prosentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dengan bobot 20 % dan prosentase pencapaian penerima layanan dasar dengan bobot 80%. Adapun Indeks pencapaian SPM bidang pekerjaan umum Kabupaten Kudus tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.33
Indeks Pencapaian SPM Urusan Sosial

No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
1	2	3	4	5	6	7
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	570	570	0	100.00 %	80 %
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jml Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jml Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Yang Belum Terlayani		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					100 %
1.	Layanan data dan pengaduan (layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	570	570	0	100.00 %	20%
2.	Penyediaan permakanaan	224	224	0	100.00 %	
3.	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	29	29	0	100.00 %	
4.	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	50	50	0	100.00 %	
5.	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	100	100	0	100.00 %	
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	4	4	0	100.00 %	
7.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang	16	16	0	100.00 %	

	dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)					
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	120	120	0	100.00 %	
9.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	5	5	0	100.00 %	
10.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	2	2	0	100.00 %	
11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	10	10	0	100.00 %	
12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	5	5	0	100.00 %	
13.	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	5	5	0	100.00 %	
CAPAIAN LAYANAN I						100 %
No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
1	2	3	4	5	6	7
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	85	85	0	100 %	80 %
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jml Mutu Yang Harus Dilayani	Jml Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Yang Belum Terlayani		
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						100 %
1.	Layanan data dan pengaduan	85	85	0	100.00 %	20 %
2.	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	3	3	0	100 %	

3.	Penyediaan permakanan	3	3	0	100.00 %		
4.	Penyediaan sandang	5	5		100 %		
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan	3	3	0	100.00 %		
6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	3	3		100 %		
7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	46	46	0	100.00 %		
8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	10	10	0	100 %		
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan dasar	3	3	0	100.00 %		
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	6	6		100 %		
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3	3	0	100.00 %		
12.	Layanan rujukan	3	3		100 %		
CAPAIAN LAYANAN II							100 %
No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)		Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani			
1	2	3	4	5	6	7	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	368	368	0	100 %	80 %	
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 20%)	
		Jml Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jml Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Yang Belum Terlayani			
1	2	3	4	5	6	7	
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						100 %	
1.	Layanan data dan pengaduan	368	368	0	100.00 %	20%	
2.	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	13	13	0	100.00 %		
3.	Penyediaan permakanan	250	250	0	100.00 %		
4.	Penyediaan sandang	50	50	0	100.00 %		
5.	Penyediaan alat bantu	10	10	0	100.00 %		
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan	3	3	0	100.00 %		
7.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	20	20	0	100.00 %		
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Lanjut Usia terlantar	3	3	0	100.00 %		
9.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	1	1	0	100.00 %		
10.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	2	2	0	100.00 %		
11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga	7	7	0	100.00 %		

12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3	3	0	100.00 %	
13.	Layanan rujukan	4	4	0	100.00 %	
CAPAIAN LAYANAN III						100 %
No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
1	2	3	4	5	6	7
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100	100	0	100 %	100 %
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jml Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jml Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Yang Belum Terlayani		
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						100 %
1.	Layanan data dan pengaduan	100	100	0	100.00 %	20 %
2.	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	8	8	0	100.00 %	
3.	Penyediaan permakanan	15	15	0	100.00 %	
4.	Penyediaan sandang	100	100	0	100.00 %	
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan	3	3	0	100.00 %	
6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	52	52	0	100.00 %	
7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	8	8	0	100.00 %	
8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	8	8	0	100.00 %	
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	8	8	0	100.00 %	
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga	23	23	0	100.00 %	
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	12	12	0	100.00 %	
12.	Layanan rujukan	3	3	0	100.00 %	
CAPAIAN LAYANAN IV						100 %
No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
1	2	3	4	5	6	7
	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	7.022	7.022	0	100 %	80%
No	Mutu Minimal Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Persentase	Indeks

		Jml Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Yang Belum Terlayani	(4:3 x 100%)	Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyediaan permakanan	7022	7022	0	100.00 %	20 %
2.	Penyediaan sandang	3000	3000	0	100.00 %	
3.	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	13	13	0	100.00 %	
4.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	100	100	0	100.00 %	
5.	Pelayanan dukungan Psikososial	100	100	0	100.00 %	
CAPAIAN LAYANAN V						100 %
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (I + II+III+IV+V)						500 %
INDEKS PENCAPAIAN (IP) SPM SOSIAL (TOTAL IP : 5)						100 %

4.6.4 Alokasi Anggaran

Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Sosial sebagaimana tersebut di atas, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Tabel berikut ini menunjukkan dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Sosial.

Tabel 4.34
Alokasi Anggaran Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)			Jumlah Personil
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah	
1.	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	-	304,526,800,-	-	48
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	-	-	-	
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	-	-	-	
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	-		-	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	-	259,648,000,-	-	
	Jumlah	-	564,174,800,-	-	

4.6.5 Dukungan Personil

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial sebagaimana tersebut di atas, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial didukung 36 personil

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sos P3A P2KB Kabupaten Kudus selaku pengampu penerapan SPM urusan sosial adalah :

1. Tahap pengumpulan data, Ketersediaan Data tidak memadai karena data sosial bersifat dinamis, nomaden, mobilitas tinggi, koordinasi lemah.
2. Pada Tahap penghitungan, Terdapat ketidaksesuaian antara Rincian Belanja di dalam DPA dengan Rincian kegiatan yang harus dipenuhi di dalam e_spm.bangda.kemendagri.
3. Alokasi Belanja Wajib Pelayanan Dasar Urusan Sosial belum memadai dengan tuntutan pelayanan di bidang Sosial. Anggaran Alokasi tahun 2024 1,7 M dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 sebesar 2.3 T.

Adapun solusi yang dilaksanakan yaitu melakukan koordinasi dengan OPD terkait terkait penanganan korban pasca bencana. Disamping itu Dinas Sosial P3A P2KB juga aktif melaksanakan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Masyarakat secara berkala dengan melibatkan BPJS, Dinas Kesehatan dan perangkat daerah terkait lainnya

4.7 Program dan Kegiatan

Dalam upaya penyelenggaraan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat di Kabupaten Kudus sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Pada Tahun Anggaran 2022 lalu Pemerintah Kabupaten Kudus mengalokasikan anggaran Program dan Kegiatan guna pencapaian pelayanan dasar, meliputi :

a. Urusan Pendidikan

Guna pelaksanaan layanan SPM pada bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga melalui 3 (tiga) Program yang terbagi ke dalam 8 (delapan) Kegiatan.

Tabel 4.35
Program Dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	PROG, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	%	
	KAB. KUDUS		164.448.628.927	158.639.475.568	96,47%	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		164.448.628.927	158.639.475.568	96,47%	
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		91.325.770.580	87.881.869.175	96,23%	
	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0,00%
	2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0,00%
	3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	533.261.300	529.246.101	99,25%
	4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0,00%
	5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	3.140.000.000	3.071.303.430	97,81%
	6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0,00%
	7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1.600.208.800	1.594.388.149	99,64%
	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	500.000.000	496.057.427	99,21%
	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	1.756.706.000	1.747.669.561	99,49%
	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0,00%
	11	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	462.371.000	426.650.000	92,27%
	12	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0,00%
	13	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0,00%
	14	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0,00%
	15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik	0	0	0,00%
	16	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	300.000.000	292.724.970	97,57%
	17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	1.098.801.000	959.891.000	87,36%
	18	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	0	0	0,00%
	19	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	4.052.507.200	3.880.297.000	95,75%
	20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	0	0	0,00%
	21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	49.296.584.380	46.751.542.248	94,84%
	22	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	8.844.160.000	8.745.165.880	98,88%
	23	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	1.603.623.000	1.603.623.000	100,00%
	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	0	0	0,00%
	25	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0,00%
	26	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Orang	0	0	0,00%

No	PROG, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	%	
	27	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	50.000.000	46.400.000	92,80%
	28	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	25.000.000	25.000.000	100,00%
	29	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	15.000.000	10.095.000	67,30%
	30	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	215.578.000	125.766.000	58,34%
	31	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	130.000.000	66.394.000	51,07%
	32	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0,00%
	33	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0,00%
	34	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0,00%
	35	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0,00%
	36	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0,00%
	37	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0,00%
	38	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.750.000.000	1.747.711.986	99,87%
	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	2.598.410.675	2.571.217.328	98,95%
	40	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	30.000.000	16.950.000	56,50%
	41	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidika	200.000.000	149.223.000	74,61%
	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	13.123.559.225	13.024.553.095	99,25%
	JUMLAH INDIKATOR			91.325.770.580	87.881.869.175	96,23%
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			43.936.501.307	42.013.894.181	95,62%
	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0,00%
	2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0,00%
	3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	0	0,00%
	4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0,00%
	5	Pembangunan Laboratorium	Ruang	0	0	0,00%
	6	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0,00%
	7	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit	0	0	0,00%
	8	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0,00%
	9	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0,00%
	10	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit	0	0	0,00%
	11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0,00%
	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	3.099.259.800	2.788.388.713	89,97%

No	PROG, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	%	
	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	0	0,00%
	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	633.309.800	632.042.286	99,80%
	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	488.712.950	486.023.567	99,45%
	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0,00%
	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0,00%
	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0,00%
	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Unit	0	0	0,00%
	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	424.395.450	423.406.125	99,77%
	21	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	164.074.000	145.828.100	88,88%
	22	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0,00%
	23	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0,00%
	24	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0,00%
	25	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	360.000.000	166.800.000	46,33%
	26	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Paket	0	0	0,00%
	27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	498.475.000	472.005.970	94,69%
	28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	801.332.000	661.537.700	82,55%
	29	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0,00%
	30	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.217.950.000	1.124.492.000	92,33%
	31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	0	0	0,00%
	32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	27.800.032.307	26.777.819.244	96,32%
	33	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	7.527.960.000	7.512.295.965	99,79%
	34	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang	0	0	0,00%
	35	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang	0	0	0,00%
	36	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0,00%
	37	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Orang	0	0	0,00%
	38	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	20.000.000	20.000.000	100,00%
	39	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	25.000.000	25.000.000	100,00%
	40	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	10.000.000	10.000.000	100,00%

No	PROG, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	%	
	41	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	100.000.000	80.827.000	80,83%
	42	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	60.000.000	41.650.000	69,42%
	43	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0,00%
	44	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0,00%
	45	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0,00%
	46	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0,00%
	47	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	75.000.000	58.366.000	77,82%
	48	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	621.000.000	577.411.511	92,98%
	49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	10.000.000	10.000.000	100,00%
	50	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0,00%
	51	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0,00%
	52	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Unit	0	0	0,00%
	53	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0,00%
	JUMLAH INDIKATOR			43.936.501.307	42.013.894.181	95,62%
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412			24.832.477.080	24.543.088.102	98,83%
	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	1.086.232.000	1.086.232.000	100,00%
	2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	0	0	0,00%
	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	928.000.000	926.480.645	99,84%
	4	Pengadaan Mebel PAUD	Paket	0	0	0,00%
	5	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Paket	0	0	0,00%
	6	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket	130.000.000	124.635.000	95,87%
	7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	0	0	0,00%
	8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	1.238.556.630	1.191.522.200	96,20%
	9	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta didik	114.984.700	106.724.700	92,82%
	10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	0	0	0,00%
	11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	7.019.783.750	6.880.898.731	98,02%
	12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	445.000.000	404.876.000	90,98%
	13	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	13.819.920.000	13.794.538.826	99,82%
	14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	0	0	0,00%
	15	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0,00%

No	PROG, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	%	
	16	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Orang	0	0	0,00%
	17	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0,00%
	18	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0,00%
	19	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0,00%
	20	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	50.000.000	27.180.000	54,36%
	21	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0,00%
	22	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0,00%
	23	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0,00%
	24	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0,00%
	25	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0,00%
	26	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0,00%
	27	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0,00%
	28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	0	0	0,00%
	29	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0,00%
	30	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0,00%
	31	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0,00%
	32	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0,00%
	33	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0,00%
	34	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0,00%
	35	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0,00%
	36	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0,00%
	JUMLAH INDIKATOR			24.832.477.080	24.543.088.102	98,83%
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan K20240327112444			4.353.879.960	4.200.624.110	96,48%
	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Unit	0	0	0,00%
	2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	0	0	0,00%
	3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Paket	0	0	0,00%
	4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0,00%

No	PROG, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	%	
	5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0,00%
	6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	29.999.990	24.857.000	82,86%
	7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	4.198.880.000	4.061.289.600	96,72%
	8	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0,00%
	9	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Unit	0	0	0,00%
	10	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0,00%
	11	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0,00%
	12	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0,00%
	13	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0,00%
	14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	99.529.060	89.006.600	89,43%
	15	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0,00%
	16	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0,00%
	17	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0,00%
	18	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0,00%
	19	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0,00%
	20	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0,00%
	21	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	0	0	0,00%
	22	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0,00%
	23	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0,00%
	24	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0,00%
	25	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0,00%
	26	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0,00%
	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0,00%
	28	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0,00%
	29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0,00%
	30	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0,00%

No	PROG, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	%	
	31	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0,00%
	32	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta didik	25.470.910	25.470.910	100,00%
	33	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0,00%
	34	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	0	0	0,00%
	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0,00%
	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Unit	0	0	0,00%
JUMLAH INDIKATOR			4.353.879.960	4.200.624.110	96,48%	
JUMLAH PROGRAM			164.448.628.927	158.639.475.568	96,47%	

b. Urusan Kesehatan

Guna pelaksanaan pelayanan SPM pada bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Kesehatan melaksanakan 12 (dua belas) sub-kegiatan guna memenuhi kebutuhan pelayanan dasar.

Tabel 4.36
Program Dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	%	
	KAB. KUDUS		6,849,660,400	6,264,366,633	91.46 %	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		6,849,660,400	6,264,366,633	91.46 %	
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten		6,849,660,400	6,264,366,633	91.46 %	
	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	1,039,828,000	1,001,065,638	96.27 %
	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	300,789,300	280,104,200	93.12 %
	3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	583,381,900	287,996,002	49.37 %
	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	97,400,800	84,556,643	86.81 %
	5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	615,787,500	561,506,700	91.19 %
	6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	151,312,310	146,371,450	96.73 %
	7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	20,000,000	19,857,000	99.29 %
	8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	7,687,000	7,686,800	100.00 %
	9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	661,787,000	631,186,900	95.38 %
	10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	23,792,840	23,792,800	100.00 %
	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	2,775,458,870	2,675,246,500	96.39 %

No	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	%
	12 Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	572,434,880	544,996,000	95.21 %
	JUMLAH INDIKATOR		6,849,660,400	6,264,366,633	91.46 %
	JUMLAH PROGRAM		6,849,660,400	6,264,366,633	91.46 %

c. Urusan Pekerjaan Umum

Guna pelaksanaan pelayanan SPM pada Urusan Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan 2 (dua) Program dan 2 (dua) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan terkait dengan pelayanan dasar pada Urusan Pekerjaan Umum, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.37
Program Dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEKERJAAN UMUM		7,122,479,000	6,954,073,000	97.64
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		6,262,636,000	6,130,077,000	97.88
	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638		6,262,636,000	6,130,077,000	97.88
	1. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	300,000,000	297,307,000	99.10
	2. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		5,562,636,000	5,440,303,000	97.80
	3. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masy.	400,000,000	392,467,000	98.12
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		859,843,000	823,996,000	95.83
	2 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023639		859,843,000	823,996,000	95.83
	1. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	242,049,000	206,996,000	85.52
	2. Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	617,794,000	617,000,000	99.87

d. Urusan Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan pelayanan SPM pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas PKPLH melaksanakan pelayanan dasar pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Sub Kegiatan Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota. Data sebagaimana tabel berikut

Tabel 4.38
Program Dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
	KAB. KUDUS		40,000,000	33,228,520	83.07 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		40,000,000	33,228,520	83.07 %
	1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		40,000,000	33,228,520	83.07 %
	1 Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kab/Kota	Dokumen	0	0	0%
	2 Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0%
	3 Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0%
	4 Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0	0	0%
	5 Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	6 Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	0%
	7 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	8 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	9 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
	10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	40,000,000	33,228,520	83.07 %
	JUMLAH INDIKATOR			40,000,000	33,228,520	83.07 %
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348		0	0	0.00 %
	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0%
	4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
	5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	7	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	8	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	10	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR			0	0	0.00 %
	JUMLAH PROGRAM			40,000,000	33,228,520	83.07 %

e. Urusan Trantibumlinmas

Penyelenggaraan pelayanan SPM pada Urusan Trantibumlinmas oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja untuk penyelenggaraan Sub Urusan Ketentraman Ketertiban, dan Bencana Kebakaran, serta Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk layanan Sub Urusan Bencana. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.39
Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
	KAB. KUDUS		12,192,514,435	11,477,976,621	94.14 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)		5,149,394,300	4,777,541,537	92.78 %
	1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		4,469,754,300	4,171,141,141	93.32 %
	1 Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	65,597,700	58,602,200	89.34 %
	2 Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	2,117,778,600	1,873,761,361	88.48 %
	3 Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	11,000,000	10,974,000	99.76 %
	4 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	1,000,000	974	97.40 %
	5 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	0%
	6 Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	1,000,000	939	93.90 %
	7 Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	0	0	0%

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
	8	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol Pngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	0	0	0%
	9	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	0	0	0%
	10	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang	0	0	0%
	11	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	0	0	0%
	12	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	0	0	0%
	13	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	0	0	0%
	14	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	2,159,655,000	2,133,052,580	98.77 %
	15	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	108,678,000	89,938,000	82.76 %
	16	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	0	0	0%
	17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Laporan	1,945,000	0	0%
	18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Unit	3,100,000	2,900,000	93.55 %

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN	
	JUMLAH INDIKATOR		4,469,754,300	4,171,141,141	93.32 %	
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455		678,640,000	605,425,396	89.21 %	
	1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
	2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
	3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
	4	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	0	0	0%
	6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	0	0	0%
	7	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	8	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
	9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	3,000,000	2,968,000	98.93 %
	11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	658,640,000	585,677,396	88.92 %
	12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	17,000,000	16,780,000	98.71 %
	JUMLAH INDIKATOR		678,640,000	605,425,396	89.21 %	
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457		1,000,000	975	97.50 %	
	1	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0	0	0%

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
	2	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
	3	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
	4	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	0	0	0%
	5	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	1,000,000	975	97.50 %
JUMLAH INDIKATOR				1,000,000	975	97.50 %
JUMLAH PROGRAM				5,149,394,300	4,777,541,537	92.78 %
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)			4,322,340,935	4,080,890,107	94.41 %
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456		250,000,000	245,769,898	98.31 %
	1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	105,000,000	104,331,438	99.36 %
	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	145,000,000	141,438,460	97.54 %
JUMLAH INDIKATOR				250,000,000	245,769,898	98.31 %
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443		3,269,691,495	3,084,074,699	94.32 %
	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	0	0	0%
	5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan	0	0	0%
	6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	140,000,000	137,890,000	98.49 %
	7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	-	0	0	0%
	8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	73,172,000	68,557,000	93.69 %
	9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	19,996,365	19,031,565	95.18 %
	10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	19,979,000	19,979,000	100.00 %

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
	11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0%
	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	0	0%
	13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	0%
	14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	3,000,000	3,000,000	100.00 %
	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	2,282,809,000	2,122,404,918	92.97 %
	16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	196,166,000	182,881,500	93.23 %
	17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	534,569,130	530,330,716	99.21 %
JUMLAH INDIKATOR				3,269,691,495	3,084,074,699	94.32 %
6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445			729,442,440	703,352,628	96.42 %
	1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	999,75	810	81.02 %
	2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	471,179,940	468,495,028	99.43 %
	3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	38,180,000	36,381,000	95.29 %
	4	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kab/Kota	Orang	0	0	0%
	6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	217,083,000	195,850,600	90.22 %
	7	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	999,75	816	81.62 %
	8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	1,000,000	1,000,000	100.00 %
JUMLAH INDIKATOR				729,442,440	703,352,628	96.42 %
7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446			73,207,000	47,692,882	65.15 %
	1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
	4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	53,287,000	33,112,382	62.14 %
	5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	0	0	0%
	6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	7	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	0%
	12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	0	0	0%
	13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	19,920,000	14,580,500	73.20 %
	JUMLAH INDIKATOR			73,207,000	47,692,882	65.15 %
	JUMLAH PROGRAM			4,322,340,935	4,080,890,107	94.41 %
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)			2,720,779,200	2,619,544,977	96.28 %
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449		2,714,779,200	2,613,544,977	96.27 %
	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	908,459,200	907,275,477	99.87 %
	2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kab/Kota	Dokumen	1,806,320,000	1,706,269,500	94.46 %
	3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	0	0	0%
	4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
	5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0	0	0%
	6	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	7	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0	0	0%
	8	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangann Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%
	9	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Laporan	0	0	0%
	10	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%
	11	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	12	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran&Penyelamatan	Dokumen	0	0	0%
	13	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	14	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0	0	0%
	15	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	0	0	0%
	16	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR				2,714,779,200	2,613,544,977	96.27 %
9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran K2023450			6,000,000	6,000,000	100.00 %
	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	6,000,000	6,000,000	100.00 %
JUMLAH INDIKATOR				6,000,000	6,000,000	100.00 %
10	Investigasi Kejadian Kebakaran			0	0	0.00 %
	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian	Dokumen	0	0	0%

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
		penyebab kejadian kebakaran				
	JUMLAH INDIKATOR			0	0	0.00 %
11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459			0	0	0.00 %
	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	0	0	0%
	2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	0	0	0%
	3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR			0	0	0.00 %
12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia K2023458			0	0	0.00 %
	1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	0	0	0%
	2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0%
	3	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	0%
	4	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR			0	0	0.00 %
	JUMLAH PROGRAM			2,720,779,200	2,619,544,977	96.28 %

f. URUSAN SOSIAL

Guna pelaksanaan pelayanan SPM pada Urusan Sosial, Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Sosial P3A P2KB melaksanakan 1 (satu) program yang terbagi menjadi 2 (dua) Kegiatan dan 12 Sub-Kegiatan dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.40
Program Dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Urusan Sosial Tahun 2024

No	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
	KAB. KUDUS		564.174.800	0	0,00%
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		564.174.800	0	0,00%
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		304.526.800	0	0,00%
	1 Penyediaan permakanan	Orang	75.000.000	71.235.000	94,98%
	2 Penyediaan sandang	Orang	34.999.800	32.633.814	93,24%
	3 Penyediaan alat bantu	Orang	69.999.000	66.296.053	94,71%
	4 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	32.900.000	9.159.360	27,84%
	5 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	28.280.000	3.860.220	13,65%
	6 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	6.750.000	0	0,00%
	7 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	2.000.000	0	0,00%
	8 Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2.000.000	285.000	14,25%
	9 Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	8.398.000	1.384.830	16,49%
	10 Pemberian layanan kedaruratan	Orang	28.500.000	3.129.300	10,98%
	11 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	8.000.000	0	0,00%
	12 Pemberian layanan rujukan	Dokumen	7.700.000	1.462.230	18,99%
	JUMLAH INDIKATOR		304.526.800	0	0,00%
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153		259.648.000	0	0,00%
	1 Penyediaan makanan	Orang	177.700.000	112.359.710	63,23%
	2 Penyediaan sandang	Orang	48.000.000	45.148.800	94,06%
	3 Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0,00%
	4 Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	24.948.000	24.588.749	98,56%
	5 Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	9.000.000	0	0,00%
	JUMLAH INDIKATOR		259.648.000	0	0,00%
	JUMLAH PROGRAM		564.174.800	371.543.065	65,86%

BAB V

PENUTUP

Capaian penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dilaporkan secara lengkap dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini. LPPD juga menyampaikan laporan mencakup akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, pelaksanaan tugas pembantuan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan indikator kinerja *outcome* dan *output* yang telah ditentukan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus telah melaksanakan seluruh Urusan Wajib Pemerintahan pada Tahun Anggaran 2024 lalu, walaupun dalam pelaksanaannya banyak mengalami kendala terutama berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19 yang memaksa Pemerintah Kabupaten Kudus untuk fokus dalam penanganan pandemi agar dampak kepada masyarakat dapat diminimalisir sekecil mungkin.

Untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pilihan, terdapat satu bidang yang tidak dapat dilaksanakan di Kabupaten Kudus yaitu dalam urusan Energi dan Sumber Daya Mineral mengingat kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam urusan tersebut adalah pengelolaan panas bumi, sedangkan di wilayah Kabupaten Kudus selama ini belum ditemukan sumber energi panas bumi.

Secara umum seluruh kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, namun demikian masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, LPPD ini dapat menjadi bahan dan materi bagi Pemerintah untuk memberikan evaluasi kebijakan yang bersifat konstruktif dan pembinaan bagi peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus.

Sedangkan dalam implementasi penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Kudus berupaya melaksanakan secara maksimal, dan diharapkan target yang dicapai senantiasa meningkat pada masa-masa mendatang.

LPPD juga memuat laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap masyarakat Kabupaten Kudus dalam pencapaian Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya pada Tahun 2024 lalu. Dari LPPD ini dapat didapatkan gambaran tingkat pencapaian kinerja Kabupaten yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan. .